



2025 LAPORAN KINERJA INTERIM TW 2

Presented by :
LOKA POM DI KABUPATEN BUNGO

KATA PENGANTAR



Pernanda Sapryanoki, S.Farm, Apt
Kepala Loka POM di Kabupaten Bungo

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan II Loka POM di Kabupaten Bungo Tahun 2025 yang merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Loka POM di Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan II Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29

Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2025 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan tentang capaian Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2025 yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Tahun 2025

Laporan Kinerja disusun secara periodik dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Bungo dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan

penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan II tahun 2025 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo tertuang perjanjian kinerja dan indikator kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo Tahun 2025-2029, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Pengukuran kinerja juga menjadi salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi acuan dalam upaya perbaikan secara berkelanjutan dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo pada triwulan selanjutnya.

Bungo, 21 Juli 2025

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Bungo



Pernanda Sapryanoki, S.Farm, Apt

RINGKASAN EKSEKUTIF

Loka POM di Kabupaten Bungo sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja kepada Kepala BPOM, stakeholder dan masyarakat. Laporan Kinerja Interim Triwulan II Loka POM di Kabupaten Bungo tahun 2025 mengacu pada Renstra Loka POM di Kabupaten Bungo tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang terdiri dari 8 sasaran strategis dengan 22 indikator kinerja.

Tabel 1. Sasaran Strategis Triwulan II Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Capaian TW II 2025 (%)	Normalisasi (%)	Kategori
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	120,43	109,33	Sangat Baik 
2	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	108,29	108,29	Sangat Baik 
3	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	91,92	91,92	Cukup 
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	110	110	Sangat Baik 
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	107,53	107,53	Sangat Baik 
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	101,84	101.84	Sangat Baik 
7	Layanan Publik UPT yang prima	N/A	N/A	N/A
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	100	100	Baik 
Total Capaian		740,01	728,91	
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)		105,72	104,13	
Predikat NKO		Istimewa	Istimewa	

Dari 8 Sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Bungo pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, berdasarkan evaluasi Triwulan II terdapat 5 sasaran strategis dengan

kategori Sangat Baik, 1 sasaran strategis dengan kategori Baik, 1 sasaran strategis dengan kategori Cukup, 1 sasaran strategis dihitung diakhir tahun. Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

- Capaian kinerja pada sasaran strategis pertama “Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan” sebesar 109,33% termasuk kategori Sangat Baik. Hal ini menggambarkan keberhasilan yang signifikan dalam meningkatkan pengawasan terhadap produk farmasi dan pangan olahan yang beredar di wilayah tersebut.
- Capaian kinerja pada sasaran strategis kedua “Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT” dengan nilai capaian 108,29 dengan kategori Sangat Baik. Capaian ini menunjukkan bahwa penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di Loka POM Kabupaten Bungo telah berhasil mencapai/melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan yang signifikan dalam hal kapasitas, peralatan, dan SDM laboratorium yang mendukung pengawasan terhadap produk-produk yang beredar di masyarakat. Capaian ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pengawasan, keamanan pangan, dan perlindungan masyarakat.
- Capaian kinerja pada sasaran strategis ketiga “Meningkatnya efektivitas KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) di masing-masing wilayah kerja UPT” sebesar 91,92% dengan kategori Cukup. Berdasarkan Analisa dari capaian keberhasilan dari nilai indeks efektivitas KIE adalah adanya perencanaan yang sudah dibuatkan dari awal walaupun terkendala dengan anggaran yang masih terblokir. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi dialihkan dengan daring dan jemput bola di tempat publik (*KIE Face to Face*). Perencanaan juga dilakukan pada KIE media dimana semua petugas wajib membuat postingan setiap bulannya sesuai tema yang ditentukan. Dari semua perencanaan akan dimonitoring setiap triwulannya agar dapat di evaluasi dan ditindaklanjuti apabila ada kendala dalam pelaksanaan. Selain perencanaan, Sumber Daya Manusia yang kompeten juga menunjang dari keberhasilan capaian ini, semua personil dan petugas Loka POM di

Kabupaten Bungo dapat bekerjasama dengan baik sehingga dapat memudahkan dalam realisasi pada triwulan II ini.

- Capaian kinerja pada sasaran strategis keempat "Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu" sebesar 110% dengan kategori Sangat Baik. Berdasarkan hasil capaian di TW II terhadap target tahun 2025, telah diperoleh capaian progress tahapan sebesar 64,33%, hal ini dikarenakan pendampingan UMKM Pangan Olahan telah dilakukan sesuai timeline. Adapun tahapan kegiatan yang telah dilakukan adalah Sosialisasi / KIE Keamanan Pangan dan Penetapan UMK Pangan Olahan. Sosialisasi / KIE Keamanan Pangan telah dilakukan melalui daring. Adapun peserta dari kegiatan ini adalah UMKM yang berasal dari wilayah kerja UPT, dari kegiatan ini dapat menjadi gambaran UMKM yang akan mengikuti program pendampingan oleh Loka POM. Namun, karena efisiensi anggaran, sehingga kegiatan dialihkan secara daring, kurang berdampak kepada pelaku usaha, sebagian pelaku usaha tidak fokus dan tampak kurang tertarik saat pelaksanaan kegiatan karena sambil melaksanakan kegiatan harian. Namun, dengan itu tidak menutupi minat pelaku usaha untuk mendaftarkan produk di BPOM.
- Capaian sasaran strategis kelima "Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif" di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo tercapai 107,53 dikategorikan Sangat Baik. Hal ini disebabkan terdapat kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia dengan tahapan proses penerbitan SPDP di Bulan Maret 2025..
- Capaian kinerja pada sasaran strategis keenam "Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT" sebesar 101,84% dengan kategori Sangat Baik. Hal ini dikarenakan pelaporan patrol siber Bulan Januari-Juni 2025 dan pelaporan profiling pelaku kejahatan Bulan Januari-Maret 2025 yang tepat waktu. Sedangkan pelaporan profiling pelaku kejahatan di Bulan Maret 2025 (pelaporan NIHIL) dinilai terlambat. Hal ini terjadi karena pada pertengahan Bulan Maret 2025 sedang dilakukan Operasi Penindakan yang berlanjut ke

proses pro justitia, sehingga dengan keterbatasan personal yang ada terjadi kelalaian dalam penyampaian laporan.

- Capaian kinerja pada sasaran strategis ketujuh "Layanan Publik UPT yang prima" yang belum dinilai pada Triwulan II menunjukkan bahwa evaluasi terhadap kualitas layanan publik yang diberikan oleh Loka POM di Kabupaten Bungo belum dapat dilakukan pada periode ini.
- Capaian indikator pada sasaran strategis kedelapan "Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal" sebesar 100% dengan kategori Baik. Hal ini menunjukkan bahwa Loka POM Kabupaten Bungo berhasil mencapai tata kelola organisasi yang baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo didukung anggaran APBN pada awal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. Rp3.572.436.000,-. Pada Bulan Maret 2025, Loka POM di Kabupaten Bungo mendapat tambahan anggaran Belanja Barang yang diperuntukkan untuk Honor PPNNP sebesar Rp 30.000.000,-. Sehingga total anggaran Loka POM di Kabupaten Bungo pada Triwulan II menjadi Rp 3.602.436.000,-. Realisasi anggaran pada Triwulan II Tahun 2025 adalah Rp1.466.231.197,- atau 40,70% Secara garis besar, Loka POM di Kabupaten Bungo telah berhasil mencapai target pada Triwulan II Tahun 2025. Namun dalam pencapaian ini masih ditemukan kendala antara lain :

1. Kurangnya jumlah tenaga pengawas inspeksi dan sertifikasi dibandingkan dengan jumlah sarana yang menjadi target Loka POM di Kabupaten Bungo
2. Adanya kebocoran informasi dalam kegiatan penindakan tindak pidana Obat ilegal oleh oknum ekspedisi.
3. Penguasaan teknologi informasi pelaku usaha masih terbatas
4. Adanya efisiensi anggaran yang berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan tupoksi.
5. Pengelolaan kinerja anggaran yang belum optimal. Halaman III DIPA belum dilakukan perencanaan secara maksimal.

6. Pengambilan sampel yang belum sesuai dengan pedoman sampling dan terjadi beberapa kali kesalahan pengiriman sampel yang tidak sesuai dengan balai tujuan.

Loka POM di Kabupaten Bungo berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja sehingga dapat mencapai sasaran strategis pada akhir Tahun 2025. Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025, telah dirumuskan langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan internal, antara lain yaitu:

- a. Mengoptimalkan pengumpulan data kinerja, melakukan monitoring dan evaluasi internal secara berkala melalui monitoring capaian kinerja, agar dapat mengantisipasi semua kendala dan hambatan dan menentukan langkahlangkah perbaikan;
- b. Melakukan penyesuaian kegiatan dan anggaran mengikuti adanya kebijakan efisiensi anggaran.
- c. Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor dan stakeholder terkait lainnya dalam berbagai aspek yang relevan untuk pembinaan dan peningkatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Bungo.
- d. Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo

HIGHLIGHT

TRIWULAN II

2025



April - Mei
2025



INTENSIFIKASI PENGAWASAN PENGELOLAAN OBAT DI RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS

Loka POM di Kabupaten Bungo melaksanakan kegiatan intensifikasi pengawasan Rumah Sakit dan puskesmas bertujuan untuk memastikan kepatuhan pengelolaan obat di Rumah Sakit dan Puskesmas sesuai ketentuan yang berlaku, mengidentifikasi potensi penyimpangan termasuk terkait narkotika, psikotropika, dan prekursor, serta menyusun rekomendasi penguatan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran dan mutu pelayanan kefarmasian.

Dilaksanakan pada 6 Rumah Sakit dan 7 Puskesmas dengan rata rata temuan belum tertib melakukan stok opname dan pencatatan stok, tidak melakukan monitoring suhu atau pemastian penyimpanan obat sesuai persyaratan, penyimpanan obat, NPP, dan Cold Chain Product tidak sesuai ketentuan.

14-16
Mei
2025



BIMBINGAN TEKNIS CPPOB UNTUK PELAKU USAHA YANG DILAKUKAN SECARA HYBRID

Pada tanggal 14-16 Mei 2025 Loka POM Kab Bungo telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis CPPOB untuk Pelaku Usaha yang dilakukan secara hybrid. Dalam kesempatan ini juga hadir Kepala Loka POM Kabupaten Bungo, Bapak Pernanda Sapryanoki, S.Farm, Apt beliau menyampaikan bahwa dari kegiatan ini sangat bermanfaat khususnya untuk Pelaku Usaha UMKM yang sedang dan akan mengajukan produknya di BPOM, serta untuk UMKM banyak relaksasi yang telah diberikan oleh BPOM untuk mempermudah bapak/ibu dalam proses perizinan, serta adanya kelonggaran biaya diberikan diskon sebesar 50% untuk pengajuan izin di BPOM.

Diharapkan dari kegiatan ini akan berdampak pada percepatan penerbitan Izin Edar Produk Pangan!!

22
Mei
2025



BPOM GANDENG PEMDA BUNGO PERKUAT ADVOKASI LINTAS SEKTOR PPABK DAN SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN INTERVENSI PEMBUDAYAAN KEAMANAN PANGAN

Sekda Bungo Drs.Mursidi,M.M membuka secara resmi Advokasi lintas sektor program prioritas Desa pangan aman, pasar pangan aman berbasis komunikasi (PPABK) dan sekolah yang melaksanakan intervensi pembudayaan keamanan pangan, bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Bungo.

Kegiatan itu di hadiri oleh Kepala OPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bungo, Kepala Sekolah, serta Para Datuk Rio.

Kepala Loka POM Kabupaten Bungo Pernanda Sapryanoki, S.Farm.,Apt dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Bungo dalam hal ini di wakili oleh Bapak Sekda Bungo yang telah berkenan memberikan ruangan untuk mengadakan Advokasi lintas sektor ini. Selain itu dirinya juga mengucapkan terimakasih kepada Kepala OPD, kepala sekolah, dan para Datuk Rio yang sudah mau hadir di dalam acara ini.

Pernanda Sapryanoki menyampaikan, ada 3 program nasional yang akan di adakan di Kabupaten Bungo di tahun 2025 ini, dimana 3 program itu yakni, 1.Program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), 2. Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPBK) dan 3. Pembudayaan Keamanan Pangan di Sekolah.

Ia berharap, dengan program adanya program nasional ini merupakan bagian dari gerakan nasional untuk bidang massapa gerakan masyarakat yang pada tahun ini ketiga program tersebut akan kita laksanakan di daerah kabupaten Bungo,"Ujarnya.

23
Mei
2025



SOSIALISASI PROGRAM SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN PEMBUDAYAAN KEAMANAN PANGAN

Jumat, 23 Mei 2025 telah dilaksanakan Sosialisasi Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan di Aula Bappeda, Kabupaten Bungo. Kegiatan ini dihadiri sebanyak 14 perwakilan sekolah dari Guru Penanggung Jawab Kantin serta Siswa dan Siswi yang kedepan diharapkan akan menjadi Kader Keamanan Pangan di sekolahnya. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Plt. Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Dinas Pendidikan Kab Bungo, Ibu Maryam, S.Ag. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Loka POM Kab Bungo, Bapak Pernanda Sapryanoki, S.Farm, Apt beliau menyampaikan bahwa dari kegiatan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman keamanan pangan komunitas sekolah, sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat mewujudkan dan menyediakan pangan yang aman dikonsumsi dalam kondisi aman, bermutu dan bergizi.

16
Juni
2025



BIMTEK KEAMANAN PANGAN UNTUK KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH TAHUN 2025

Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kader Keamanan Pangan Sekolah tahun 2025 merupakan program inisiatif BPOM dari Loka POM di Kabupaten Bungo yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dari pangan berisiko serta membentuk kader-kader yang mampu mengedukasi dan mengawasi praktik keamanan pangan di sekolah. Kegiatan ini diikuti oleh enam orang kader terpilih yang berasal dari latar belakang berbeda, yaitu guru, pengelola kantin, dan karyawan sekolah. Keterlibatan berbagai unsur di sekolah ini dimaksudkan agar pengawasan dan edukasi mengenai keamanan pangan dapat berjalan menyeluruh dan berkesinambungan.

Sebelum pelaksanaan bimtek, Loka POM di Bungo telah melakukan tahap sosialisasi kepada beberapa sekolah di wilayah tersebut. Dari hasil tahapan tersebut, muncul dua sekolah yang menjadi kandidat utama, yaitu SMP Negeri 3 dan SMP Xaverius. SMP Negeri 3 masuk dalam nominasi karena memiliki kebijakan internal yang mendukung terciptanya kantin sehat, seperti larangan menjual makanan dan minuman berwarna mencolok serta berasa instan, kewajiban siswa membawa tempat makan dari rumah, dan pelarangan membawa jajanan dari luar sekolah. Meskipun demikian, setelah melalui proses seleksi dan pertimbangan lebih lanjut, yang terpilih untuk mengikuti bimtek sebagai Sekolah Pangan Aman adalah SMP Xaverius.

17
Juni
2025



BIMBINGAN TEKNIS KADER KEAMANAN PANGAN DESA KABUPATEN BUNGO

Kegiatan ini merupakan kegiatan baru yang diadakan oleh Loka POM di Bungo. Karena pertimbangan efisiensi, jumlah kader yang dipilih untuk mengikuti bimtek ini adalah sebanyak 5 orang kader dengan berbagai kategori. Para kader ini diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah secara mandiri dalam menciptakan pangan yang aman, serta menyebarkan pengetahuan dan praktik baik ke desa-desa lainnya. Pada kegiatan ini disampaikan materi dan apa saja yang harus dilaksanakan kader yang akan dituangkan dalam rencana kerja Kader keamanan Pangan desa, dan di SKkan oleh Kepala Desa Kuamang Jaya. Kegiatan dibuka dengan sambutan oleh Pernanda Saprayanoki, S.Farm., Apt selaku Kepala Loka POM di Kabupaten Bungo. Dalam sambutannya disampaikan bahwa Desa Kuamang Jaya diproyeksikan akan dijadikan sebagai desa pangan aman pada tahun 2025 ini. pemilihan desa Kuamang Jaya sebagai nominasi desa pangan aman tahun 2025 ini merupakan hasil koordinasi dan advokasi Loka POM di Bungo dengan lintas sektor yang dihadiri oleh Pemerintah Daerah, mulai dari Bupati hingga jajaran kelurahan. Desa Kuamang Jaya dipilih karena desa ini merupakan desa lokus stunting tahun 2025, memiliki BUMDes Pasar Kuliner Pagi, adanya pelaku UMKM yang dibina, kader posyandu yang aktif, dan komitmen dari Perangkat desa.

18
Juni
2025



Forum Konsultasi Publik dan Sinergi Pentahelix untuk Tinjau Standar Pelayanan Loka POM Bungo dan Pengendalian Resistensi Antibiotik.

Kegiatan dilaksanakan di Gedung IBI Kabupaten Bungo, menghadirkan kolaborasi Pentahelix guna mengevaluasi standar pelayanan sekaligus membahas strategi pengendalian resistensi antibiotik. Kegiatan terlaksana secara hybrid, dihadiri oleh perwakilan pemerintah, akademisi, organisasi profesi, pelaku usaha, dan media massa dari 4 wilayah kerja yaitu Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dimana menunjukkan komitmen multisektor dalam meningkatkan pengawasan obat dan makanan.

Acara dibuka secara resmi oleh Bupati Kabupaten Bungo yang diwakili oleh Asisten III Pemerintah Kabupaten Bungo Yos Army, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya pelayanan publik yang akuntabel dan transparan. Loka POM memiliki peran strategis dalam melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi standar. Forum ini menjadi wadah untuk menyempurnakan kinerja pelayanan,"ujarnya.

Turut hadir sejumlah pejabat dan perwakilan lembaga terkait, antara lain, Kepala Balai POM Jambi, Kepala KPPN Bungo, Kepala Dinas Kesehatan Bungo, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Bungo, Ketua Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kabupaten Bungo.

19
Juni
2025



Loka POM Bungo Gelar KIE Pentingnya Gizi Seimbang dan Keamanan Pangan untuk Cegah Stunting

Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) Kabupaten Bungo menyelenggarakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bertema “Pentingnya Gizi Seimbang dan Keamanan Pangan untuk Pencegahan Stunting” di Gedung Balai Penyuluh KB, Kecamatan Pelepat. Acara ini dihadiri oleh orang tua dengan anak berisiko stunting, calon pengantin, serta kader KB dan stunting, sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pencegahan stunting melalui asupan gizi dan pangan yang aman.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Camat Pelepat diwakili sekretaris Camat Pelepat Purnama E, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan stunting. “Stunting bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga memengaruhi kualitas sumber daya manusia ke depan. Edukasi seperti ini sangat diperlukan agar masyarakat memahami peran gizi seimbang dan keamanan pangan,” ujarnya.

Turut hadir Koordinator Balai Penyuluh KB, Edi Kusnaini, yang menyatakan dukungannya terhadap program ini. “Kader KB dan stunting adalah ujung tombak dalam menyosialisasikan pentingnya gizi sejak dini, termasuk kepada calon pengantin sebagai langkah preventif,” tambahnya.

21
Juni
2025



Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Penyuluhan Komunitas Pasar tahun 2025

Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Penyuluhan Komunitas Pasar tahun 2025 merupakan program inisiatif BPOM melalui Loka POM di Kabupaten Bungo yang bertujuan untuk mewujudkan pasar tradisional yang lebih aman dari pangan berisiko serta meningkatkan kesadaran dan keterampilan komunitas pasar dalam menerapkan prinsip keamanan pangan. Kegiatan ini dilaksanakan di Pasar SPA Kuamang Kuning, yang terpilih sebagai Pasar Pangan Aman tahun 2025 karena dinilai memiliki komitmen dan potensi besar untuk menjadi pasar percontohan dalam penerapan keamanan pangan.

Sebelum pelaksanaan bimtek dan penyuluhan, Loka POM di Kabupaten Bungo telah melakukan tahapan identifikasi dan penilaian awal terhadap beberapa pasar di wilayah tersebut. Dari hasil penilaian tersebut, Pasar SPA Kuamang Kuning dipilih karena adanya upaya pengelola dan pedagang untuk menjaga kebersihan lingkungan pasar, menyediakan sarana cuci tangan, serta menerapkan pemisahan antara pangan mentah dan pangan siap saji. Komitmen tersebut menjadi pertimbangan utama sehingga pasar ini layak dijadikan lokasi percontohan program Pasar Pangan Aman.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

RINGKASAN EKSEKUTIF iii

HIGHLIGHT viii

DAFTAR ISI..... ix

DAFTAR TABEL xv

DAFTAR GAMBAR xvi

DAFTAR GRAFIK.....Error! Bookmark not defined.

BAB I PENDAHULUAN 19

1.1 LATAR BELAKANG 19

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI 20

1.3 STRUKTUR ORGANISASI 22

1.4 ISU STRATEGIS 27

1.4.1 ISU INTERNAL 27

1.4.2 ISU EKSTERNAL..... 28

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 31

2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA..... 31

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 35

2.3 PERJANJIAN KINERJA 36

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) 39

2.5 METODE PENGUKURAN..... 41

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 47

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 47

3.1.1 ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA..... 51

3.1.1.1 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo 51

3.1.1.2 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 2 Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan di wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo..... 83

3.1.1.3 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 3 Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo..... 86

3.1.1.3 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 4 Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu 101

3.1.1.3 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 5 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo 105

3.1.1.3 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 6 Terlaksananya Kegiatan Deteksi
Kejahatan dibidang Sediaan Farmasi dan Pangan olahan yang Efektif di Wilayah Kerja
Loka POM di Kabupaten Bungo 110

3.1.1.3 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 7 Layanan Publik Loka POM di
Kabupaten Bungo yang Prima 115

3.1.1.3 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 8 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah
Unit Organisasi yang Optimal 119

3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI 135

3.3 REALISASI ANGGARAN..... 155

BAB IV PENUTUP..... 175

1.1 KESIMPULAN 175

1.2 KENDALA 177

1.3 REKOMENDASI 177

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Strategis Triwulan II Tahun 2025	iii
Tabel 2. Data Pegawai Berdasarkan Status Jabatan dan Pendidikan	23
Tabel 3. Data Jumlah Pegawai ASN yang telah Menduduki Jabatan	23
Tabel 4. Luas wilayah masing-masing Kabupaten/Kota	25
Tabel 5. Jumlah kecamatan dan desa di masing-masing Kabupaten/Kota	25
Tabel 6. Jumlah penduduk wilayah Pengawasan Loka POM di Kabupaten Bungo (Sumber : Data BPS)	25
Tabel 7. Waktu tempuh yang diperlukan untuk mencapai wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo	25
Tabel 8. RKT Loka POM di Kabupaten Bungo	35
Tabel 9. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Bungo	37
Tabel 10. Tabel Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	40
Tabel 11. Capaian per Sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Bungo Triwulan II Tahun 2025	47
Tabel 12. Perbandingan Indikator Realisasi Triwulan I terhadap Target Triwulan II Tahun 2025	48
Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis Triwulan II Tahun 2025	52
Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis 2 Triwulan II Tahun 2025	84
Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis 3 Triwulan II Tahun 2025	87
Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis 4 Triwulan II Tahun 2025	101
Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis 6 Triwulan II Tahun 2025	110
Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis 7 Triwulan II Tahun 2025	115
Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis 8 Triwulan II Tahun 2025	119
Tabel 20. Rincian realisasi anggaran tiap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	157
Tabel 21. Nilai Indeks Efisiensi	162

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Bungo.....	22
Gambar 2. Luas wilayah kerja pengawasan Loka POM di Kabupaten Bungo.....	24
Gambar 3. Layanan Pengaduan Konsumen Loka POM di Kabupaten Bungo	26
Gambar 4. Indikator Kategori Capaian Kinerja.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Gambaran Umum Organisasi

1.3 Struktur Organisasi

1.4 Isu Strategis



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Mengawali fase baru pembangunan Nasional yang semakin dekat dengan Indonesia Emas 2045. Periode ini ditandai dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025 – 2045 untuk mewujudkan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam rpjmn 2025-2029 terkait kesehatan untuk semua. Menjamin akses kesehatan untuk semua dengan memperkuat sistem kesehatan nasional yang berfokus pada penguatan pelayanan kesehatan dasar dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas diseluruh wilayah serta kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. BPOM menghadapi penguatan kapasitas ketahanan kesehatan dalam penguatan pengawasan pangan dan sediaan farmasi. Terkait dengan hal tersebut, pangan dan sediaan farmasi merupakan komoditi yang penting keberadaannya pada struktur perekonomian nasional.

Loka POM di Kabupaten Bungo memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di wilayah pengawasan aman berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Loka POM di Kabupaten Bungo mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Hal ini merupakan tanggungjawab besar bagi Loka POM di Kabupaten Bungo dalam memastikan bahwa setiap produk yang beredar telah melalui evaluasi keamanan, mutu yang ketat. Selain bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang beredar dipasaran. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, Loka POM di Kabupaten Bungo bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa

masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan efektif.

Pencapaian kegiatan kinerja yang telah dilakukan dituangkan dalam bentuk laporan kinerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja berisi secara ringkas dan lengkap menjelaskan capaian kinerja terhadap pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan didalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja instansi termasuk aspek keuangan yang mana menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Bungo triwulan II tahun 2025 adalah sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Bungo, mengetahui tingkat efektivitas kinerja sesuai dengan Target Rencana Strategis Tahun 2025 dengan membandingkan capaian, target dan evaluasi.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan maka Badan POM menerbitkan Peraturan Badan POM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, ditetapkan Loka POM di Kabupaten Bungo sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM dengan wilayah kerja 4 Kabupaten Kota yaitu Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.

UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut. UPT Badan POM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana. program. dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;

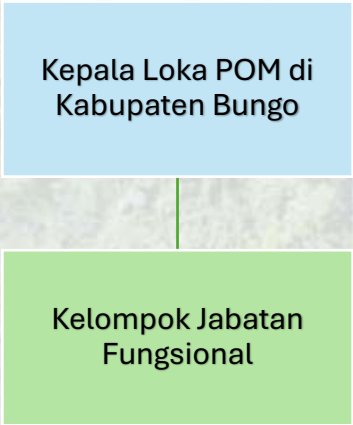
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal. intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi. informasi. edukasi. dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan POM pada tahun 2018 telah ditetapkan Loka POM di Kota Sungai Penuh sebagai salah satu UPT BPOM yang berfungsi melakukan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2023 melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan mengalami penambahan 2 (dua) wilayah kerja, yaitu Kabupaten Bungo dan kabupaten Merangin. Pada 23 April 2024 melalui surat dinas nomor PR.05.03.21.04.24.13 sehubungan dengan surat Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan nomor S-39/AG/AG.4/2024 tanggal 22 April 2024 hal Penyampaian Pemutakhiran Satker Loka POM di Kota Sungai Penuh menjadi

Loka POM di Kabupaten Bungo. Untuk melaksanakan fungsinya, kantor Loka POM di Kabupaten Bungo melakukan pengadaan sewa gedung yang digunakan sebagai Kantor Loka POM di Kabupaten Bungo yang terdiri dari 1 (satu) unit rumah yang berlokasi di Jl. Rang Kayo Hitam, Cadika, Kec. Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Bungo disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dijelaskan Loka POM terdiri atas Kepala dan Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Bungo

Di lingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Jumlah Kelompok

Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

Dalam mendukung tugas-tugas Loka POM di Kabupaten Bungo sesuai peran dan fungsinya, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan potensi yang sesuai. Pada tahun 2025 hingga Triwulan II pegawai Loka POM di Kabupaten Bungo yang berstatus ASN berjumlah 16 orang, CPNS 6 orang, 2 orang PPNNP (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) dan 5 orang tenaga outsourcing. Latar belakang pendidikan pegawai Loka POM di Kabupaten Bungo yang berstatus ASN terdiri dari apoteker sebanyak 4 orang, sarjana sebanyak 10 orang, dan diploma sebanyak 2 orang. Selain itu yang bertatus CPNS terdiri dari apoteker 1 orang, sarjana 3 orang, dan diploma 2 orang.

Tabel 2.Data Pegawai Berdasarkan Status Jabatan dan Pendidikan

No	Status Jabatan	Pendidikan				Jumlah
		Apoteker	S-1	D-III	SLTA/Sederajat	
1	PNS	4	9	2	0	15
2	PPPK	0	1	0	0	1
3	CPNS	1	3	2	0	6
3	PPNNP	0	2	0	0	2
4	Petugas Keamanan	0	0	0	3	3
5	Pengemudi	0	0	0	1	1
6	Cleaning Service	0	0	0	1	1
Total		5	15	4	5	29

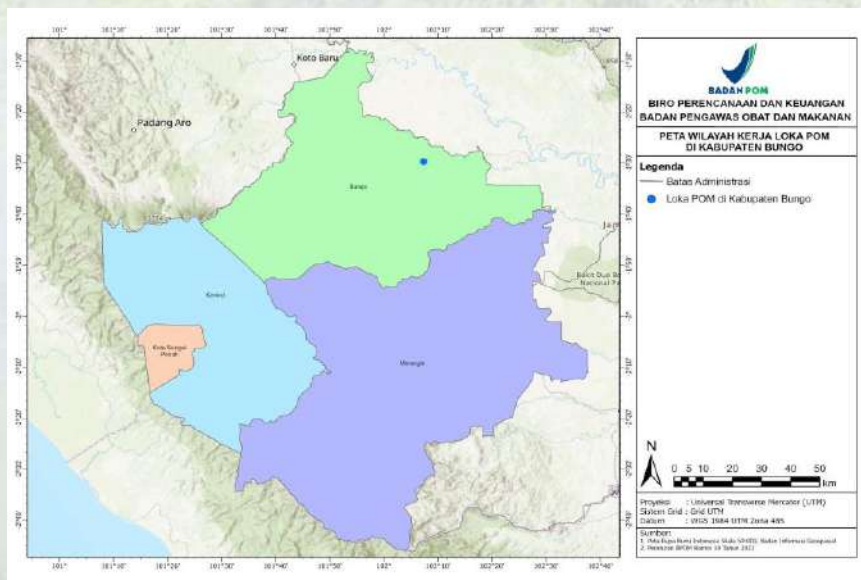
Pegawai ASN dan CPNS Loka POM di Kabupaten Bungo telah menduduki jabatan fungsional sesuai jenjang jabatan dan pendidikannya. Profil jabatan fungsional dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3. Data Jumlah Pegawai ASN dan CPNS yang telah Menduduki Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Loka	1
2	PFM Ahli Madya	0
3	PFM Ahli Muda	3

4	PFM Ahli Pertama	11
5	Bendahara	1
6	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	2
7	Perencana Ahli Pertama	1
8	Pranata Komputer	1
9	Penata Laksana Barang Terampil	1
10	Pranata APBN	1
11	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	1
Total		23

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo terdiri dari Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin. Luas Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo secara keseluruhan adalah 16.527,50 km².



Gambar 2. Luas wilayah kerja pengawasan Loka POM di Kabupaten Bungo

Luas wilayah kerja pengawasan Loka POM di Kabupaten Bungo secara keseluruhan adalah 16.527,50 km².

Tabel 4. Luas wilayah masing-masing Kabupaten/Kota

No	Area	Luas(km ²)
1	Kota Sungai Penuh	391,50
2	Kabupaten Kerinci	3.808,00
3	Kabupaten Bungo	4.659,00
4	Kabupaten Merangin	7.669,00
Total		16.527,50

Jumlah kecamatan di wilayah kerja pengawasan Loka POM di Kabupaten Bungo secara keseluruhan adalah 65 kecamatan dan 702 Desa.

Tabel 5. Jumlah kecamatan dan desa di masing-masing Kabupaten/Kota

No	Area	Kecamatan	Desa
1	Kota Sungai Penuh	8	69
2	Kabupaten Kerinci	16	287
3	Kabupaten Bungo	17	141
4	Kabupaten Merangin	24	205
Total		65	702

Tabel 6. Jumlah penduduk wilayah Pengawasan Loka POM di Kabupaten Bungo (Sumber : Data BPS)

No	Area	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)
1	Kota Sungai Penuh	99,2
2	Kabupaten Kerinci	253,9
3	Kabupaten Bungo	373,3
4	Kabupaten Merangin	357,6
Total		1.084

Tabel 7. Waktu tempuh yang diperlukan untuk mencapai wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo

No	Area	Waktu Tempuh (Jam)
1	Kota Sungai Penuh	6 - 8
2	Kabupaten Kerinci	6 - 8

3	Kabupaten Bungo	1 - 3
4	Kabupaten Merangin	1– 5

Untuk meningkatkan kenyamanan konsumen atau masyarakat yang berkunjung ke Kantor Loka POM di Kabupaten Bungo telah disediakan fasilitas berupa ruang Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK). Fasilitas penunjang transportasi yakni satu unit mobil laboratorium keliling untuk kegiatan pengujian sederhana sampel pangan dan PJAS di kantin sekolah, pasar dan pangan berbuka puasa. Loka POM di Kabupaten Bungo sebagai Unit Layanan Pengaduan Konsumen Masyarakat berkomitmen dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik guna mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang professional, transparan, obyektif, efektif, efisien, dan akuntabel kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Sesuai dengan instruksi Kepala Badan POM yang di atur pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk konsultasi, saran dan keluhan terhadap Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan di UPT Loka POM Bungo maka dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



Gambar 3. Layanan Pengaduan Konsumen Loka POM di Kabupaten Bungo

1.4 ISU STRATEGIS

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Sesuai dengan Visi Badan POM untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Badan POM melakukan pengawasan secara *full spectrum* yang dimulai dari *pre-market* hingga *post-market control*, pemberdayaan masyarakat dan upaya penegakan hukum. Melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan POM bekerjasama dengan lintas sektor terutama Pemerintah Daerah untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan.

1.4.1 ISU INTERNAL

a) Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Sebagaimana tertuang pada PP Nomor 80 Tahun 2017 perihal tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Untuk menghindari tumpang tindih kewenangan/kebijakan, maka daripada itu BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur pengawasan Obat dan Makanan secara menyeluruh.

b) Sumber Daya Manusia

SDM pegawai Loka POM di Kabupaten Bungo merupakan pegawai yang mengemban tugas tidak hanya sesuai keahliannya tetapi juga tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh jabatan tertentu, seperti pengelola kearsipan, sehingga membutuhkan SDM yang baru (Redistribusi dan Penerimaan Pegawai Baru dengan jenjang keahlian), hal ini terkait efektivitas kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan dan pengelolaan kearsipan. Oleh karena itu diperlukan penambahan SDM jabatan arsiparis sehingga pengelolaan arsip dan nilai kearsipan Loka POM di Kabupaten Bungo lebih baik lagi.

c) Pengembangan Kompetensi

Sumber Daya Manusia (SDM) Loka POM di Kabupaten Bungo banyak yang memiliki tugas pokok dan fungsi merangkap jabatan, sehingga pengembangan kompetensi menjadi sangat penting. Tidak adanya kompetensi yang memadai, pekerjaan yang dilakukan akan tidak efektif. Oleh

karena itu, perlu adanya upaya serius untuk meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan, workshop, atau program pengembangan keterampilan agar dapat menjalankan tugas ganda dengan lebih efisien dan professional. Selain itu kompetensi masing-masing pegawai dalam optimalnya pengawasan obat dan makanan perlu kompetensi yang merata dari masing-masing pegawai PFM.

d) Peningkatan Klasifikasi UPT

Untuk meningkatkan citra dan pandangan lintas sektor dan pemerintah daerah setempat terhadap UPT, peningkatan Klasifikasi UPT Loka POM di Kabupaten Bungo menjadi Balai POM sangat diharapkan. Adanya tantangan dari upaya strategis yang melibatkan pemangku kepentingan untuk terlibat dalam Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan.

e) Kapasitas Pengujian Loka

Loka POM di Kabupaten Bungo saat ini melakukan pengujian komoditas pangan menggunakan metode uji cepat pangan (rapid test kit) untuk parameter-parameter uji kritis yang telah ditetapkan. Sementara itu, untuk sampel obat pengujian rutin telah dapat dilakukan dengan menggunakan rapid test obat telah dilaksanakan mulai akhir tahun 2024. Namun, untuk sampel obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik, pengujian dilakukan di Balai Regionalisasi. Dalam rentang waktu tahun 2025-2029, Loka POM di Kabupaten Bungo telah mulai melakukan pengujian secara mandiri, meskipun masih terbatas pada beberapa parameter tertentu, diharapkan kapasitas pengujian di Loka POM semakin meningkat sehingga dapat melakukan pengujian secara mandiri untuk lebih banyak parameter.

1.4.2 ISU EKSTERNAL

a) Pengawasan Obat dan Makanan

Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam

yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar negara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Loka POM. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi Loka POM Kabupaten Bungo dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.

b) Kejahatan Obat dan Makanan

Masih terdapat pedagang yang menjual obat dengan bebas (Obat bebas terbatas dan obat keras), sehingga masyarakat masyarakat memperoleh obat bukan dari sarana yang legal. Konsumen tidak mendapatkan produk obat yang aman dan bermutu yang beresiko bagi kesehatan konsumen. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) di Loka POM di Kabupaten Bungo dan meningkatkan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, banyaknya produk obat dan pangan ilegal termasuk produk pangan olahan UMKM yang belum memiliki izin (P-IRT) sehingga menjadi tantangan bagi Loka POM dalam peningkatan frekuensi dan luas jangkauan pengawasan.

c) Sinergitas Kelembagaan dengan Pemangku Kepentingan

Perlu mengoptimalkan sinergitas antara lintas sektor dan Loka POM di Kabupaten Bungo, sehingga diperlukan program untuk peningkatan koordinasi lintas sektor dalam hal ini melalui pertemuan jejaring Tim Koordinasi Pengawas Obat dan Makanan wilayah Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Bungo.

d) Lokus Pengawasan Loka POM di Kabupaten Bungo

Wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Bungo yaitu Kota Sungai Penuh, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Bungo. Beberapa kecamatan di Kabupaten Bungo dan kabupaten Merangin merupakan wilayah dengan jarak tempuh jauh dengan kondisi jalan yang rusak sehingga sulit untuk dilewati. Selain itu sarana dan prasarana di daerah tersebut belum memadai.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis
- 2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- 2.3 Perjanjian Kinerja
- 2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)
- 2.5 Metode Pengukuran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA

Pembangunan Nasional untuk tahun 2025-2029 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 - 2029. Renstra BPOM 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan amanah Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Renstra Loka POM di Kabupaten Bungo 2025-2029 disusun megacu pada Renstra BPOM 2025-2029, perubahan ruang lingkup sasaran strategis pengawasan Obat dan Makanan menuntun BPOM untuk melakukan perubahan peningkatan kinerja yang optimal. Untuk memenuhi hal tersebut Loka POM di Kabupaten Bungo telah menetapkan Rencana Strategis untuk dapat mewujudkan pengawasan Obat dan Makanan yang optimal. Renstra Loka POM di Kabupaten Bungo 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi yang dijadikan sebagai pedoman kinerja Loka POM di Kabupaten Bungo.

Pertimbangan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Loka POM di Kabupaten Bungo sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Badan Obat dan Makanan (BPOM) sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan

merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

Rencana Strategis (Renstra) 2025 - 2029 Loka POM di Kabupaten Bungo telah disusun dalam bentuk draft rencana strategis pada tahun 2025 dengan mengacu pada hasil revidi Renstra BPOM. Sasaran strategis ini disusun sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2025-2029, maka Badan POM telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI BADAN POM

Loka POM di Kabupaten Bungo merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI yang memiliki visi serupa dengan BPOM yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi Kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu:

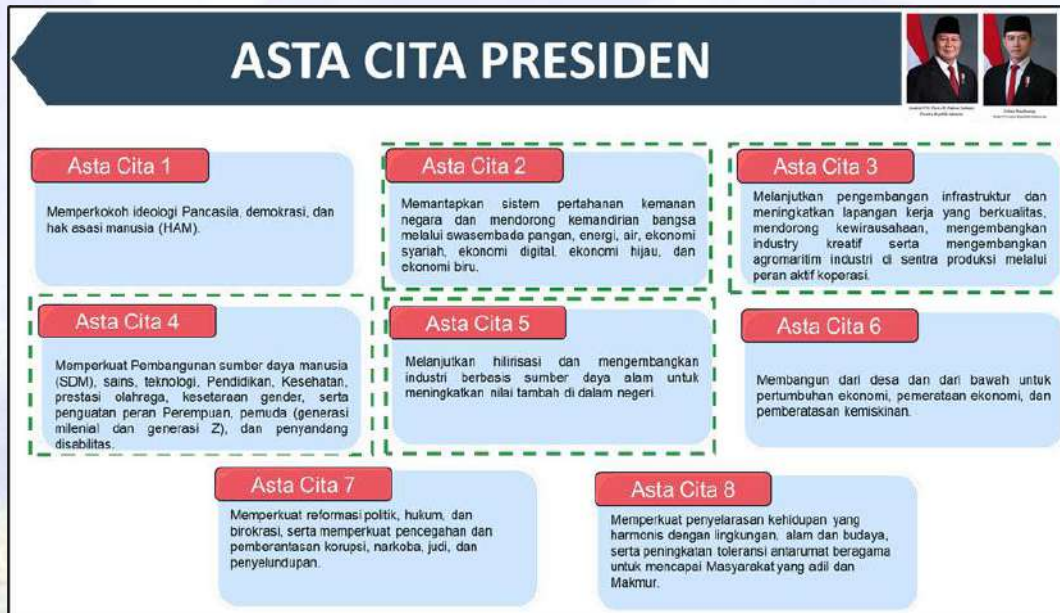
“Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029

”Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas”

MISI BADAN POM :

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi strategis yang menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 2 Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3 dan 5 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas. Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025 - 2029 adalah:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu
2. Terwujudnya masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM
4. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
5. Terwujudnya organisasi yang profesional, adaptif, efektif dan efisien serta layanan publik yang prima.

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kabupaten Bungo dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Bungo. Sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Bungo sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
2. Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu
4. Meningkatnya efektifitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
5. Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
6. Layanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
7. Terwujudnya organisasi dan tatakelola BPOM yang berintegritas dan adaptif

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Dalam rangka penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo pada tahun 2025, serta Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Bungo Tahun 2025 – 2029 maka Kepala Loka POM di Kabupaten Bungo menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 8. RKT Loka POM di Kabupaten Bungo

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78,5
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	70
		Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75
		Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83,19
2	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,5
3	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat Efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	86,83

		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2
		Jumlah desa pangan aman	1
		umlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	85,5
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	93
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,4
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	50
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	50
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,55
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi kepada pimpinan UPT untuk melaksanakan program maupun kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja sebagai perwujudan komitmen antara Kepala Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Kepala Badan POM. DIPA Tahun 2024 dijadikan sebagai dasar penyusunan perjanjian kinerja pada Tahun 2025. dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Berikut merupakan perjanjian kerja yang memuat sasaran strategis, indikator kegiatan, serta target pencapaian kinerja Loka POM di Kabupaten Bungo Tahun 2025 :

Tabel 9. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Bungo

	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 LOKA POM DI KABUPATEN BUNGO BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	: PERNANDA SAPRYANOKI
Jabatan	: Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo
Selanjutnya disebut Pihak Pertama	
Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua	
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.	
Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.	
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Kabupaten Bungo, 12 Februari 2025	
Pihak Pertama Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo	Pihak Kedua Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
 PERNANDA SAPRYANOKI	 TARUNA IKRAR

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN BUNGO**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78,5 Persen
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persen
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persen
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persen
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72 Persen
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	70 Persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,75 Persen
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persen
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83,19 Persen
2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,5 Persen
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,83 Persen
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1 Sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	1 Desa
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPDB pangan olahan	85,5 Persen
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	93 Persen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persen
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.4 Indeks
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	78.39 Persen
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 predikat
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.55 Persen
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100 persen

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 3.572,436,000 (Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1.410.506.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2.161.930.000

Kabupaten Bungo, 12 Februari 2025

Pihak Pertama

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo



PERNANDA SAPRYANOKI

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI



TARUNA IKRAR

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) merupakan tindak lanjut dari perjanjian kinerja yang telah disepakati untuk pelaksanaan kinerja dari masing-masing indikator. Berikut tabel mengenai RAPK Loka POM di Kabupaten Bungo.

Tabel 10. Tabel Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 LOKA POM DI KABUPATEN BUNGO BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN															
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	81.008.500
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	81.008.500
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	28.258.250
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	58.518.500
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	35.295.600
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	35.295.600
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	35.295.600
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	35.295.600
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.19	83.19	83.19	83.19	83.19	83.19	83.19	83.19	83.19	83.19	83.19	83.19	35.295.600
2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	0	0	10	0	0	10.5		0	11	0		11.5	28.259.250
3.	04 - Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	0	0	86.83	0	0	86.83	0	0	86.83	0	0	86.83	92.941.000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8.875.000
		03 - Jumlah desa pangan aman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8.875.000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7.100.000
4.	05 - Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	372.105.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	80.651.500
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	80.651.500
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,4	306.000.000
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,39	864.772.000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM (Satker)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,02	648.579.000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,55	648.579.000
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT (Loka)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	1.775.000
Total															3.572.436.000

Kabupaten Bungo, 12 February 2025
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo



BADAN POM
DI KABUPATEN BUNGO
HERNANDA SAPRYANOKI

2.5 METODE PENGUKURAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan disebutkan bahwa setiap unit pelaksana teknis melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor: PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan menggunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Apabila dalam suatu periode pelaporan, terdapat Sasaran Strategis yang tidak memiliki nilai (n/a), maka Sasaran Strategis tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan. Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja. Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%.

Kategori Capaian Indikator Kinerja

Adapun metode pengukuran terhadap penilaian capaian indikator kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Tingkat keberhasilan capaian kinerja sebuah unit kerja dihitung dengan Nilai Kinerja Organisasi. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari:

- NKO Periodik

NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai.

- NKO tahunan

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi)

predikat kinerja tahunan pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:

1) Capaian Perjanjian Kinerja

Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah. Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah.

Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 predikat, yaitu:

- 1) Sangat Kurang;
- 2) Kurang
- 3) Butuh Perbaikan
- 4) Baik
- 5) Istimewa

Notifikasi Warna	Capaian	Kategori
	>100	Istimewa
	$80 < NKO \leq 100$	Baik
	$60 < NKO < 80$	Butuh Perbaikan
	$20 < NKO < 60$	Kurang
	$0 \leq NKO < 20$	Sangat Kurang

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Adapun metode pengukuran terhadap analisis akuntabilitas kinerja yaitu dengan membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut :

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% - <100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $<70\%$ ($x < 70$).	

Gambar 4. Indikator Kategori Capaian Kinerja

Analisis Efisiensi Kegiatan

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan anggaran (input) yang lebih sedikit dalam menghasilkan capaian kinerja (output) yang sama atau lebih besar, atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama atau lebih besar; atau persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari pada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi persentase capaian output terhadap persentase capaian input, sesuai rumus:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian input}} \quad IE = \frac{100 \%}{100\%} = 1$$

Sedangkan untuk mengetahui Standar Efisiensi (SE) yang dapat digunakan sebagai angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi, dapat diperoleh dengan membandingkan persentase rencana capaian output terhadap persentase rencana capaian input dengan nilai SE = 1 yang diperoleh dengan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana capaian output}}{\% \text{ Rencana capaian input}} \times 100 \% = \frac{100}{100} \times 100\% = 1$$

Untuk mengetahui efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE), mengikuti formula logika:

Jika $IE \geq SE$: kegiatan efisien
Apabila $IE < SE$: kegiatan tidak efisien

Selanjutnya masing-masing kegiatan diukur Tingkat Efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan *range* sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi
Hasil Evaluasi

3.3 Realisasi Anggaran



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Organisasi menyajikan hasil pengukuran kinerja terhadap masing-masing perjanjian kinerja sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Bungo. Hal ini bertujuan untuk dapat menggambarkan tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja Triwulan II tahun 2025 terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja tahun 2025, capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2025, membandingkan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan triwulan I tahun 2025 membandingkan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target tahun 2025, melakukan analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan kinerja, melakukan analisis program yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja pernyataan kinerja, tindak lanjut hasil evaluasi dan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Tabel 11. Capaian per Sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Bungo Triwulan II Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Capaian TW II 2025 (%)	Normalisasi (%)	Kategori
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	120,43	109,33	Sangat Baik 
2	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	108,29	108,29	Sangat Baik 
3	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	91,92	91,92	Cukup 
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	110	110	Sangat Baik 
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	107,53	107,53	Sangat Baik 
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	101,84	101,84	Sangat Baik 

7	Layanan Publik UPT yang prima	N/A	N/A	N/A	
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	100	100	Baik	
Total Capaian		740,01	728,91		
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)		105,72	104,13		
Predikat NKO		Istimewa	Istimewa		

Loka POM di Kabupaten Bungo memiliki 8 Sasaran Strategis yang diukur capaiannya dengan hasil yaitu 1 Sasaran Strategis perhitungan dilakukan di akhir tahun 2025, 5 Sasaran Strategis termasuk kategori SANGAT BAIK, 1 Sasaran Strategis kategori BAIK, 1 Sasaran Strategis kategori CUKUP. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui nilai NKO Loka POM di kabupaten Bungo, diperoleh nilai NKO sebesar 104,23% dengan kategori ISTIMEWA. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah ditetapkan 8 sasaran strategis dan 22 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut

Tabel 12. Perbandingan Indikator Realisasi Triwulan II terhadap Target Triwulan II Tahun 2025

			Realisasi				Kategori Terhadap Target		
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW II 2025	Realisasi	%Capaian TW II 2025	%Capaian 2025	TW II 2025	Tahun 2025	
					Normalisasi	Normalisasi			
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78,5	78,5	99,90	127,25	127,25	Sangat Baik	Tercapai
						110	110		
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	86,36	115,15	115,15	Sangat Baik	Tercapai
						110	110		
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji ssesuai standar oleh UPT	100	100	0	0	0	Tidak ada kasus, Tidak masuk dalam perhitungan NKO	
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	92,5	123,33	123,33	Sangat Baik	Tercapai
						110	110		
		Persentase keputusan/rekome ndasi hasil pengawasan sediaan farmasi	72	25	26,14	104,56	36,31	Sangat Baik	Perlu Upaya Keras
									

		dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder								
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	70	70	96,7	138,10	138,10	Sangat Baik	Tercapai	
					110	110				
		Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75	86,75	100	115,27	115,27	Sangat Baik	Tercapai	
					110	110				
		Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	97,5	121,88	121,88	Sangat Baik	Tercapai	
					110	110				
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83,19	83,19	97,91	117,7	117,7	Sangat Baik	Tercapai	
					110	110				
							Sangat Baik	Tercapai		
		NILAI CAPAIAN SASARAN				120,43	111,87			
						109,33	100,78			
2	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,5	10,5	11,37	108,29	98,87	Sangat Baik	Akan Tercapai	
										
					108,29	98,87	Sangat Baik	Akan Tercapai		
		NILAI CAPAIAN SASARAN								
3	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat Efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	86,83	86,83	87,72	101,02	101,02	Sangat Baik	Tercapai	
										
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	75	75	100	0,00	Baik	Perlu Upaya Keras	
										
		Jumlah desa pangan aman	1	50	50	100	0,00	Baik	Perlu Upaya Keras	
										

			1	75	50	66,67	0,00	Kurang	Perlu Upaya Keras
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas							
								Cukup	Perlu Upaya Keras
		NILAI CAPAIAN SASARAN				91,92	25,26		
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	85,5	50	55	110	64,33	Sangat Baik	Perlu Upaya Keras
									
						110	64,33	Sangat Baik	Perlu Upaya Keras
		NILAI CAPAIAN SASARAN							
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	93	93	100	107,53	107,53	Sangat Baik	Tercapai
									
						107,53	107,53	Sangat Baik	Tercapai
		NILAI CAPAIAN SASARAN							
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	45	45,83	101,84	50,92	Sangat Baik	Perlu Upaya Keras
									
						101,84	50,92	Sangat Baik	Perlu Upaya Keras
		NILAI CAPAIAN SASARAN							
7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,4	0	0	0,00	0	Perhitungan di akhir tahun	Perhitun gan di akhir tahun
						0,00	0	Perhitungan di akhir tahun	Perhitun gan di akhir tahun
		NILAI CAPAIAN SASARAN							
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah	Nilai AKIP UPT BPOM	78,39	0	0	0,00	0	Perhitungan di akhir tahun	Perhitun gan di

Unit Organisasi yang optimal							akhir tahun
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	0	0	0,00	0	Perhitungan di akhir tahun	Perhitungan di akhir tahun
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,55	0	0	0,00	0	Perhitungan di akhir tahun	Perhitungan di akhir tahun
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	40	40	100,00	40	Baik 	Perlu Upaya Keras 
				100,00	40	Baik 	Perlu Upaya Keras 
NILAI CAPAIAN SASARAN							

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Bungo dengan 13 indikator kinerja kriteria SANGAT BAIK, 3 indikator kinerja kriteria BAIK, 1 indikator kinerja kriteria KURANG, 1 indikator kinerja tidak terdapat kasus sehingga tidak masuk dalam perhitungan dan 4 indikator kinerja yang diukur pada akhir tahun 2025 maka dikecualikan sebagai perhitungan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

3.1.1 ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing – masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Kabupaten Bungo, sebagai berikut:

3.1.1.1 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo

Capaian ini didukung dari 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari capaian pada Sasaran Strategis (SS) 1 terhadap target Triwulan II 2025 diperoleh hasil rata-rata 109,33 dengan kriteria **“Sangat Baik, Tercapai/Melampaui”** Hasil tersebut disajikan pada table berikut ini :

Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi				Kategori Terhadap Target	
				Target TW II 2025	Realisasi	%Capaian TW II 2025	%Capaian 2025	TW II 2025	Tahun 2025
						Normalisasi	Normalisasi		
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78,5	78,5	99,90	127,25	127,25	Sangat Baik	Tercapai
						110	110		
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	86,36	115,15	115,15	Sangat Baik	Tercapai
						110	110		
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji ssesuai standar oleh UPT	100	100	0	0	0	Tidak ada kasus, Tidak masuk dalam perhitungan NKO	
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	92,5	123,33	123,33	Sangat Baik	Tercapai
						110	110		
		Persentase keputusan/rekome ndasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72	25	26,14	104,56	36,31	Sangat Baik	Perlu Upaya Keras
									
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	70	70	96,7	138,10	138,10	Sangat Baik	Tercapai
						110	110		
		Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75	86,75	100	115,27	115,27	Sangat Baik	Tercapai
						110	110		
		Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	97,5	121,88	121,88	Sangat Baik	Tercapai
						110	110		
		Persesntase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83,19	83,19	97,91	117,7	117,7	Sangat Baik	Tercapai
						110	110		
							Sangat Baik	Tercapai	
NILAI CAPAIAN SASARAN						120,43	111,87		
						109,33	100,78		

IKU 1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	78,5	99,90	127,25	Sangat Baik

Nilai realisasi presentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW II adalah 99,90% dengan capaian kinerja terhadap target 2025 sebesar 127,25% namun di normalisasi menjadi 110% sehingga dikategorikan dengan kriteria capaian **"Sangat Baik"**.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I	Realisasi TW II
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	99,33	99,90

Nilai realisasi presentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW II meningkat dari 99,33 pada TW I menjadi 99,90 pada TW II. Ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan masih sesuai dengan perhitungan dan adanya relaksasi anggaran yang membuat target sampling kembali ke target awal dan realisasinya dimulai pada bulan Mei 2025.

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	78,5	99,33	127,25	Tercapai / Melampaui 

Realisasi presentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW II memiliki capaian 127,25% namun di normalisasi menjadi 110% dengan kategori capaian **"Sangat Baik"**

Sampling sediaan farmasi dilakukan terhadap Obat, Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang dilaksanakan sesuai Pedoman Sampling tahun 2025. Adapun cara perhitungan resentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebagai berikut :

- a) % Obat = $A+B+C+D+E$
- A = $30\% \times (\text{Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$
- B = $20\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$
- C = $20\% \times (\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan} / \text{total sampel yang diuji} \times 100\%)$
- D = $20\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$
- E = $10\% \times (\text{Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan} / \text{target jumlah laporan Monitoring penarikan} \times 100\%)$
- b) %OBAOK = $(A+B+C+D+E) / 5$
- A = $(a1 + a2) / 2$
- a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)/

	target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%
	a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%
B	= (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/ disampling dan diuji) x 100%
C	= (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%
D	= (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel diperiksa dan diuji) x 100%
E	= (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) x 100%
c) % SK	= (A+B+C+D+E) /5
A	= (a1 + a2) /2
	a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%
	a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%
B	= (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/ disampling dan diuji) x 100%
C	= (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%
D	= (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

$$\begin{aligned}
 E &= (\text{Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT} / \text{Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik}) \times 100\% \\
 \text{d) \% Kosmetik} &= (A+B+C+D+E) / 5 \\
 A &= (a1 + a2) / 2 \\
 a1 &= (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel) / target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\% \\
 a2 &= (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\% \\
 B &= (\text{Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%) \\
 C &= (\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan}) \times 100\% \\
 D &= (\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai} / \text{Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan}) \times 100\% \\
 E &= (\text{Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT} / \text{Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik}) \times 100\%
 \end{aligned}$$

% Sampel Sediaan Farmasi = %Obat + % OBAOK + %SK + % Kosmetik / 4

Realisasi hingga TW II untuk sampel obat yang telah disampling sebanyak 24 sampel, untuk obat tradisional telah disampling 11 sampel, suplemen kesehatan telah disampling 3 sampel dan kosmetik telah disampling 33 sampel. Sehingga total sampel yang telah disampling sebanyak 71 sampel. Pada TW II ini telah dilakukan relaksasi anggaran yang mana sampling dengan target setelah relaksasi anggaran dimulai pada bulan Mei 2025.

Sehingga hingga TW II sampel yang telah di sampling sebanyak 71 sampel sediaan farmasi.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Nilai realisasi presentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2025 adalah 99,90% dengan capaian kinerja terhadap tahun target 2025 adalah 127,25% yang dikategorikan dalam kriteria capaian **"Tidak Dapat Disimpulkan"**. Hal ini disebabkan karena semua sampel yang disampling hingga triwulan II telah dilaksanakan sesuai ketentuan meskipun ada 1 sampel obat yang melewati *timeline* pengujian tetapi capaian masih sesuai.

Pelaksanaan sampling tahun 2025 dilaksanakan secara regionalisasi. Loka POM di Kabupaten Bungo masuk pada region 2 yaitu BBPOM Pekanbaru sebagai Balai Koordinator. Region Pekanbaru terdiri dari Jambi, Lampung, Palembang, Pekanbaru dan Pangkal Pinang. Untuk komoditi sediaan farmasi semua sampel dilaksanakan secara regional, sedangkan produk obat bahan alam, suplemen kesehatan, kuasi dan kosmetik sebagian regional dan sebagian non regional (pengujian dilakukan ke Balai POM di Jambi). Pada tahun 2025 juga Loka POM di Kabupaten Bungo juga melaksanakan pengujian sampel Obat secara *Rapid Test*. Dalam pelaksanaan teknisnya, regionalisasi pengujian yang sebelumnya dalam tahap penyesuaian sekarang sudah dalam tahap ke yang lebih baik dan terorganisir ditambah untuk sampel obat telah dapat diuji secara *rapid test* untuk sebagian obatnya. Adanya relaksasi anggaran pada TW II membuat target kembali ke target awal.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan atau Kegagalan pencapaian kinerja dapat ditentukan oleh hal berikut :

1. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan

- diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.
- 2. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.
 - 3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.
 - 4. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

IKU 2. Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	86,36	115,15	Sangat Baik

Nilai realisasi persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 86,36% dengan capaian kinerja terhadap target triwulan II sebesar 115,15% di normalisasi menjadi 110% sehingga dikategorikan dalam kriteria capaian “Sangat Baik” Hal ini menandakan produk yang tersampling pada triwulan itu sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I	Realisasi TW II
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	86,36

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I sebesar 100% sedangkan di triwulan II sebesar 86,36%. Penurunan realisasi ini dikarenakan pada triwulan I perhitungan A2 dimasukkan kedalam perhitungan sedangkan setelah dilakukan Desk pengisian capaian di Triwulan II perhitungan A2 tidak dimasukkan dikarenakan Loka POM di kabupaten Bungo tidak melakukan pengujian secara mandiri namun pengujian dilakukan seluruhnya di Balai Penguji. Sehingga dengan realisasi 86,36% pada triwulan II capaian indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 115,15%.

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	86,36	115,15	Tercapai / Melampaui 

Nilai realisasi persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 adalah 86,36 % dengan capaian kinerja terhadap target tahun 2025 sebesar 115,15% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian "Tercapai/Melampaui". Penilaian ini berdasarkan jumlah sampel yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan,

dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:

1. kesesuaian target sampel UPT;
2. kesesuaian parameter uji;
3. ketepatan pengambilan kesimpulan;
4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain :

1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian
2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS
5. Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Nilai realisasi persentase persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 adalah 86,36% dengan

capaian kinerja terhadap target tahun 2025 sebesar 115,15% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Sangat Baik”.

Penilaian ini berdasarkan jumlah sampel pangan olahan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Tercapainya realisasi persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan kategori Tidak Dapat disimpulkan menandakan bahwa dari sebagian besar sampel pangan olahan yang disampling di triwulan II telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan sesuai definisi operatif. Sehingga melampaui dari target yang telah ditetapkan yang menyebabkan nilai menjadi Tidak Dapat Disimpulkan. Pengujian sampel makanan juga dilaksanakan secara Regionalisasi Laboratorium, oleh karena itu petugas dan tim di Loka POM di Kabupaten Bungo bertekad untuk melaksanakan kegiatan dengan sebaik mungkin.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diukur dari kesesuaian target sampel yang disampling, kesesuaian parameter uji, ketepatan pengambilan kesimpulan, ketepatan waktu pengambilan sampel, ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujian serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ ketentuan lainnya. Keberhasilan persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak terlepas dari perencanaan pelaksanaan pengambilan sampel yang dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian tahun 2025.

IKU 3. Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji sesuai Standar oleh UPT

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut

diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM.

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0	0	Kurang

Indikator Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT hingga Triwulan II Tahun 2025 belum memiliki capaian kinerja dikarenakan tidak terdapat sampel kasus KLB dan penilaian untuk indikator ini dikecualikan dalam pengukuran NKO apabila tidak terdapat kasus KLB KP. Capaian ini dapat direalisasikan jika terdapat sampel KLB yang dilakukan sampling dan pengujian.

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I	Realisasi TW II
Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	0	0

Pada triwulan I dan triwulan II memiliki realisasi yang sama yaitu 0 maka tidak dapat dilakukan perbandingan dikarenakan belum terdapat kasus KLB KP pada wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	0	Perlu Upaya Keras

Indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT pada Tahun 2025 memiliki target 100%, akan tetapi pada Triwulan II tahun 2025 belum terdapat realisasi sehingga capaian terhadap target akhir tahun diprediksikan perlu upaya keras untuk memenuhi target.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT belum terdapat realisasi hingga Triwulan II Tahun 2025. Hal ini dikarenakan tidak adanya sampel KLB di Triwulan II. Adapun upaya yang akan dilakukan terkait hal ini yaitu aktif melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan setempat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo sehingga dapat melaksanakan sampling dan pengujian sampel KLB jika terdapat sampel KLB.

d. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Loka POM di Kabupaten Bungo hingga triwulan I 2025 belum terdapat realisasi untuk indicator kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT, dikarenakan tidak adanya sampel KLB di triwulan I, akan dilakukan pengujain sampel KLB jika terdapat sampel KLB.

IKU 4. Persentase Sampel PIRT Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	92,5	123,33	Sangat Baik



Nilai realisasi persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 92,5% dengan capaian kinerja terhadap target triwulan II sebesar 123,33% di normalisasi menjadi 110% sehingga dikategorikan dalam kriteria capaian “Sangat Baik”. Hal ini menandakan produk yang tersampling pada triwulan itu sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I	Realisasi TW II
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	92,5

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I sebesar 100% sedangkan di triwulan II sebesar 92,5%. Penurunan realisasi ini dikarenakan pada triwulan I perhitungan A2 dimasukkan kedalam perhitungan sedangkan setelah dilakukan Desk pengisian capaian di Triwulan II perhitungan A2 tidak dimasukkan dikarenakan Loka POM di kabupaten Bungo tidak melakukan pengujian secara mandiri namun pengujian dilakukan seluruhnya di Balai Penguji. Sehingga dengan realisasi 92,5% pada triwulan II capaian indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 123,33%.

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja			Target Tahun 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Persentase berisiko sesuai ketentuan	sampel yang ditindaklanjuti	PIRT	75	92,5	123,33	Tercapai / Melampaui 

Nilai realisasi persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 adalah 92,5% dengan capaian kinerja terhadap target tahun 2025 sebesar 123,33% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Tercapai/Melampaui”. Penilaian ini berdasarkan jumlah sampel PIRT yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.

Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan). Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah. Realisasi sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2025 sebanyak 4 sampel.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Nilai realisasi persentase persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 adalah 92,5% dengan capaian kinerja terhadap target tahun 2025 sebesar 123,33% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Tidak Dapat Disimpulkan”.

Penilaian ini berdasarkan jumlah sampel PIRT yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Tercapainya realisasi persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan kategori Tidak Dapat disimpulkan menandakan bahwa dari sampel PIRT yang disampling di triwulan II sebagian besar telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan sesuai definisi operatif. Sehingga melampaui target yang telah ditetapkan yang menyebabkan nilai menjadi Tidak Dapat Disimpulkan. Pengujian sampel makanan juga dilaksanakan secara Regionalisasi Laboratorium, oleh karena itu petugas dan tim di Loka POM di Kabupaten Bungo bertekad untuk melaksanakan kegiatan dengan sebaik mungkin.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diukur dari kesesuaian target sampel yang disampling, kesesuaian parameter uji, ketepatan pengambilan kesimpulan, ketepatan waktu pengambilan sampel, ketepatan waktu pelaporan dan tindak lanjut sampel PIRT. Keberhasilan persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak terlepas dari perencanaan pelaksanaan pengambilan sampel yang dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian tahun 2025.

IKU 5. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Ketegori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	25	26,14	104,56	Sangat Baik

Nilai realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sebesar 26,14 dengan capaian terhadap target triwulan II 2025 sebesar 104,56%, sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “**Sangat Baik**”.

Nilai persentase Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dihitung berdasarkan :

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan : % =
$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100 \%$$
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor : % =
$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \times 100 \%$$

Hingga akhir TW II 2025, Loka POM di Kabupaten Bungo telah melaksanakan/ menerima tindak lanjut dari pemangku kepentingan sebanyak 5 keputusan/ rekomendasi dari 21 keputusan/ rekomendasi yang diterbitkan. Sedangkan untuk tindak lanjut dari lintas sektor belum diterima hingga akhir TW I. Dengan demikian, capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan **sudah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 104,56 % dengan kategori “**Sangat Baik**”.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I	Realisasi TW II
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	30	26,14

Pada TW I tahun 2025 nilai realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan adalah 30 dan didapati persen capaian TW I sebesar 100% dengan kategori **“Baik”**. Pada TW II ini setelah melakukan penyusunan ulang terkait dengan target realisasi kinerja capaian didapati persen realisasi dengan target sebesar 25 dan didapati persen realisasi TW II sebesar 104,56% dengan kategori **“Sangat Baik”**

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72	25	36,31	Perlu Upaya Keras 

Pada TW II tahun 2025 nilai realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan adalah 25 dengan persentase capaian dan kriteria terhadap target tahun 2025 sebesar 72% dengan kategori **“Perlu Upaya Keras”**. Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder bersifat akumulatif, artinya target setiap bulan akan mengalami kenaikan setiap

bulannya. Dari TW 1 hingga akhir TW 2 ini sudah didapati Persen capaian sebesar 36,31%

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Keberhasilan capaian pada TW II ini di karenakan :

- a. Kontrol tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi dalam spreadsheet Hasil Pemeriksaan Loka POM di Kabupaten Bungo Tahun 2025 yang dikelola oleh Tim Pemeriksaan
- b. Percepatan tindak lanjut terhadap rekomendasi dengan pembinaan ditempat pada saat pemeriksaan sarana dengan meminta komitmen terhadap rencana tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA) kepada pelaku usaha
- c. Menerapkan pembinaan setempat terhadap pelaku usaha yang dapat memastikan untuk melaksanakan perbaikan berkelanjutan
- d. Aktif berkoordinasi dengan lintas sektor terkait terkait hasil pengawasan obat dan makanan serta tindak lanjut hasil pengawasan
- e. Membuat link bersama terkait hasil pengawasan sarana distribusi yang bisa diakses oleh Dinas Kesehatan setempat.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Nilai % capaian keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder melebihi target/ Baik. Hal ini dilakukan dengan aktif berkoordinasi dengan lintas sektor dan adanya penggunaan link bersama terkait hasil pengawasan untuk dapat diakses oleh *Stakeholders*.

IKU 6. Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	70	96,7	138,10	Sangat Baik

Nilai realisasi persentase Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 96,7 dengan capaian terhadap target triwulan II 2025 sebesar 138,10% di normalisasi menjadi 110% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “**Sangat Baik**”. Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan kategori penilaian sebagai berikut:

KATEGORI		
NO	PENILAIAN	URAIAN
A.	Evaluasi Ketepatan Waktu	Ketepatan waktu merupakan kesesuaian waktu pelaporan hasil pemeriksaan sarana yang diinput oleh UPT melalui SIPT (sampai dengan terkirim ke unit pusat), sesuai dengan waktu pelaporan yang ada di dalam SK Pedoman Pemeriksaan
<i>Cara perhitungan : (Jumlah sarana yang diperiksa tepat waktu/jumlah sarana yang diperiksa) X 100%</i>		

KATEGORI		
NO	PENILAIAN	URAIAN
B	Evaluasi Ketepatan Tindak Lanjut	Ketepatan Tindak Lanjut merupakan kesesuaian antara tindak lanjut yang diterbitkan oleh UPT dengan pedoman tindak lanjut. terkait pengawasan produksi pangan olaha dan kewenangan tindaklanjut. Tindak lanjut pemeriksaan dihitung terhadap tindak lanjut pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana. Jika diperlukan koordinasi dengan lintas sektor terkait, maka tindak lanjut dapat berupa bukti koordinasi yang telah dilakukan, dapat berupa surat resmi atau notulensi pertemuan, dll <i>Cara perhitungan: = (Jumlah sarana yang ditindaklanjuti dengan tepat/Jumlah Jumlah sarana yang diperiksa) X100%</i>
C	Evaluasi Ketepatan Grading	Kesesuaian grading merupakan konversi hasil pemeriksaan dengan grading, dimana jika hasil: pemeriksaan A dan B atau pemeriks level I dan level II maka grading sebagai A (MK) pemeriksaan C atau pemeriks level III maka grading sebagai B (TMK) pemeriksaan D atau pemeriks level IV maka grading sebagai C (TMK) <i>Cara perhitungan= (Jumlah sarana yang diberikan grading dengan tepat / jumlah sarana yang diperiksa) X 100%</i>

Hingga akhir Triwulan II tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Bungo sudah melakukan pengawasan sarana produksi pangan olahan sebanyak 12 sarana. di wilayah Loka POM di Kabupaten Bungo dengan hasil 6 sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 6 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK) yang berdasarkan evaluasi ketepatan waktu dan evaluasi ketepatan tindak lanjut terdapat 1 sarana yang tidak sesuai sehingga diperoleh Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II tahun 2025 adalah 96,7%.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi
	TW I	TW II
Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	96,7

Pada Triwulan II tahun 2025 nilai realisasi Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 96,7% dengan persentase capaian dan kriteria terhadap target tahun 2025 sebesar 138,10 % akan tetapi jika dibandingkan realisasi Triwulan I Tahun 2025 mengalami penurunan karena berdasarkan evaluasi ketepatan waktu dan evaluasi ketepatan tindak lanjut terdapat 1 sarana yang tidak sesuai dimana perhitungan nilai indikator bersifat akumulatif sehingga realisasi mengalami penurunan nilai capaian.

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa	72	96,7	138,10	Tercapai 

dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pada TW II tahun 2025 nilai realisasi Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 96,7% dengan persentase capaian dan kriteria terhadap target tahun 2025 sebesar 138,10% dengan kategori “**Tercapai**”.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Keberhasilan capaian pada TW II ini dikarenakan :

- f. Kontrol tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi dalam spreadsheet Hasil Pemeriksaan Loka POM di Kabupaten Bungo Tahun 2025 yang dikelola oleh Tim Pemeriksaan
- g. Percepatan pelaporan dan pemberian tindak lanjut terhadap rekomendasi dengan pembinaan ditempat pada saat pemeriksaan sarana dengan meminta komitmen terhadap rencana tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA) kepada pelaku usaha
- h. Menerapkan pembinaan setempat terhadap pelaku usaha yang dapat memastikan untuk melaksanakan perbaikan berkelanjutan
- i. Aktif berkoordinasi dengan lintas sektor terkait terkait hasil pengawasan obat dan makanan serta tindak lanjut hasil pengawasan

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Format perhitungan nilai indikator Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang mengalami perubahan yang sudah disesuaikan dan lebih *compact*. Selain itu tingginya dedikasi dan meningkatnya kompetensi petugas dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi sehingga dapat memberikan penilaian grading dan tindak lanjut yang sesuai dengan pedoman.

IKU 7. Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75	100	115,27	Sangat Baik

Nilai realisasi Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 100 dengan capaian terhadap target triwulan II 2025 sebesar 115,27%, sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian **“Sangat Baik”**.

A. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

- a. Persentase pemenuhan target pemeriksaan dihitung: Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa / jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan diperiksa x 100 %
- b. Persentase kesesuaian tindaklanjut dihitung: Persentase dari Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan / dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa x 100%
- c. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung rata-rata dari Persentase

pemenuhan target pemeriksaan dan Persentase kesesuaian tindaklanjut.

B. Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan (Rata-rata (a+b+c+d))

- a. Pelaksanaan dan kesesuaian pelaksanaan inspeksi OBA = $(\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana} / \text{jumlah target tahunan}) \times 100\%$
- b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat OBA = $(\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}) \times 100\%$
- c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi OBA = $(\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana} / \text{jumlah sarana yang selesai diperiksa/inspeksi}) \times 100\%$
- d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana OBA = $(\text{Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu} / \text{jumlah seluruh tindaklanjut})$

C. Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan (Rata-rata (a+b+c+d))

- a. Pelaksanaan inspeksi = $(\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana} / \text{jumlah target tahunan}) \times 100\%$.
- b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = $(\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}) \times 100\%$.
- c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = $(\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai} / \text{jumlah sarana yang selesai diperiksa}) \times 100\%$.
- d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = $(\text{Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu} / \text{jumlah seluruh tindaklanjut}) \times 100\%$.

Hingga akhir TW II, Loka POM di Kabupaten Bungo sudah melakukan pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi sebanyak 59 sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian, 13 sarana distribusi obat bahan alam dan 20 sarana distribusi kosmetik.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I	Realisasi TW II
Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,63	100

Berdasarkan tabel di atas, terlihat kenaikan realisasi dari triwulan I ke triwulan II. Realisasi triwulan I sebesar 93,63 sedangkan triwulan II realisasi sudah 100 persen.

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75	100	115,27	Tercapai 

Pada TW II tahun 2025 nilai realisasi Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 100 dengan persentase capaian dan kriteria terhadap target tahun 2025 sebesar 115,27% dengan kategori “**Tercapai**”. Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Keberhasilan capaian pada TW II ini dikarenakan :

Beberapa penyebab tercapainya target IKU persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan :

- a) Kegiatan pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi dilakukan sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat disetiap bulannya.
- b) Petugas mengambil keputusan hasil pemeriksaan sarana distribusi dan menyusun surat tindak lanjut berdasarkan Pedoman Tindak lanjut dari masing-masing komoditi.
- c) Ketua tim aktif dalam memonitoring dan evaluasi terhadap pelaporan sarana melalui SIPT maupun bit.ly internal serta surat tindak lanjut.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa program yang menunjang keberhasilan pencapaian target yaitu :

- a) Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Loka POM di Kabupaten Bungo
- b) Pembinaan kepada pelaku usaha (regulatory assistance), penerapan sanksi (proses projustitia maupun administrative) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana distribusi obat yang melakukan pelanggaran
- c) Aktif berkomunikasi dengan pelaku usaha, terutama penanggung jawab sarana terkait timeline perbaikan yang telah disepakati.
- d) Berkoordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan sarana distribusi obat dan makanan.
- e) Melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Masyarakat terkait Keamanan Produk Obat, OBA, SK, Kuasi dan Kosmetik dan Cek KLIK (cek Kemasan, Label, Izin Edar dan Kadaluarsa).

IKU 8. Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	97,5	121,88	Sangat Baik

Nilai realisasi persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II tahun 2025 adalah 97,5% sudah mencapai capaian kinerja terhadap Target TW II sebesar 80 dengan capaian 121,88% di normalisasi menjadi 110% sehingga dapat dikategorikan dalam kategori capaian **“Sangat Baik”**.

Nilai Persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung dari (a+b+c):

- a. pemenuhan target sarana distribusi yang diperiksa = 20% X ((jumlah sarana yang diperiksa/ target jumlah sarana yang diperiksa) X 100%)
- b. Ketepatan tindak lanjut = 70% X ((jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan / jumlah sarana yang diperiksa) X 100%)
- c. Kesesuaian waktu pelaporan = 10% X ((jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu / jumlah sarana yang diperiksa) X 100%)

Hingga akhir TW II, Loka POM di Kabupaten Bungo sudah melakukan pengawasan sarana distribusi pangan olahan sebanyak 9 sarana. Kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan intensifikasi pengawasan pangan Ramadhan dan menjelang idul fitri 1446 H.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I	Realisasi TW II
Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,67	97,5

Pada TW I tahun 2025 nilai realisasi Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 86,67 dan pada TW II tahun 2025 sebesar 97,5. Hal ini dikarenakan pada TW II tahun 2025 anggaran yang sebelumnya terkena dampak efisiensi sudah dikembalikan, sehingga untuk pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan dapat dioptimalkan.

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	97,5	121,88	Tercapai / Melampaui 

Pada TW II tahun 2025 nilai realisasi persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 97,5 dengan persentase capaian dan kriteria terhadap target sebesar 121,88 % dengan kategori capaian “**Tercapai/Melampaui**”. Target Indikator Utama (IKU) Persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan bersifat flat, artinya target setiap bulan sama.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Beberapa penyebab tercapainya target IKU persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan:

- a. Kegiatan pengawasan sarana distribusi pangan olahan dilakukan sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat disetiap bulannya.
- b. Petugas mengambil keputusan hasil pemeriksaan sarana distribusi dan menyusun surat tindak lanjut berdasarkan Pedoman Tindak lanjut Pangan Olahan.

- c. Ketua tim aktif dalam memonitoring dan evaluasi terhadap pelaporan sarana melalui SIPT maupun bitl.ly internal serta surat tindak lanjut.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa program yang menunjang keberhasilan pencapaian target yaitu :

- a. Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Loka POM di Kabupaten Bungo, seperti Food Inspector Dasar/Muda/Madya, Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dan pelatihan lain terkait pangan olahan.
- b. Pembinaan kepada pelaku usaha (regulatory assistance), penerapan sanksi (proses projustitia maupun administrative) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana distribusi obat yang melakukan pelanggaran
- c. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha terkait Cara Ritel Pangan Olahan yang Baik dan Keamanan Pangan.
- d. Melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Masyarakat terkait keamanan pangan dan Cek KLIK (cek Kemasan, Label, Izin Edar dan Kadaluarsa)

IKU 9. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Ketegori
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83,19	97,91	117,7	Sangat Baik

Nilai presentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan II adalah 97,91% dengan capaian kinerja terhadap terget 2025 sebesar 117,7% dengan kategori capaian **"Sangat Baik"**.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I	Realisasi TW II
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	95,67	97,91

Nilai presentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan II adalah 97,91%. Realisasi ini mengalami peningkatan dari triwulan I sebesar 95,67%. Hal ini disebabkan karena penilaian iklan dari petugas yang melaksanakan pengawasan iklan sudah lebih baik dari triwulan sebelumnya. Dimana iklan yang diawasi masih tepat waktu dan penarikan kesimpulan yang masih sesuai.

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83,19	97,91	117,7	Tercapai / Melampaui 

Realisasi presentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan II adalah 97,91% dengan capaian kinerja terhadap target 2025 sebesar 117,7% dengan kategori capaian **"Tercapai/Melampaui"**.

Pengawasan iklan dilaksanakan terhadap Obat, Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik serta Pangan Olahan. Adapun cara perhitungan presentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{a) \% Obat} &= (A+B)/2 \\ A &= (\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi} / \text{Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak}) \times 100\% \end{aligned}$$

- B = $\frac{(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi)}} \times 100\%$
- b) % OBAOK = $\frac{(A+B+C)}{3}$
- A = $\frac{(\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak})}{X} \times 100\%$
- B = $\frac{(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi})}{X} \times 100\%$
- C = $\frac{(\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan})}{X} \times 100\%$
- c) % SK = $\frac{(A+B+C)}{3}$
- A = $\frac{(\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak})}{X} \times 100\%$
- B = $\frac{(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi})}{X} \times 100\%$
- C = $\frac{(\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan})}{X} \times 100\%$
- d) % Kosmetik = $\frac{(A+B)}{2}$
- A = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media
- Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = $\frac{(\text{capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media})}{X} \times 100\%$
- B = $\frac{(\text{Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT} + \text{Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat})}{2}$
- Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = $\frac{(\text{Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi})}{X} \times 100\%$
 - Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = $\frac{(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi})}{X} \times 100\%$
- e) % PO = $A+B+C$
- A = $\frac{(\text{Jumlah iklan yang diawasi/ jumlah target iklan sesuai renlak})}{X} \times 40\%$
- B = Rata-rata dari perhitungan $\left(\frac{(\text{jumlah iklan yang diawasi per media iklan/ jumlah iklan yang diawasi})}{\text{proporsi target media}} \right) \times 20\%$
- C = $\frac{(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang diawasi})}{X} \times 40\%$

$$\% \text{ iklan sediaan farmasi dan pangan olahan} = \% \text{Obat} + \% \text{OBAOK} + \% \text{SK} + \% \text{Kosmetik} + \% \text{PO} / 5$$

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Penilaian ini berdasarkan perhitungan pada poin b, menandakan bahwa pelaksanaan pengawasan iklan masih sesuai ketentuan walau pun masih ada iklan yang masih berbeda penilaian dengan pusat. Kesesuaian dengan pusat juga menjadi penilaian dalam pengawasan iklan ini. Petugas diharapkan dapat melakukan pengawasan iklan sesuai dengan pedoman/juknis yang telah ditetapkan BPOM dengan ketepatan waktu yang sudah ditentukan.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan atau Kegagalan pencapaian kinerja dapat ditentukan oleh hal berikut :

1. Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
2. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

3.1.1.2 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 2 Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan di wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo

Capaian ini didukung dari 1 (Satu) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari capaian pada Sasaran Strategis (SS) 2 terhadap target Triwulan II 2025 diperoleh rata-rata 108,29% dengan kriteria **“Sangat Baik, Tercapai/Melampaui”** Hasil tersebut disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis 2 Triwulan II Tahun 2025

			Realisasi				Kategori Terhadap Target		
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW II 2025	Realisasi	%Capaian TW II 2025	%Capaian 2025	TW II 2025	Tahun 2025	
Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,5	10,5	11,37	108,29	98,87	Sangat Baik	Akan Tercapai	
NILAI CAPAIAN SASARAN						108,29	98,87	Sangat Baik	Akan Tercapai

IKU 10. Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dihitung menggunakan form dan rumus Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang diberikan oleh PPPOMN. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasarkan rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. LOKA POM di Kabupaten Bungo dalam tingkatan pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT yaitu pada tier/tingkat 1.

Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 1, dapat dihitung berdasarkan rumus $(75 \times a) + (15\% \times b) + (10\% \times c)$

- f. Nilai pemenuhan SRL Loka POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2.
- g. Nilai pemenuhan Standar Peralatan Loka POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.
- h. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Loka POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	10,5	11,37	108,29	Sangat Baik



Pada triwulan II tahun 2025 realisasi IKU ini diperoleh 11,37, dengan capaian 108,29 dengan kriteria Sangat Baik. Rincian perolehan nilai pemenuhan lab Loka POM di Kabupaten Bungo yaitu Standar Ruang Lingkup 6,83, Standar Peralatan 15, dan Standar Kompetensi Laboratorium 40.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I	Realisasi TW II
Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	10,67	11,37

Nilai realisasi pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada triwulan II adalah 11,37%. Realisasi ini mengalami peningkatan dari triwulan I sebesar 10,67%. Hal ini disebabkan bertambahnya pemenuhan dari ruang lingkup obat dan alat.

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,5	11,37	98,87	Akan Tercapai



Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada Triwulan I 11,37 dibandingkan dengan target akhir tahun 11,5, nilai capaian sebesar 98,87 dengan kriteria Akan Tercapai. Pada triwulan II telah melaksanakan uji sampel rutin terhadap sampel obat yang telah dilakukan verifikasi metode acuan, sehingga meningkatkan capaian terhadap target tahunan.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tercapainya keberhasilan nilai pemenuhan laboratorium pada triwulan II 2025 ini dikarenakan adanya perencanaan yang dibuat sesuai dengan realisasi kegiatan yang dilakukan, baik pada Standar Ruang Lingkup, Standar Peralatan, dan Standar Kompetensi Laboratorium, kemudian adanya komitmen dari petugas laboratorium untuk pemenuhan SKL dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait kebutuhan pemenuhan laboratorium SKL.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan pemenuhan SKL ini dengan melakukan

1. Pemetaan dan perencanaan setiap bulan, triwulan, hingga tahunan agar menggambarkan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai target IKU ini,
2. Melakukan monitoring secara berkala dan perbaikan berkelanjutan
3. Melakukan pengadaan reagen, test kit dan alat gelas yang sesuai kebutuhan agar rencana kegiatan dapat dilaksanakan

3.1.1.3 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 3 Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo

Capaian ini didukung dari 4 (Empat) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari capaian pada Sasaran Strategis (SS) 3 terhadap target Triwulan II 2025 diperoleh rata-rata

91,92 dengan kriteria “**Cukup**”, sedangkan terhadap target tahun 2025 diperoleh rata-rata 25,26 dengan kategori “**Perlu Upaya Keras**” Hasil tersebut disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis 3 Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun an	Realisasi				Kategori Terhadap Target	
			Target TW 1 2025	Realisasi	%Capaian TW 1 2025	%Capaian 2025	TW 1 2025	Tahun 2025
3 Meningkatkan Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat Efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	86,83	86,83	87,72	101,02	101,02	Sangat Baik 	Tercapai 
	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	25	75	100	0,00	Baik 	Perlu Upaya Keras 
	Jumlah desa pangan aman	1	25	0	100	0,00	Baik 	Perlu Upaya Keras 
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	25	0	66,67	0,00	Kurang 	Perlu Upaya Keras 
	NILAI CAPAIAN SASARAN				91,92	25,26	Cukup 	Perlu Upaya Keras 

IKU 11. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Tingkat Efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan diwilayah kerja UPT	86,83	87,72	101,02	Sangat Baik

Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survey dengan target masyarakat yang terpapar KIE baik melalui tatap muka maupun media pada bulan berjalan. Survey Efektitas KIE tahun 2025 terdiri dari survey Tatap Muka dan Survey Media, dimana indikator dari survey keduanya yaitu:

Indikator Survey Tatap Muka :

- a. Narasumber/Petugas
- b. Konten/Informasi
- c. Pemahaman Audiens
- d. Manfaat

Indikator survey Media

- a. Sumber Informasi
- b. Konten/Informasi
- c. Pemahaman Audiens
- d. Manfaat

Untuk responden yang ditetapkan ada ketentuan dari perhitungan target KIE tahunan, untuk tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo memiliki target peserta KIE sebanyak 95 Orang dengan target survey sebesar 86,83 disetiap triwulan.

Pada triwulan II ini, sudah diadakan kegiatan KIE berupa kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan tanggal 27 Mei 2025 dengan capaian 30 peserta dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi terkait “Pentingnya Gizi Seimbang dan Keamanan Pangan untuk Pencegahan Stunting” tanggal 19 Juni 2025 dengan capaian target 20 peserta . Nilai Capaian yang diperoleh pada triwulan II sebesar 87,72 dengan capaian 101,402% dan masuk dalam kategori “Sangat Baik”. Dengan masing-masing perolehan sebesar 84,34 (Tatap Muka) dan 91,06 (Media).

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I	Realisasi TW II
Tingkat Efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan diwilayah kerja UPT	90,7	87,72

Pada capaian Triwulan II lebih rendah dibandingkan capaian triwulan I dikarenakan beberapa survey program Prioritas Nasional yang rendah dikarenakan ketidakpahaman peserta dalam pengisian survey. Hingga triwulan II, petugas mencetak lembar survey agar memudahkan peserta kegiatan dalam pengisian survey dan terjadi peningkatan nilai dari bulan Mei kebulan Juni. Walaupun mengalami penurunan nilai, akan tetapi tetap dalam capaian target triwulan dan tahunan.

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja			Target Tahun 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Tingkat Efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan diwilayah kerja UPT			86,83	87,72	101,02	Tercapai/ Melampaui 

Realisasi Tingkat Efektifitas KIE triwulan II tahun 2025 mencapai target dengan kategori terlampaui, dan perlunya usaha dan strategi yang diterapkan untuk tahun 2025 agar capaian terus melampaui target tahunan.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Berdasarkan Analisa dari capaian keberhasilan dari nilai indeks efektifitas KIE adalah adanya perencanaan yang sudah dibuatkan dari awal walaupun terkendala dengan anggaran yang masih terblokir. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi dialihkan dengan daring dan jemput bola di tempat publik (KIE *Face to Face*). Pada triwulan II sudah dilaksanakan

kegiatan sesuai perencanaan yaitu Sosialisasi Keamanan Pangan tanggal 27 Mei 2025 dengan capaian 30 peserta, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi terkait “Pentingnya Gizi Seimbang dan Keamanan Pangan untuk Pencegahan Stunting” tanggal 19 Juni 2025 dengan capaian target 20 peserta. Untuk KIE media social, dibuatkan postingan terhadap seluruh kegiatan yang sudah dilaksanakan. Bukan hanya media social, pada triwulan II juga sudah dilakukan perilis berita di media online seperti website pada RRI Jambi dan Jambi Independen terkait kegiatan yang sudah terlaksana.

Perencanaan akan dimonitoring setiap triwulannya agar dapat di evaluasi dan ditindaklanjuti apabila ada kendala dalam pelaksanaan. Selain perencanaan, Keberhasilan dalam capaian target tidak lepas dari bantuan seluruh petugas yang kompeten, dapat bekerjasama dan bekerja keras dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk kedepannya, perlunya tambahan petugas sehingga dapat lebih maksimal dalam pelaksanaan kegiatan dan perencanaan yang lebih baik lagi dalam melaksanakan KIE Tatap Muka dan Media.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Adanya Planning Of Action (PoA) pada KIE Tatap Muka dan KIE Media.
2. Kegiatan penyebaran informasi dan lapak pom sapakat di pasar beduk kabupaten bungo dengan Teknik Face to Face pada tanggal 03 Maret 2025
3. Kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan Produk Pangan Olahan Terkemas untuk UMK secara Zoom Meeting tanggal 20 Maret 2025.
4. Sosialisasi Keamanan Pangan tanggal 27 Mei 2025
5. Komunikasi, Informasi dan Edukasi terkait “Pentingnya Gizi Seimbang dan Keamanan Pangan untuk Pencegahan Stunting” tanggal 19 Juni 2025
6. Memanfaatkan alat peraga berupa Leaflet, brosur, banner, poster serta contoh produk yang mengandung bahan berbahaya atau tanpa izin edar

dan video keamanan obat dan makanan untuk membantu penyampaian informasi lebih mudah dipahami masyarakat.

7. Memaksimalkan KIE Media Sosial dan Media Elektronik.

IKU 12. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dihitung berdasarkan jumlah sekolah yang memiliki kriteria Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif, melakukan intervensi kemanana pangan kepada komunitas sekolah dan mempunyai dokumen rencana aksi program keamanann pangan. Sekolah yang dilakukan intervensi pada tahun 2024 adalah 1 (satu) sekolah dengan 12 (dua belas) sekolah yang harus mendapatkan perluasan untuk dilakukan sosialisasi.

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Ketegori
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	75	75	100	Baik

Realisasi jumlah sekolah dengan dilakukan intervensi keamanan pangan sekolah / Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman hingga triwulan II tahun 2025 sudah mencapai target Triwulan II dengan kategori Baik, hal ini disebabkan karena telah terlaksananya kegiatan advokasi Sekolah Pangan Aman pada tanggal 22 Mei 2025, sosialiasasi Sekolah Yang Melaksanakan Keamanan Pangan pada tanggal 23 Mei 2025, dan Bimbingan teknis Kader Sekolah Pangan Aman pada tanggal 16 Juni 2025. Untuk TW selanjutnya akan dilaksanakan Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan Keamanan Pangan serta Pengawasan sekolah yang sebelumnya telah diintervensi.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I	Realisasi TW II
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	100

Pada triwulan I belum ada capaian untuk IKU Sekolah Pangan Aman dikarenakan adanya kendala terhadap pemerintah daerah yang masih belum selesai melaksanakan pilkada karena adanya PSU. Pada TW II sudah dilaksanakan sesuai perencanaan sehingga realisasi mencapai 100 %.

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	2	75	0	Perlu Upaya Keras 

Realisasi jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman hingga triwulan II Tahun 2025 belum mencapai target tahun 2025 dengan kategori **Perlu Upaya Keras**, hal ini disebabkan karena target indikator ini bersifat kumulatif sehingga baru dapat tercapai di akhir tahun 2025. Dan diusahakan untuk mengejar target tahunan ini pada Triwulan III-IV tahun 2025.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Program sekolah yang melaksanakan pembudayaan Keamanan Pangan merupakan bagian program Prioritas Nasional Kemanan Pangan Terpadu pada tahun 2025 dilaksanakan di 1 (satu) Kabupaten di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo. Kabupaten yang dipilih untuk dilakukan intervensi adalah Kabupaten Bungo.

Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah yang melaksanakan pembudayaan Keamanan Pangan. Kegiatan ini merupakan Indikator kinerja baru yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Bungo pada tahun 2025.

Pada Prinsip KAK Sekolah yang melaksanakan pembudayaan Keamanan Pangan telah melaksanakan tahapan Advokasi Lintas Sektor PJAS, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader PKP Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan Keamanan Pangan.

Pada tahapan audiensi/advokasi Loka POM akan melaksanakan koordinasi lintas sektor kepada Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dll. Pada saat advokasi akan ditentukan lokus sekolah yang akan diintervensi.

Pada tahapan sosialisasi keamanan pangan sekolah, dilaksanakan sosialisasi keamanan pangan sekolah kepada komunitas. Komunitas sekolah dapat menjadi penggerak dalam implementasi keamanan pangan di sekolah. Adapun komunitas sekolah yang terlibat adalah kepala sekolah, guru, komite sekolah, siswa, orang tua siswa, pedagang.

Tahapan selanjutnya adalah bimbingan teknis kader sekolah. Pada saat Bimtek kader akan diberikan materi tentang keamanan pangan dan para kader juga akan dilatih untuk pengujian sederhana menggunakan tes kit untuk mengetahui adanya bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan. Bahan berbahaya yang sering disalahgunakan antara lain formalin, *boraks*, *rhodamine B* dan *methanil yellow*.

Setelah dilakukan Bimtek kader keamanan pangan, para kader ini akan melakukan bimbingan teknis kepada komunitas di lingkungannya. Bimbingan teknis yang dilakukan oleh kader keamanan pangan tetap dalam pengawasan dan pendampingan oleh Tim Loka POM di Kabupaten Bungo. Setelah semua anggota komunitas memahami prinsip-prinsip keamanan

pangan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, akan dilakukan intensifikasi pengawasan keamanan pangan melalui sampling dan uji bahan berbahaya menggunakan rapid test. Fasilitasi keamanan pangan melalui pendampingan penerapan keamanan pangan di sarana produksi juga merupakan bagian dari program keamanan pangan terpadu. Setelah semua tahapan ini selesai akan dilakukan monitoring dan evaluasi dengan tujuan melihat penerapan prinsip keamanan pangan dan menurunnya jumlah pangan yang mengandung bahan berbahaya.

Pada tahap akhir kegiatan Pengawasan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS), akan dilakukan Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman terhadap 2 (dua) sekolah target intervensi tahun 2024. Sertifikasi dilakukan untuk melihat komitmen sekolah dalam melakukan intervensi keamanan pangan di sekolah. Verifikasi dilakukan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Bungo. Diharapkan sekolah yang diintervensi dengan program PJAS Aman dapat meneruskan program ini secara berkesinambungan dengan melahirkan inovasi-inovasi yang dapat dilaksanakan oleh kader keamanan pangan sekolah junior (siswa sekolah) dan menyebarluaskan ke sekolah sekitar yang belum mendapatkan program PJAS. Dengan demikian program PJAS akan semakin berkembang. Pada tahun 2024 juga dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program PJAS ini untuk mendapatkan masukan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh sekolah dalam menerapkan program PJAS. Loka POM di Kabupaten Bungo sangat mengapresiasi inovasi-inovasi yang dilakukan oleh sekolah dalam melanjutkan program PJAS meskipun sudah tidak difasilitasi oleh Loka POM di Kabupaten Bungo.

Agar tahapan kegiatan PJAS di triwulan berikutnya dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan maka diperlukan upaya dan strategi sehingga di akhir tahun semua tahapan dapat terlaksana dengan baik, tepat sasaran dan sesuai dengan target dan batas waktu yang telah ditetapkan, sehingga mempercepat terwujudnya pencapaian kinerja. Beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan sebagai upaya perbaikan kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan kader
- 2. Mendorong pemerintah daerah untuk memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan pengawalan kegiatan ini.
- 3. Melakukan pemantauan sesuai dengan POA yang telah ditetapkan UPT

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan dalam capaian target Triwulan II disebabkan oleh terlaksananya kegiatan Advokasi Sekolah Pangan Aman, sosialisasi Sekolah Yang Melaksanakan Keamanan Pangan, dan Bimbingan teknis Kader Sekolah Pangan Aman.

IKU 13. Jumlah Desa Pangan Aman

Jumlah desa pangan aman dihitung dari jumlah desa yang memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif, melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Ketegori
Jumlah Desa Pangan Aman	50	50	100	Baik

Realisasi persentase tahapan kegiatan desa aman hingga triwulan II tahun 2025 telah mencapai target Triwulan II dengan kategori Baik, hal ini disebabkan karena telah terlaksananya kegiatan advokasi Desa Pangan Aman pada tanggal 22 Mei 2025 dan Bimbingan teknis Kader Desa Pangan Aman pada tanggal 17 Juni 2025. Untuk TW selanjutnya akan dilaksanakan Pengawasan Keamanan Pangan Desa serta Lomba Desa Pangan Aman yang akan diikuti oleh desa yang telah diintervensi sebelumnya.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I	Realisasi TW II
Jumlah desa pangan aman	0	100

Pada triwulan II belum ada capaian untuk IKU Desa Pangan Aman dikarenakan adanya kendala terhadap pemerintah daerah yang masih belum selesai melaksanakan pilkada karena adanya PSU. Pada TW II sudah dilaksanakan sesuai perencanaan sehingga realisasi mencapai 100 %.

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Jumlah desa pangan aman	1	50	0	Perlu Upaya Keras

Realisasi jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman hingga triwulan II Tahun 2025 belum mencapai target tahun 2025 dengan kategori Perlu Upaya Keras, hal ini disebabkan karena target indikator ini bersifat kumulatif sehingga baru dapat tercapai di akhir tahun 2025 dan terus berupaya melakukan langkah strategis untuk mengejar target tahunan ini pada Triwulan III – IV tahun 2025.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Program Desa Pangan Aman merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2024 dilaksanakan di 1 kabupaten di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang baru dilaksanakan di Tahun 2025 oleh Loka POM di Kabupaten Bungo. UPT akan melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas komunitas yang ada sampai akhirnya terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu untuk lingkungan

terdekatnya. Komunitas desa yang diintervensi yaitu IRTP, pelaku usaha ritel, pelaku usaha warung siap saji, PKK/keluarga, sekolah dan Karang Taruna/remaja. Agar tahapan kegiatan Desa Pangan Aman di triwulan berikutnya dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan maka diperlukan upaya dan strategi sehingga di akhir tahun semua tahapan dapat terlaksana dengan baik, tepat sasaran dan sesuai dengan target dan batas waktu yang telah ditetapkan, sehingga mempercepat terwujudnya pencapaian kinerja. Beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan sebagai upaya perbaikan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Mengajukan pembukaan blokir anggaran agar kegiatan dapat dijalankan dengan optimal
2. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan kader
3. Mendorong pemerintah daerah untuk memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan pengawalan kegiatan ini.
4. Melakukan pemantauan sesuai dengan POA yang telah ditetapkan UPT.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program Desa Pangan pada triwulan I tahun 2025 hampir sama dengan PJAS yang belum dilaksanakan karena adanya pemilihan umum (pemilu) untuk kepala daerah dan di Kabupaten Bungo sebagai Kabupaten yang ditunjukan untuk melaksanakan Lokus melaksanakan Pemilihan Suara Ulang (PSU) sehingga dari hasil rapat awal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah diperoleh kesepakatan untuk melaksanakan kegiatan advokasi setelah PSU dan Penetapan Kepala Daerah terpilih pada bulan Mei 2024. Dikarenakan penundaan jadwal kegiatan ini, maka Loka POM di Kabupaten Bungo harus mempercepat dan mengoptimalkan kegiatan pada periode triwulan II tahun 2025.

IKU ini pun terkena dampak efisiensi anggaran yang menyebabkan beberapa kegiatan dilaksanakan dengan mengubah konsep kegiatan tersebut. Sebagai langkah dalam pelaksanaan efisiensi anggaran Loka POM di Kabupaten Bungo akan melaksanakan kegiatan sosialisasi secara daring

sehingga tidak membutuhkan banyak biaya untuk pelaksanaannya. Selain itu pelaksanaan sosialisasi secara daring juga sebagai salah satu solusi atas keterbatasan jumlah SDM yang ada sehingga tetap dapat menjangkau lebih banyak audience.

Komunitas yang diintervensi pada program ini yaitu IRTP, pelaku usaha ritel/warung, pedagang pasar, Ibu ibu PKK, Karang Taruna, pengelola kantin sekolah, komunitas sekolah, pondok pesantren, dan lain-lain.

Kegagalan kegiatan ini mungkin saja terjadi mengingat UPT baru saja melaksanakan kegiatan ini di tahun 2025, sehingga masih banyak pembelajaran dari petugas yang perlu ditingkat baik dari tahapan kegiatan maupun pelaporan kegiatan. Untuk menunjang keberhasilan program tersebut petugas Loka POM di Kabupaten Bungo perlu mengadakan study tiru ke Balai POM di Jambi dan melaksanakan koordinasi yang lebih intensif agar mendapatkan pendampingan dari BPOM Pusat, Balai POM di Jambi dan UPT lainnya. Dukung dari Kepala Loka POM sangat diperlukan untuk optimalisasi kegiatan advokasi dengan pemerintah terkait.

IKU 14. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dihitung dari jumlah pasar mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas dan Terjadinya penurunan % TMK cemaran kimia dan mikrobiologi pada Monev Tahap 1 dibandingkan Monev Tahap 2.

6. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	25	0	66,67	Kurang

Realisasi jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dari bahan berbahaya hingga triwulan II tahun 2025 belum mencapai target Triwulan II

dengan kategori **Kurang**, hal ini disebabkan karena kegiatan yang baru dilaksanakan hanya kegiatan Advokasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada tanggal 22 Mei 2025 dan Bimtek Kader Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada tanggal 21 Juni 2025. Kabupaten Bungo belum selesai dilaksanakan di bulan Maret. Untuk TW selanjutnya akan dilaksanakan Sosialisasi Keamanan Pangan di Pasar dan Pengawasan Keamanan Pangan di Pasar

7. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I	Realisasi TW II
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	50

Pada triwulan I belum ada capaian untuk IKU Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dikarenakan adanya kendala terhadap pemerintah daerah yang masih belum selesai melaksanakan pilkada karena adanya PSU. Pada TW II belum terlaksana sesuai perencanaan sehingga realisasi baru mencapai 50 %.

8. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Ketegori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	50	0	Perlu Upaya Keras

Realisasi jumlah pasar aman dari bahan berbahaya hingga triwulan II tahun 2025 terhadap target tahun 2025 sebesar 50 % dengan kategori Perlu Upaya Keras. Target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir tahun 2025. Dan diusahakan untuk mengejar target tahunan ini pada Triwulan III - IV tahun 2025.

9. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2025 dilaksanakan di 1 kabupaten di Kabupaten Bungo. Pasar Aman Berbasis merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya dengan tahapan advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, survei pasar, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar.

Pada Triwulan II Tahun 2025, progres program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang telah dilaksanakan adalah Advokasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Bimtek Kader Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Kegiatan Advokasi dilakukan sebagai bentuk koordinasi awal dengan pemerintah daerah sekaligus untuk menentukan lokus kegiatan yang akan dipilih sebagai role model Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

Setelah dilaksanakannya Advokasi dengan pemerintah Daerah dan terpilihnya lokus Pasar yang akan dijadikan rolemodel kegiatan Bimbingan Teknis Kader Pangan Aman dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, pemberdayaan, dan kemandirian komunitas pasar tentang keamanan pangan dan ikut serta dalam mengawasi pangan yang beredar di pasar. Selain itu Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi komunitas pasar dalam menerapkan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik di pasar rakyat.

Agar tahapan kegiatan Desa Pangan Aman di triwulan berikutnya dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan maka diperlukan upaya dan strategi sehingga di akhir tahun semua tahapan dapat terlaksana dengan baik, tepat sasaran dan sesuai dengan target dan batas waktu yang telah ditetapkan, sehingga mempercepat terwujudnya pencapaian kinerja. Beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan sebagai upaya perbaikan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan kader

- 2. Mendorong pemerintah daerah untuk memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan kegiatan ini
- 3. Mendorong pemda untuk meningkatkan dalam mengawal kegiatan

10. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan dalam capaian target Triwulan II dikarenakan kegiatan yang baru terealisasi hanya kegiatan Advokasi Pasar Pangan Aman dan Bimbingan teknis Kader Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

3.1.1.3 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 4 Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu

Capaian ini didukung dari 1 (Satu) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari capaian pada Sasaran Strategis (SS) 4 terhadap target Triwulan II 2025 diperoleh 110% dengan kriteria “**Cukup**”, sedangkan capaian terhadap target tahun 2025 64,33% dengan kategori “**Perlu Upaya Keras**” Hasil tersebut disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis 4 Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi				Kategori Terhadap Target		
			Target TW II 2025	Realisasi	%Capaian TW II 2025	%Capaian 2025	TW II 2025	Tahun 2025	
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	85,5	50	55	110	64,33	Sangat Baik	Perlu Upaya Keras
NILAI CAPAIAN SASARAN						110	64,33	Sangat Baik	Perlu Upaya Keras

IKU 15. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Ketegori
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	50	55	110	Sangat Baik

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dengan rumus sebagai berikut:

Persentase UMKM yang memenuhi rekomendasi sertifikat = (A + B + C) / 3

$$A = \left(\frac{\text{Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB}}{\text{jumlah UMK Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \right) \times 100\%$$

$$B = \left(\frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \right) \times 100\%$$

$$C = \left(\frac{\text{Jumlah UMKM kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \right) \times 100\%$$

Loka POM Kabupaten Bungo hanya memiliki target pendampingan pada komoditi Pangan Olahan sebanyak 5 sarana. Adapun berikut tahapan pendampingan produk pangan olahan:

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)
1	Sosialisasi / KIE Keamanan Pangan	Jan – Feb	5
2	Penetapan UMK pangan olahan target	Maret	10

3	Bimtek CPPOB	Maret – April	30
4	Fasilitasi Pendampingan	April – Okt	30
5	Monev dan Pelaporan	Nov - Des	5

Pada triwulan 1, telah dilaksanakan 2 tahapan kegiatan yaitu, Sosialisasi / KIE Keamanan Pangan dan Penetapan UMK pangan olahan target dengan bobot capaian sebesar 15%. Adapun, pada triwulan II capaian telah sesuai dengan target tahapan kegiatan yang telah ditetapkan oleh PMPU PO. Namun, terdapat perbedaan dengan target TW 1 yang telah ditetapkan oleh UPT, hal ini karena adanya perubahan tahapan target pada kegiatan pendampingan pangan olahan.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I	Realisasi TW II
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15	55

Pada triwulan II capaian sebesar 55 sebab sudah dilaksanakannya Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang dilakukan hybrid dan sudah terbitnya 1 IP CPPOB dibandingkan Triwulan I yang masih pada tahapan sosialisasi Keamanan Pangan dan Penetapan UMK Pangan Olahan.

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	85,5	55	64,33	Perlu Upaya Keras 

Pada target tahun 2025 persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan / atau IP CPPOB pangan olahan sebesar 85,5% dengan persentase capaian dan kategori terhadap tahun 2025 sebesar 64,33% dengan kategori **“Perlu Upaya Keras”**.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Berdasarkan hasil capaian di TW II tahun 2025, telah diperoleh capaian progress tahapan sebesar 55%, hal ini dikarenakan pendampingan UMKM Pangan Olahan telah dilakukan sesuai timeline. Adapun tahapan kegiatan yang telah dilakukan adalah Sosialisasi / KIE Keamanan Pangan dan Penetapan UMK Pangan Olahan, Sosialisasi / KIE Keamanan Pangan, Bimbingan Teknis CPPOB, Fasilitasi UMKM dengan 1 keluaran IP CPPOB. Adapun peserta dari kegiatan ini adalah UMKM yang berasal dari wilayah kerja UPT, dari kegiatan ini dapat menjadi gambaran UMKM yang akan mengikuti program pendampingan oleh Loka POM. Namun, karena efisiensi anggaran sebanyak 87,94%, sehingga kegiatan dialihkan secara daring, kurang berdampak kepada pelaku usaha, sebagian pelaku usaha tidak fokus dan tampak kurang tertarik saat pelaksanaan kegiatan karena sambil melaksanakan kegiatan harian. Namun, dengan itu tidak menutupi minat pelaku usaha untuk mendaftarkan produk di BPOM.

Banyaknya pelaku usaha yang berkonsultasi, menunjukkan bahwa banyak UMK yang berpotensi untuk mendaftarkan produksnya di BPOM. Namun, sayangnya tidak semua pelaku usaha memiliki komitmen tinggi serta pengetahuan yang cukup tentang pendaftaran di Badan POM. UMK kebanyakan juga tidak memahami teknologi, sehingga sebagian besar pelaku usaha bergantung kepada petugas Loka POM. Namun, dengan keterbatasan sumber daya dan anggaran petugas Loka POM tidak dapat mendampingi pelaku usaha terus secara langsung, padahal pelaku usaha lebih paham dan terbantu bila di damping secara langsung.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Pernyataan Kinerja

- 1. Loka POM Kabupaten Bungo juga memiliki program inovasi pendampingan UMKM yaitu, “DJANGKI OM” (Dampingi Jemput bola peNGurusan Konsultasi Izin Edar Obat dan Makanan) kegiatan ini merupakan kegiatan pendampingan UMKM yang dilakukan secara intensif oleh Loka POM Kabupaten Bungo. Pendampingan UMKM dapat dilakukan secara offline maupun online, sehingga pelaku usaha UMKM dapat kapanpun menerima pendampingan dari Loka POM walaupun tidak sedang berada di daerah bungo dan sekitarnya.
- 2. Melaksanakan Bimbingan Teknis CPPOB untuk pelaku usaha, termasuk melakukan evaluasi pre-test dan post agar dapat mengetahui pemahaman pelaku usaha

3.1.1.3 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 5 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo

Capaian ini didukung dari 1 (Satu) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari realisasi pada Sasaran Strategis 5 terhadap target Triwulan II 2025 diperoleh 107,53% dengan kriteria “Sangat Baik” Hasil tersebut disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis 5 Triwulan II Tahun 2025

			Realisasi				Kategori Terhadap Target	
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW II 2025	Realisasi	%Capaian TW II 2025	%Capaian 2025	TW II 2025	Tahun 2025
5 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	93	93	100	107,53	107,53	Sangat Baik	Tercapai

107,53

107,53

Sangat Baik

Tercapai

NILAI CAPAIAN SASARAN



IKU 16. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo	93	100	107,53	Sangat Baik

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara.

Penilaian Tingkat Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut sebagai berikut :

- SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$

- d. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara).

Nilai realisasi Tingkat persentase keberhasilan penyidikan kejahatan dibidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada Triwulan II Tahun 2025 adalah 100. Capaian nilai terhadap target Triwulan II Tahun 2025 adalah ~ **(Sangat Baik)**. Hal ini dikarenakan pada Triwulan II Tahun 2025 targetnya adalah 93 namun realisasinya adalah 100 sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian **“Sangat Baik”**. Hal ini terjadi karena pada Triwulan II Tahun 2025 terdapat kasus yang ditindaklanjuti secara *pro justitia* sampai dengan tahapan P21.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I	Realisasi TW II
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo	15	100

Pada tabel menggambarkan perbandingan capaian antara Triwulan I dan Triwulan II dengan Nilai realisasi Tingkat persentase keberhasilan penyidikan kejahatan dibidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada Triwulan I Tahun 2025 adalah 15 Capaian nilai terhadap target Triwulan I Tahun 2025 adalah ~ **(Sangat Baik)**. Hal ini dikarenakan pada Triwulan II Tahun 2025 targetnya adalah 0 namun realisasinya adalah 15 sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian **“Sangat Baik”**. Hal ini terjadi karena pada Triwulan II Tahun 2025 terdapat kasus yang ditindaklanjuti secara *pro justitia* sampai dengan tahapan SPDP dan sedangkan Nilai realisasi Tingkat persentase keberhasilan penyidikan kejahatan dibidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada Triwulan II Tahun 2025 adalah 100. Capaian nilai terhadap target Triwulan II Tahun 2025 adalah ~ **(Sangat Baik)**. Hal ini dikarenakan pada Triwulan II Tahun 2025 targetnya adalah 93 namun realisasinya adalah 100 sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian **“Sangat Baik”**. Hal ini terjadi karena pada Triwulan II Tahun 2025

terdapat kasus yang ditindaklanjuti secara *pro justitia* sampai dengan tahapan P21

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo	93	100	107,53	Tercapai 

Berdasarkan indikator kinerja, target Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo pada Tahun 2025 sebesar 93, dengan realisasi sebesar 100 sehingga telah berhasil mendapatkan capaian nilai keberhasilan sebesar 107,53 %. Maka dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan kriteria penilaiannya adalah “Tercapai”. Hal demikian terjadi, karena Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo dalam penilaian disesuaikan dengan dengan setiap tahapan perkara, sehingga penilaian sesuai target tahunan sudah terlihat hasilnya saat pada triwulan II karena pada bulan April telah dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti (P21).

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo terjadi karena:

- Kegiatan ini dapat berhasil karena memiliki petugas yang di fungsi penindakan yang masih muda dan cekatan. Saat ini Loka POM Kabupaten Bungo memiliki 2 orang PPNS yang baru dilantik di Tahun 2023.

- Kompetensi Sumber Daya Manusia yang semakin profesional dalam melakukan serangkaian kegiatan dari pengumpulan bahan keterangan hingga dilakukannya penindakan.
- Koordinasi yang terjalin baik dengan *Criminal Justice System* seperti Kepolisian setempat yaitu Polres Bungo, Polres Merangin dan Polres Kerinci selaku korwas PPNS yang memberikan bantuan teknis dan taktis di lapangan maupun proses penyidikan. Koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Setempat seperti Kejaksaan Negeri Bungo, Kejaksaan Negeri Merangin dan Kejaksaan Negeri Sungai Penuh terkait proses pemberkasan perkara. Koordinasi dengan Pengadilan Negeri Bungo, Pengadilan Negeri Bangko, Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Bea Cukai Jambi dan lintas sektor terkait.
- Telah dilakukan penanganan perkara secara *pro justitia* terhadap 1 (satu) kasus obat-obat tertentu dengan tersangka sebanyak 3 (tiga) orang yang saat ini sudah pada tahap Penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan (P21) dan dalam proses persidangan yang menunggu hasil putusan.

Walaupun capaian kinerja Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo Triwulan II Tahun 2025 telah berhasil melebihi target Triwulan II, tetapi masih terdapat juga kendala dalam pelaksanaan kegiatan, seperti adanya keterbatasan SDM yang di miliki oleh Penindakan Loka POM Kabupaten Bungo sehingga masih membutuhkan tenaga/petugas dari bagian lainnya (pemeriksaan) dan bantuan petugas kepolisian dalam jumlah banyak untuk mendampingi dalam proses operasi penindakan.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tindak pidana obat dan makanan merupakan tindak kejahatan teroganisir sehingga merupakan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan pengawasan yang paripurna dan berkelanjutan agar masyarakat terlindungi dari obat dan makanan ilegal yang beresiko terhadap

kesehatan. Loka POM di Kabupaten Bungo terus berupaya melakukan pengawasan terhadap penjualan offline maupun online, melakukan penelusuran dan pendalaman informasi terhadap produk obat dan makanan yang tren peredarannya mulai beralih ke arah digital.

3.1.1.3 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 6 Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan dibidang Sediaan Farmasi dan Pangan olahan yang Efektif di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo

Capaian ini didukung dari 1 (Satu) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari realisasi pada Sasaran Strategis 6 terhadap target Triwulan II 2025 diperoleh 83,32 dengan kriteria **“Cukup / Perlu Upaya Keras”** Hasil tersebut disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis 6 Triwulan 1 Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi				Kategori Terhadap Target	
			Target TW II 2025	Realisasi	%Capaian TW 1 2025	%Capaian 2025	TW II 2025	Tahun 2025
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	90	45	45,83	101,84	50,92	Sangat Baik	Perlu Upaya Keras
NILAI CAPAIAN SASARAN					101,84	50,92	Sangat Baik	Perlu Upaya Keras

- IKU 17. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
- a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	45	45,83	101,84	Sangat Baik 

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktorat Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktorat Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;
- b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :
 1. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.
 2. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**

Untuk penilaian tingkat keberhasilan Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

- a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)

- b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
- c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Dengan pertimbangan keterangan sebagai berikut:

- a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.
- b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25)
- c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

Nilai realisasi Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar pada Triwulan II Tahun 2025 adalah 45,83. Capaian nilai terhadap target Triwulan II Tahun 2025 adalah 101,84% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian **“Sangat Baik”**.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I	Realisasi TW II
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	41,67	45,83

Dari tabel di atas dapat kita bandingkan antara capaian realisasi Triwulan I dan triwulan II dengan Nilai realisasi Laporan Analisis Kejahatan Sediaan

Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar pada Triwulan I Tahun 2025 adalah 41,67. Capaian nilai terhadap target Triwulan I Tahun 2025 adalah 83.34% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “**Cukup**” dikarenakan target triwulan I sebesar 50. Dan Nilai realisasi Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar pada Triwulan II Tahun 2025 adalah 45,83. Capaian nilai terhadap target Triwulan II Tahun 2025 adalah 101,84% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “**Sangat Baik**”. Di karenakan adanya perubahan target terhadap triwulan II menjadi 45.

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	45,83	50,92	Perlu Upaya Keras 

Nilai realisasi persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar pada Triwulan II Tahun 2025 adalah 45,83 . Capaian nilai terhadap target Triwulan II Tahun 2025 adalah 50,92% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “**Perlu Upaya keras**” terhadap target tahunan yang sebesar 90.

Berdasarkan indikator kinerja, target persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo pada Tahun 2025 sebesar 90, dengan realisasi sebesar 45,83 sehingga telah berhasil mendapatkan capaian nilai keberhasilan sebesar 50,92%. Maka dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan kriteria penilaiannya adalah “Perlu Upaya Keras”. Hal demikian terjadi, karena Keberhasilan Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo dalam penilaian disesuaikan dengan dengan

setiap tahapan pelaporan dan penilaian yang berkelanjutan, sehingga penilaian sesuai target tahunan akan terlihat hasilnya saat pada Triwulan IV Tahun 2025.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Pencapaian Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo tentu saja terjadi karena:

- Tren masyarakat saat ini mulai beralih ke arah digital, sehingga staf penindakan secara aktif melakukan pemantauan peredaran obat dan makanan di media online melalui pelaksanaan kegiatan patroli siber. Kegiatan ini dapat berhasil karena memiliki petugas yang di fungsi penindakan yang masih muda dan cekatan meskipun kompetensi SDM masih belum memadai karena belum seluruhnya pernah mengikuti diklat intelijen dasar, analisis, penggalangan maupun siber.
- Penyesuaian system kerja karena adanya perubahan susunan anggota tim fungsi penindakan.
- Pelaporan patrol siber Bulan April - Juni 2025 dan pelaporan profiling pelaku kejahatan Bulan April - Juni 2025 yang tepat waktu. Sedangkan pelaporan profiling pelaku kejahatan di Bulan Juni 2025 (pelaporan 1 sarana) dinilai ttepat waktu.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya pencapaian kinerja pada Triwulan II tahun 2025 ditunjang melalui pelaksanaan program Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, antara lain melalui kegiatan:

1. Kegiatan Peningkatan kompetensi petugas. Pelatihan terhadap penjejukan digital dan anailisis kejahatan yang diadakan oleh BPOM RI secara daring maupun luring.

- 2. Adaptif terhadap sistem pelaporan baru laporan siber dan laporan profiling kejahatan meskipun aplikasi seringkali bermasalah dan eror.

3.1.1.3 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 7 Layanan Publik Loka POM di Kabupaten Bungo yang Prima

Capaian ini didukung dari 1 (Satu) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari realisasi Sasaran Strategis 7 terhadap target Triwulan II 2025 diperoleh 0%. Capaian dilakukan perhitungan pada akhir tahun. Hasil tersebut disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis 7 Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi				Kategori Terhadap Target	
			Target TW II 2025	Realisasi	%Capaian TW II 2025	%Capaian 2025	TW II 2025	Tahun 2025
7 Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,4	0	0	0,00	0	-	-
NILAI CAPAIAN SASARAN					0,00	0	-	-

IKU 18. Indeks Pelayanan Publik Loka POM di Kabupaten Bungo

- a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Ketegori
Indeks Pelayanan Publik Loka POM di Kabupaten Bungo Tahun	-	-	-	-

Realisasi dan capaian Triwulan II Tahun 2025 belum bisa dihitung karena belum ada penilaian dan evaluasi kinerja dari Indeks Pelayanan Publik pada triwulan II tahun 2025.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I	Realisasi TW II
Indeks Pelayanan Publik Loka POM di Kabupaten Bungo Tahun	-	-

IKU ini tidak dapat dilakukan perbandingan realisasi antara triwulan I dengan triwulan II. Hal ini dikarenakan perhitungan pelayanan publik dilakukan pada akhir tahun 2025.

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Indeks Pelayanan Publik Loka POM di Kabupaten Bungo Tahun	4,4	-	-	-

Realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya belum dilakukan penilaian hasil Indeks Pelayanan Publik pada triwulan II tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2025

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Pelayanan Publik merupakan salah satu indikator sasaran strategis Meningkatkan Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik. Berbagai upaya dilakukan Loka POM di Kabupaten Bungo untuk mendapat kategori penilaian “Pelayanan Prima”, yaitu pemenuhan persyaratan/klausul penilaian secara maksimal untuk seluruh 6 (enam) aspek penilaian. Berdasarkan penilaian/evaluasi mandiri, seluruh aspek mendapatkan nilai maksimal. Upaya yang dilakukan untuk mendukung penilaian maksimal, antara lain:

1. Membentuk SK Tim Penilaian Indeks Pelayanan Publik
2. Melakukan pembagian jobdesk untuk masing-masing point penilaian pada aplikasi sapa apip
3. Melaksanakan persiapan pada awal tahun sehingga pada saat penilaian, hanya tinggal mengumpulkan data dukunganya saja.
4. Melakukan reviu Standar Pelayanan Publik secara berkala setiap tahun, dan mengadakan Forum Konsultasi Publik dalam penyusunan Standar Pelayanan Publik untuk mendapatkan masukan/saran dari berbagai unsur masyarakat.
5. Melakukan SKM setiap bulan untuk mengukur kualitas pelayanan publik di mata pelanggan.
6. Melakukan publikasi tentang Standar Pelayanan Publik, Maklumat Pelayanan, dan SKM di berbagai media elektronik/non elektronik.
7. Upaya menunjukkan profesionalisme SDM yaitu adanya SK pelaksanaan tugas Sabtu, Minggu, dan Hari Libur Nasional, pekerjaan yang dilakukan di luar jam kerja, dll
8. Untuk mempertahankan profesionalisme SDM petugas pelayanan publik, secara kontinu dilakukan pendidikan/pelatihan untuk peningkatan kompetensi, pemberian beasiswa, coaching/mentoring, capacity building dan mekanisme lainnya untuk memotivasi, meningkatkan kualitas petugas layanan publik, dan konsistensi penerapan budaya pelayanan prima.
9. Pemberian reward dan punishment untuk petugas pelayanan publik
10. Pemenuhan sarana dan prasarana untuk kelompok rentan. Fasilitas yang disiapkan sesuai dengan SE Menteri PANRB No. 66/2020 tentang Penyediaan
11. Sarana Prasarana bagi Kelompok Rentan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik ada 14 fasilitas yang harus disediakan bagi kelompok rentan. Keempat belas sarana prasarana tersebut meliputi kursi roda/tongkat/krek; pintu masuk yang mudah diakses; jalan landai dan pegangan rambat; lift khusus kelompok rentan disertai huruf braille; selasar yang menghubungkan semua ruang; toilet khusus;

loket khusus; ruang tunggu khusus; serta guiding block dan parkir khusus. Kemudian, alat bantu tunanetra dan tunarungu; arena bermain anak; ruang laktasi/menyusui; serta fasilitas lain pendukung layanan seperti petugas pemandu ataupun petugas yang mampu berbahasa isyarat.

12. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik, seperti perubahan dekorasi, penambahan fasilitas coffee corner, penyediaan minuman dan kue tradisional, dll.
13. Memastikan sistem antrian di ruang layanan publik berfungsi dengan baik
14. Melakukan pemuktahiran system informasi pelayanan publik yang dilakukan setiap hari, mengoptimalkan sistem informasi yang terhubung ke SIPPN, dll.
15. Memastikan pengaduan ditindaklanjuti sesuai timeline, mengoptimalkan penggunaan kanal pengaduan nasional SP4N Lapor, penyusunan laporan dan monev pengaduan secara berkala, dll.
16. Pengembangan inovasi yang berkelanjutan dengan dukungan SDM, Sarana dan Prasarana, serta anggaran.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam menunjang penilaian pelayanan publik dibutuhkan komitmen dari seluruh tim untuk menjalankan jobdesk dan mengumpulkan data dukung tepat waktu sehingga pengunduhan data dukung ke aplikasi evortal dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Pemenuhan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan agar memenuhi setiap kriteria indeks pelayanan publik yang akan dilakukan penilaian.

Inovasi dalam peningkatan pelayanan public sangat dibutuhkan untuk mendukung kinerja pelayanan publik, menjaga integritas pegawai dan organisasi, menjamin profesionalisme dan fairness, serta akuntabilitas.

Terdapat beberapa inovasi yang mendukung dalam pelayanan publik di Loka POM di Kabupaten Bungo yaitu : LAPAK POM SAPAKAT untuk layanan ULPK kepada Masyarakat yang lebih dekat, Djangki OM untuk peningkatan waktu pelayanan UMKM yang mendaftarkan izin edar dan Kanti Cedik merupakan inovasi yang memanfaatkan aplikasi WA video call dan zoom untuk memudahkan Masyarakat mendapat informasi dan pelayanan.

Kegagalan program ini mungkin terjadi jika program pelayanan publik dilaksanakan tetapi tidak disertai dengan dokumentasi yang lengkap sehingga pada saat penilaian dan evaluasi data yang akan dinilai menjadi tidak lengkap. Selain itu, kegiatan pelayanan public yang tidak konsisten menyebabkan indeks kepuasan dari masyarakat menjadi menurun dan berakibat pada penurunan indeks pelayanan publik.

3.1.1.3 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 8 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

Capaian ini didukung dari 4 (Empat) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari realisasi pada Sasaran Strategis 8 terhadap target Triwulan II 2025 diperoleh rata-rata 100 dengan kriteria “**Baik**, sedangkan capaian terhadap target tahun 2025 diperoleh 40% termasuk kategori **Perlu Upaya Keras**” Hasil tersebut disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis 8 Triwulan 1 Tahun 2025

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi			Kategori Terhadap Target	
				Target TW II 2025	Realisasi	%Capaian TW II 2025	%Capaian 2025	TW II 2025 Tahun 2025
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	78,39	0	0	0,00	0	- -
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	0	0	0,00	0	- -
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,55	0	0	0,00	0	- -

Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	40	40	100,00	40	Baik	Perlu Upaya Keras
				100,00	40	Baik	Perlu Upaya Keras
NILAI CAPAIAN SASARAN						Baik	Perlu Upaya Keras

IKU 19. Nilai AKIP UPT BPOM

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Nilai AKIP UPT BPOM	-	0	0	-

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan UPT mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP. Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:

- 1) AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100;

- 2) A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90;
- 3) BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80;
- 4) B (Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70;
- 5) CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60;
- 6) C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50;
- 7) D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I	Realisasi TW II
Nilai AKIP UPT BPOM	-	-

Perbandingan Realisasi Kinerja nilai AKIP pada TW II dengan TW sebelumnya belum dapat dilakukan karena penilaian AKIP oleh Badan POM di akhir tahun.

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja			Target Tahun 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Nilai	AKIP	UPT	78,39	0	0	-
BPOM						

Perbandingan Realisasi Kinerja nilai AKIP pada TW II dengan Target Tahun 2025 tidak dapat dilakukan karena penilaian AKIP oleh Badan POM di akhir tahun.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Berdasarkan pada hasil evaluasi tahun 2024 nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Bungo dengan nilai 77,39 kategori “Sangat Baik”, sehingga Loka POM di Kabupaten Bungo berkomitmen melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja TW, tahunan, dan target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan kesimpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi serta memanfaatkan hasil monev tersebut untuk perbaikan pelaksanaan selanjutnya. Capaian kinerja ditingkatkan keandalannya yang dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang didapat dipercaya (kompeten) serta mampu telusur.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja nilai AKIP ditentukan oleh adanya perencanaan kinerja (bobotnya = 24), pengukuran kinerja (bobotnya = 24), pelaporan kinerja (bobotnya = 12), monitoring dan evaluasi kinerja (bobotnya = 20) yang baik serta adanya peningkatan pencapaian indikator kinerja dari tahun sebelumnya (bobotnya = 20).

Sebagai upaya untuk pencapaian target indikator Nilai AKIP pada periode penilaian pada Triwulan IV, langkah-langkah yang sudah dilakukan antara lain:

- 1) Membuat perencanaan pengembangan kompetensi personil Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan terkait implementasi SAKIP

- 2) Mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung dalam hal penilaian AKIP UPT.
- 3) Melakukan rapat monitoring dan evaluasi kegiatan dan anggaran setiap bulan
- 4) Mereviu SOP Monitoring dan Evaluasi
- 5) Komitmen pegawai di loka POM di Kabupaten Bungo dalam melaksanakan implementasi sakip sehingga laporan/data yang dikirimkan tepat waktu dan melaksanakan dengan maksimal target yang akan dicapai disetiap sasaran strategis dan indikator kerjanya

IKU 20. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan, pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 8 indikator pembentuk IKPA antara lain:

- 1) Revisi DIPA (bobot 10%)
- 2) Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
- 3) Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
- 4) Belanja Kontraktual (bobot 10%)
- 5) Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
- 6) Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
- 7) Capaian Output (bobot 25%)
- 8) Dispensasi SPM (pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)

2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Perhitungan dari Nilai Kinerja Anggaran sebagai berikut Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%). Kategori konversi Nilai Kinerja Anggaran sebagai berikut,

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d 100	Sangat Baik	5

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	0	0	-

Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM pada TW II dengan Target TW II belum dapat dilakukan karena penilaian Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM oleh Badan POM di akhir tahun.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I	Realisasi TW II
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-

Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM pada TW II dengan Realisasi TW sebelumnya belum dapat dilakukan karena penilaian Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM oleh Badan POM di akhir tahun.

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	0	-	-

Target tahun 2025 adalah 5 dan realisasi triwulan II 2025 belum bisa dihitung karena pengukuran Nilai Kinerja Anggaran dilakukan pada triwulan IV atau pada akhir tahun.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Berikut adalah langkah yang telah dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Bungo dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan secara akuntabel pada TW berikutnya:

- 1) Melakukan penyesuaian RPD berdasarkan jadwal yang telah ditentukan sesuai dengan SE dari Kementerian Keuangan
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala
- 3) Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada pihak *stakeholder* terkait, yaitu KPPN Muaro Bungo dan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jambi

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Meningkatkan kualitas perencanaan penyesuaian RPD maksimal tanggal 10 di awal TW berikutnya atau sesuai dengan Surat Edaran dari Kementerian Keuangan mengenai batas waktu yang ditetapkan dalam melaksanakan revisi Hal III DIPA, meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan, melakukan monitoring secara berkala, melakukan rapat evaluasi kegiatan setiap awal bulan serta melakukan koordinasi dan konsultasi kepada pihak KPPN Muaro Bungo dan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jambi selaku pihak *stakeholder* eksternal.

IKU 21. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM**a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan**

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	0	0	-

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. Tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi, antara lain:

- a) *Risk Naïve* : Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
- b) *Risk Aware* : Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
- c) *Risk Defined* : Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
- d) *Risk Managed* : Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
- e) *Risk Enabled* : Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko. Serta menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko.

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
<i>Risk Naive</i>	0-16	1	-
<i>Risk Aware</i>	17- 32	2	Peningkatan <i>Risk Naive</i> menuju <i>Risk Aware</i>
<i>Risk Defined</i>	33- 48	3	Peningkatan <i>Risk Aware</i> menuju <i>Risk Defined</i>
<i>Risk Managed</i>	49- 64	4	Peningkatan <i>Risk Defined</i> menuju <i>Risk Managed</i>
<i>Risk Enabled</i>	65- 80	5	Peningkatan <i>Risk Managed</i> menuju <i>Risk Enabled</i>

Cara perhitungan level maturitas

$$\text{Skor Maturitas} = \frac{\text{Skor Total}}{16}$$

Keterangan:

- Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko

- b) Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

Pada indikator kinerja Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM target Triwulan I-III Tahun 2025 adalah 0 dan realisasinya juga 0. Hal ini dikarenakan pengukuran dilakukan pada akhir tahun.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I	Realisasi TW II
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-

Perbandingan capaian kinerja indikator kinerja Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM target triwulan dengan target triwulan sebelumnya tidak dapat dilakukan karena Pada indikator kinerja Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM target dan realisasi Triwulan I-II Tahun 2025 adalah 0 dan realisasinya juga 0. Hal ini dikarenakan pengukuran dilakukan pada akhir tahun.

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,55	0	0	-

Perbandingan capaian kinerja indikator kinerja Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM target triwulan dengan target tahuna belum dapat dilakukan. Hal ini karena pengukuran penilaian Manajemen Risiko dilkukan pada akhir tahun.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Bersdasarkan Surat dari Inspektur Utama Badan POM Nomor B-PI.06.07.7.12.24.739 tentang Laporan Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2024 pada Loka POM di Kabupaten Bungo dapat

dikategorikan *Risk Aware*. Tingkat maturitas penerapan manajemen risiko Tahun 2024 adalah 2,500 mengalami peningkatan sebanyak 0,594 dibandingkan Tahun 2023 yaitu 1,906. Hal ini dikarenakan pembaharuan dan kerja sama tim Manajemen Risiko Loka POM di Kabupaten Bungo yang berkomitmen melaksanakan pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi manajemen risiko dan perbaikan berkelanjutan. Capaian kinerja ditingkatkan keandalannya yang dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang didapat dipercaya (kompeten) serta mampu telusur.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan tidak dapat dilakukan analisa terhadap ketercapaiannya dikarenakan penilaian dilakukan periode akhir tahun.

IKU 22. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	40	40	100	Baik

Indeks RB Loka POM di Kabupaten Bungo diperoleh dengan menjumlahkan nilai pada bobot komponen pengungkit dan bobot komponen hasil Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/ Unit Kerja dan BB/ BPOM. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang

pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Penilaian implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Loka POM dilaksanakan dengan penilaian mandiri oleh UPT dengan rencana aksi dan realisasi kegiatan. Penilaian RB Loka POM di Kabupaten belum berdasarkan hasil penilaian dari TPI (Tim Penilai Internal) atau APIP. Pada TW II telah terealisasi program berupa penegakkan disiplin, kode etik dan kode perilaku yang menjadi tanggungjawabnya disusun secara lengkap dan tepat waktu (Dokumen yg dimaksud adalah Dokumen Monev pelaporan disiplin, pelaporan apel dan upacara, monev cuti, penyusunan berkas disiplin. Pengembangan karir yang menjadi tanggungjawabnya telah terlaksana serta disusun secara lengkap dan tepat waktu (Dokumen yang dimaksud adalah dokumen pengangkatan atau pemberhentian dalam jabatan, dokumen peningkatan status CPNS ke PNS, dokumen usulan kenaikan pangkat atau jabatan, dokumen usulan promosi jabatan, dokumen usulan redistribusi pegawai, dokumen usulan mutasi eksternal, dokumen persiapan pelantikan JF & Pelantikan PNS, Dokumen pencatuman gelar, Dokumen pengelolaan JF). Pengelolaan kesejahteraan yang menjadi tanggungjawabnya disusun secara lengkap dan tepat waktu telah terlaksana (dokumen yang dimaksud adalah dokumen pembayaran tunj, dokumen pembayaran gaji, usul karpeg, karis, karsu, taspen, bpjs, KP4, KGB, dokumen monev tindaklanjut survey engagement, dokumen monev kesehatan mental pegawai, dokumen usulan surat penugasan). Data pegawai (Riwayat Penghargaan, Hukuman Disiplin, Riwayat Pangkat, Jabatan, Riwayat Gaji, Riwayat Sumpah, Updating Jatah Cuti, Pendidikan, Riwayat Keluarga, Mutasi Internal antar Fungsi) yang menjadi

tanggungjawabnya telah terlaksana serta dimutakhirkan secara akurat dan berkala melalui Aplikasi SIASN. Tersedianya dokumen perencanaan kinerja (Renstra / revisi renstra, perjanjian kinerja, rencana kerja tahunan) yang berorientasi hasil. terselesaikannya dokumen laporan kinerja yang menjadi tanggungjawabnya (bulanan, triwulan dan tahunan). Telah terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pengelola akuntabilitas kinerja.

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I	Realisasi TW II
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	10	40

Pada TW II realisasi mencapai 40 % disebabkan oleh terlaksana program berupa penegakkan disiplin, kode etik dan kode perilaku yang menjadi tanggungjawabnya disusun secara lengkap dan tepat waktu (Dokumen yg dimaksud adalah Dokumen Monev pelaporan disiplin, pelaporan apel dan upacara, monev cuti, penyusunan berkas disiplin. Pengembangan karir yang menjadi tanggungjawabnya telah terlaksana serta disusun secara lengkap dan tepat waktu (Dokumen yang dimaksud adalah dokumen pengangkatan atau pemberhentian dalam jabatan, dokumen peningkatan status CPNS ke PNS, dokumen usulan kenaikan pangkat atau jabatan, dokumen usulan promosi jabatan, dokumen usulan redistribusi pegawai, dokumen usulan mutasi eksternal, dokumen persiapan pelantikan JF & Pelantikan PNS, Dokumen pencatuman gelar, Dokumen pengelolaan JF). Pengelolaan kesejahteraan yang menjadi tanggungjawabnya disusun secara lengkap dan tepat waktu telah terlaksana (dokumen yang dimaksud adalah dokumen pembayaran tunjangan, dokumen pembayaran gaji, usul karpeg, karis, karsu, taspen, bpjs, KP4, KGB, dokumen monev tindak lanjut survey engagement, dokumen monev kesehatan mental pegawai, dokumen usulan surat penugasan). Data pegawai (Riwayat Penghargaan, Hukuman Disiplin, Riwayat Pangkat, Jabatan, Riwayat Gaji, Riwayat Sumpah, Updating Jatah

Cuti, Pendidikan, Riwayat Keluarga, Mutasi Internal antar Fungsi) yang menjadi tanggungjawabnya telah terlaksana serta dimutakhirkan secara akurat dan berkala melalui Aplikasi SIASN. Tersedianya dokumen perencanaan kinerja (Renstra / revisi renstra, perjanjian kinerja, rencana kerja tahunan) yang berorientasi hasil. Terselesaikannya dokumen laporan kinerja yang menjadi tanggungjawabnya (bulanan, triwulan dan tahunan). Telah terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pengelola akuntabilitas kinerja.

d. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	40	40	Perlu Upaya Keras 

Realisasi Rencana aksi RB tahunan dilaksanakan dengan sistem progres, sehingga pada triwulan II implementasi rencana aksi Reformasi di Loka POM di Kabupaten Bungo masih berada pada progress 40% sesuai dengan yang telah ditargetkan, tetapi untuk mencapai target tahunannya **Perlu Upaya Keras**.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Program Reformasi Birokrasi ini bisa terlaksanakan jika pimpinan memberikan pembinaan dalam pencapaian target masing-masing POJKA dari setiap SKP yang diberikan ke pegawai. Selain itu, ketua Reformasi Birokrasi juga harus rutin dalam memonitoring rapat evaluasi triwulan untuk memantau pencapaian rencana aksi reformasi birokrasi. Realisasi TW II baik dikarenakan target yang telah ditetapkan oleh tim dijalankan dengan baik oleh setiap petugas. Selain itu, penetapan rencana aksi RB didalam SKP pegawai menjadi faktor yang sangat penting dalam pencapaian target triwulan yang diselesaikan tepat waktu. Hal ini dikarakan, setiap pegawai

Loka POM di Kab. Bungo merasa memiliki tanggung jawab pribadi untuk dapat menyelesaikan program RB pada SKP masing-masing pegawai.

Kegagalan dalam pelaksanaan RB juga dapat terjadi karena masih rendahnya tingkat pemahaman penerapan RB pada level Loka POM. Hal ini dikarenakan belum ada target pasti dalam penerapan RB di wilayah UPT. Dalam hal ini, ketua RB telah melakukan penyusunan rencana RB terbaru sesuai dengan arahan pusat pada RB tematik dan RB general. Diharapkan pada TW selanjutnya pimpinan dan seluruh tim RB sudah dapat merencanakan penetapan untuk melaksanakan RB general dan tematik ini.

f. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pada evaluasi yang dilaksanakan melalui pemahaman pegawai Loka POM di Kab. Bungo masih terdapat satu orang petugas yang belum memahami terkait RB sehingga pada TW II ini untuk menunjang keberhasilan program kinerja RB maka dilaksanakan sosialisasi RB untuk meningkatkan pemahaman petugas terkait RB general dan tematik yang akan dilaksanakan selanjutnya. Setelah dilaksanakan sosialisasi akan dilaksanakan evaluasi pegawai terhadap tingkat pemahaman pegawai, sehingga dapat dipantau sampai sejauh mana tingkat pemahaman pegawai terhadap implelementasi RB di lingkungan Loka POM di Kab. Bungo.

Keberhasilan pencapaian program kinerja reformasi birokrasi tahun 2025 dapat dilakukan karena pimpinan unit yang telah memasukan program rencana aksi dari reformasi birokrasi dalam SKP masing-masing pegawai sehingga pegawai memiliki kesadaran dalam pencapaian masing-masing indikator kinerja UPT. Setelah pimpinan menetapkan SKP, pegawai harus memiliki peran aktif dan tanggung jawab yang tinggi untuk melaksanakan tugas perbaikan dalam reformasi birokrasi. Kegiatan ini akan dipantau oleh Ketua RB melalui whatsapp group. Selain itu, tim RB akan melaksanakan rapat pada awal tahun. Pelaksanaan rapat pada awal tahun dapat memantau kendala dan hambatan dalam pelaksanaan RB sehingga dapat disusun upaya pencegahan agar program tersebut tidak terlaksana.

Sebagai bukti pencapaian program kerja reformasi birokrasi masing-masing petugas akan mengupload dokumen pendukung ke link <https://bit.ly/rblokabungo2025>. Dengan pemantauan menggunakan link tersebut Ketua Tim RB dapat melihat POKJA mana yang belum melaksanakan kegiatan sesuai dengan POA yang telah ditetapkan diawal tahun.

Target implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kabupaten Bungo Tahun 2025 telah tercapai, dikarenakan data dukung dari pelaksanaan program kerja reformasi birokrasi telah dikumpulkan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing fungsi. Sehingga tidak ada kegiatan yang sudah dilaksanakan tetapi belum dilaporkan kepada Tim Reformasi Birokrasi.

3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II 2025

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi		Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum	
						Rencana Aksi yang Belum Selesai Timeline	
1	IKU 1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Belum dilakukan penyesuaian jadwal pengujian sampel regional	Melaksanakansampling sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2025 (note: pengujian dilaksanakan di BPOM di Jambi dan pengujian Regional yang di koordinir oleh BBPOM Pekanbaru	TW II 2025	Sampel disampling sesuai dengan perencanaan sampling yang sudah sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian tahun 2024, serta menyesuaikan jadwal pengujian untuk sampel regional		Jadwal pengujian sampel regional sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
2	IKU 1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Kurangnya koordinasi dengan BPOM Regionalisasi	Meningkatkan koordinasi dengan BPOM Regionalisasi	TW II 2025	Aktif berkomunikasi dengan Balai bersangkutan mengenai kemampuan uji serta ketersediaan reagen untuk pengujian jika terjadi perubahan terhadap perencanaan sampling		Koordinasi yang berkesinambungan antar sesama regional melalui WhatsApp Grup dan melakukan monev tiap triwulan

3	IKU 1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Pelaporan monitoring belum dilakukan secara rutin	Melakukan monitoring surat tindak lanjut yang dikirimkan pusat secara intensif di sarana sediaan farmasi yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo	TW II	Aktif melaksanakan monitoring disetiap sarana sediaan farmasi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo		Monitoring telah dilaksanakan
4	IKU 1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	tidak dilakukan sampling pada bulan februari dan maret dikarenakan adanya efisiensi. total target pangan olahan dan pirt seluruhnya diusulkan menjadi 5 sampel (10% dari darget awal).	mengusulkan penurunan target sampel menjadi 10%	menunggu keputusan penyesuaian target dari pusat	Pada triwulan 2 telah dilakukan penyesuaian renlak sampel dan dengan adanya relaksasi anggaran sehingga target kembali ke target awal dan rencana sampling telah dibagi ke bulan yang tersisa	-	Telah dilakukan relaksasi anggaran sehingga target kembali ke target awal dan rencana sampling telah dibagi ke bulan yang tersisa
5	IKU 2. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Belum dilakukan penyesuaian jadwal pengujian sampel regional	Melaksanakan sampling sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2025 (note: pengujian dilaksanakan di BPOM di Jambi dan pengujian Regional yang di koordinir oleh BBPOM Pekanbaru	TW II	Sampel disampling sesuai dengan perencanaan sampling yang sudah sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian tahun 2024, serta menyesuaikan jadwal pengujian untuk sampel regional		Jadwal pengujian sampel regional sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
6	IKU 2. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kurangnya koordinasi dengan BPOM Regionalisasi	Meningkatkan koordinasi dengan BPOM Regionalisasi	TW II	Aktif berkomunikasi dengan Balai bersangkutan mengenai kemampuan uji serta ketersediaan reagen untuk		Koordinasi yang berkesinambungan antar sesama regional

					pengujian jika terjadi perubahan terhadap perencanaan sampling			
7	IKU 2. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pelaporan belum dilakukan secara rutin	Melaporkan produk TMS pengujian dan label ke Badan POM pusat	TW II	Hingga TW II tidak ditemukan produk pangan olahan yang TMS			Pelaporan telah sesuai
8	IKU 3. Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Belum tercapainya IKU terkait KLB	Aktif melakukan koordinasi dengan lintas sektor setempat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo	-	Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait kasus kejadian luar biasa keracunan pangan	-	Desember	Tidak tercapai IKU terkait KLB
9	IKU 4. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	tidak dilakukan sampling pada bulan februari dan maret dikarenakan adanya efisiensi. total target pangan olahan dan pirt seluruhnya diusulkan menjadi 5 sampel (10% dari darget awal). target PIRT 1sampel.	mengusulkan penurunan target sampel menjadi 10%	menunggu keputusan penyesuaian target dari pusat	Penyesuaian renlak sampel kembali menjadi target awal 54 sampel (sampel pangan olahan 50 sampel dan PIRT 4 sampel)	-	-	Renlak sampel yang telah disusun berdasarkan target awal
10	IKU 5. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi	Masih sedikit pelaku usaha yang mengirimkan laporan perbaikan terhadap surat tindak lanjut yang diberikan, terutama untuk sarana	Melakukan monitoring dan evaluasi CAPA sesuai dengan timeline yang diberikan.	Juni	Membuat laporan monitoring dan evaluasi CAPA dari pelaku usaha untuk TW II	-	-	Terdapat 5 rekomendasi sudah ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dari total 21 rekomendasi yang diberikan.

	dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder	distribusi dan pelayanan kefarmasian						
11	IKU 5. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder	Belum ada feedback terhadap hasil pemeriksaan sarana distribusi yang sudah disampaikan kepada dinas kesehatan setempat	Koordinasi dengan dinas kesehatan setempat	TW II	Membuat link bersama terkait tindak lanjut yang bisa diakses oleh dinas kesehatan setempat, didalam link tersebut berisi surat tembusan hasil pemeriksaan sarana dan tabel tindak lanjut yg nantinya diisi oleh dinas kesehatan	Monitoring dan koordinasi link bersama terkait tindak lanjut yang bisa diakses oleh dinas kesehatan setempat	TW III	-
12	IKU 6. Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan menggunakan data monev menggunakan bit.ly	Penarikan data melalui SIPT dengan menyesuaikan pengisian monev di bit.ly	April	Sinkronisasi penggunaan data SIPT untuk melakukan monev telah dilaksanakan	-	-	Monev dilakukan telah sesuai
13	IKU 7. Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Masih banyak ditemukan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang belum menerapkan CDOB dan standar pengelolaan obat yang baik serta hamper disemua apotek menyerahkan antibiotika tanpa menggunakan resep dokter	Perlu diadakannya Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada penanggung jawab sarana pelayanan kefarmasian tentang Cara Pengelolaan Obat yang Baik di Sarana Pelayanan Kefarmasian dan Bimtek mengenai Antimicrobial Resistant (AMR)	TW II	Sudah diadakannya Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada penanggung jawab sarana pelayanan kefarmasian tentang Cara Pengelolaan Obat yang Baik di Sarana Pelayanan Kefarmasian dan Bimtek mengenai Antimicrobial Resistant (AMR)	Bimtek Pengelolaan Obat dan AMR	Juni	Bimbingan Teknis (Bimtek) telah dilaksanakan kepada penanggung jawab sarana pelayanan kefarmasian tentang Cara Pengelolaan Obat yang Baik di Sarana Pelayanan Kefarmasian dan

								Bimtek mengenai Antimicrobial Resistant (AMR)
14	IKU 8. Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Masih terdapat ketidaktepatan petugas dalam menginput hasil pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan melalui SIPT	Membuat laporan monitoring dan evaluasi hasil pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan	Sudah dievaluasi di akhir TW I	Membuat laporan monitoring dan evaluasi	-	-	Realisasi IKU pada TW I yaitu 86,67%, sudah mencapai target yang ditetapkan
15	IKU 8. Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Masih banyak ditemukan sarana distribusi pangan olahan terutama sarana ritel tradisional (grosir, warung, toko,dll) dan distributor pangan yang belum menerapkan Cara Ritel Pangan Olahan yang Baik serta masih banyak ditemukan pangan TMS terutama pangan rusak dan kadaluarsa.	Kegiatan intensifikasi pengawasan pangan dengan melibatkan lintas sektor, seperti intensifikasi Ramadhan dan menjelang Idul Fitri dan intensifikasi menjelang Natal dan Tahun Baru	Maret dan Desember	Kegiatan Intensifikasi Pangan Ramadhan dan Menjelang Idul Fitri 1446 H sudah dilaksanakan di Bulan Maret 2025	Kegiatan Intensifikasi Pengawasan Pangan Natal dan Tahun Baru	Desember	-
16	IKU 9. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Belum melakukan penyesuaian jadwal pengawasan iklan	Membuat jadwal pelaksanaan pengawasan iklan sesuai target yang telah ditentukan	TW II	Pengawasan iklan sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang ditentukan			Pengawasan iklan telah dilaksanakan sesuai target dan jadwal yang telah ditentukan

17	IKU 9. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Pelaksanaan belum sesuai pedoman/juknis	Melaksanakan pengawasan iklan sesuai pedoman/ juknis	TW II	Pengawasan iklan sesuai dengan pedoman/juknis			Pengawasan sesuai dengan pedoman/juknis
18	IKU 9. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Pelaporan yang belum tepat waktu	Melaksanaan pengawasan iklan dengan tepat waktu dengan mengingatkan petugas agar tidak lewat <i>timeline</i>	TW II	Pelaksanaan pengawasan iklan yang tepat waktu			Pengawasan iklan telah dilaporkan tepat waktu
19	IKU 10. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Pelaksanaan SRL obat tidak sesuai dengan target bulan	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian periode berikutnya	Juni 2025	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian periode berikutnya	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian periode berikutnya	September 2025	Pemenuhan nilai SKL dapat tercapai pada triwulan II
20	IKU 11. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo	Sudah terlaksananya KIE tatap muka dan Media social TW I sesuai perencanaan dan adanya Monitoring dan evaluasi kegiatan untuk TW I	Dilaksanakannya semua perencanaan yang sudah dibuat dan dimonitoring setiap ada kendala dan hambatan	Setiap triwulan	Sudah terlaksananya KIE tatap muka dan Media social TW II sesuai perencanaan dan adanya Monitoring dan evaluasi kegiatan untuk TW I	Melaksakan KIE Tatap Muka dan Media social TW II-IV	Pelaksanaan TW III dan TW IV	Terselenggaranya semua perencanaan KIE Tatap Muka dan Media tahun 2025 serta adanya monitoring dan evaluasi berkala.

21	IKU 12. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Efisiensi anggaran pada program ini, pada awal tahun hanya diberikan anggaran kurang lebih 1 juta, sehingga tidak mungkin untuk dijalankan dengan optimal mengingat kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan banyak masyarakat dan lintas sektor. Selain itu, keterbatasan teknologi dan sinyal untuk sekolah yang berada di kabupaten juga menjadi kendala yang sangat besar untuk program ini dijalankan secara daring	Akan dilaksanakan tahapan kegiatan selanjutnya pada TW III dan IV sesuai perencanaan	Triwulan III dan IV	Telah dilaksanakannya kegiatan Advokasi Sekolah Pangan Aman, Sosialisasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dan Bimbingan Teknis Kader Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan. Dan masih belum dibukanya anggaran yang terblokir	Akan dilaksanakan tahapan selanjutnya dari Kegiatan Sekolah yang melaksanakan kegiatan pembudayaan keamanan pangan	Triwulan III dan IV	Tercapainya seluruh tahapan dari kegiatan Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.
						1. Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan Keamanan Pangan		
						1. Pengawasan sekolah yang sebelumnya telah diintervensi.		
22	IKU 12. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Penundaan jadwal kegiatan dikarenakan adanya PSU Kepala Daerah	Pelaksanaan kegiatan segera setelah Penetapan Kepala Daerah pada bulan Mei 2025	Mei 2025	Koordinasi / Rapat awal pembahasan kegiatan dengan perangkat daerah	-	-	Telah melaksanakan advokasi kegiatan di Bulan Mei 2025

23	IKU 13. Jumlah Desa Pangan Aman	Efisiensi anggaran pada program ini, pada awal tahun hanya diberikan anggaran kurang lebih 6 juta, sehingga tidak mungkin untuk dijalankan dengan optimal mengingat kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan banyak masyarakat dan lintas sektor. Selain itu, keterbatasan teknologi dan sinyal untuk Desa yang berada di kabupaten juga menjadi kendala yang sangat besar untuk program ini dijalankan secara daring	Akan dilaksanakan tahapan kegiatan selanjutnya pada TW III dan IV sesuai perencanaan	Triwulan III dan IV	Telah dilaksanakannya kegiatan Advokasi Desa Pangan Aman, dan Bimbingan Teknis Kader Desa Pangan Aman. Dan masih belum dibukanya anggaran yang terblokir	Akan dilaksanakan tahapan selanjutnya dari Kegiatan Desa Pangan Aman. - Pengawasan Keamanan Pangan Desa - Lomba Desa Pangan Aman yang akan diikuti oleh desa yang telah diintervensi sebelumnya.	Triwulan III dan IV	Tercapainya seluruh tahapan dari kegiatan Desa Pangan Aman
24	IKU 13. Jumlah Desa Pangan Aman	Penundaan jadwal kegiatan dikarenakan adanya PSU Kepala Daerah	Pelaksanaan kegiatan segera setelah Penetapan Kepala Daerah pada bulan Mei 2025	Mei 2025	Koordinasi / Rapat awal pembahasan kegiatan dengan perangkat daerah	-	-	Telah melaksanakan advokasi kegiatan di Bulan Mei 2025
25	IKU 14. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Efisiensi anggaran pada program ini, pada awal tahun hanya diberikan anggaran kurang lebih 3 juta, sehingga tidak mungkin untuk dijalankan dengan optimal	Akan dilaksanakan tahapan kegiatan selanjutnya pada TW III dan IV sesuai perencanaan	Triwulan III dan IV	Telah dilaksanakannya kegiatan Advokasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Bimbingan Teknis Kader Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Akan dilaksanakan tahapan selanjutnya dari Pasar Pangan	Triwulan III dan IV	Tercapainya seluruh tahapan dari kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

		mengingat kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan banyak masyarakat dan lintas sektor. Selain itu, keterbatasan teknologi dan sinyal untuk Pasar yang berada di kabupaten juga menjadi kendala yang sangat besar untuk program ini dijalankan secara daring			Dan masih belum dibukanya anggaran yang terblokir	Aman Berbasis Komunitas		
						- Sosialisasi Keamanan Pangan di Pasar		
						- Pengawasan Keamanan Pangan di Pasar		
26	IKU 14. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Efisiensi anggaran pada program ini, pada awal tahun hanya diberikan anggaran kurang lebih 3 juta, sehingga tidak mungkin untuk dijalankan dengan optimal mengingat kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan banyak masyarakat dan lintas sektor. Selain itu, keterbatasan teknologi dan sinyal untuk Pasar yang berada di kabupaten juga menjadi kendala yang sangat besar	- Pelaksanaan kegiatan secara daring dengan risiko efektifitas kegiatan yang belum optimal - Pengajuan penambahan anggaran	Triwulan 2	Koordinasi / Rapat awal pembahasan kegiatan dengan perangkat daerah	-	-	Telah melaksanakan advokasi kegiatan di Bulan Mei 2025

		untuk program ini dijalankan secara daring						
27	IKU 15. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Blokir anggaran yang telah dibuka tidak pada indikator ini, sehingga tetap masih ada efisiensi anggaran sebesar 87,94% pada indikator kegiatan ini, kegiatan 80% dialihkan secara daring, sedangkan pendampingan UMKM dimana mayoritas pelaku usaha tidak paham teknologi sehingga pendampingan UMKM tidak efektif	Mengusulkan penambahan anggaran / pembukaan blokir untuk indikator ini	Triwulan III,IV	Maksimal kegiatan secara daring dan pendampingan UMKM secara daring, serta memanfaatkan layanan MPP di Kabupaten Bungo	- mengusulkan penambahan anggaran - untuk saat ini subsidi silang anggaran dengan indikator sertifikasi dan tindak lanjut untuk memenuhi capaian indikator ini	Triwulan III dan IV	Proses
28	IKU 16. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo	Anggaran SBK penindakan diblokir	Pengajuan penambahan anggaran	Triwulan II Tahun 2025	Penyusunan TOR dan KAK pembukaan blokir RO QCD	-	-	-
29	IKU 16. Persentase Keberhasilan Penyidikan	Terbit SPDP tanggal 14 Maret 2025	Penyerahan SPDP kepada Terlapor/Tersangka, Korwas PPNS dan	20 Maret 2025	Penyampaian SPDP kepada pihak terkait sebelum timeline habis	-	-	SPDP disampaikan sesuai dengan timeline

	Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo		Kejaksaan Negeri secepatnya					
30	IKU 16. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo	Telah koordinasi aktif dengan CJS tetapi belum maksimal ekspos melalui media	Melakukan ekspos melalui media atau konferensi pers terhadap kasus yang ditangani	Trwiulan I Tahun 2025	Melakukan Konferensi Pers terkait kasus Obat-Obat Tertentu di Wilayah Kabupaten Merangin bertempat di Polres Merangin pada tanggal 18 Maret 2025	-	-	Konferensi Pers kasus yang ditangani sudah dilaksanakan
31	IKU 16. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo	Peningkatan kompetensi staff penindakan terkait operasi penindakan dan penanganan berkas perkara	Mengikuti peningkatan kompetensi yang diadakan oleh BPOM RI baik secara daring maupun luring	Hingga akhir Tahun 2025	Mengikuti peningkatan kompetensi yang diadakan oleh BPOM RI baik secara daring maupun luring jika anggaran memungkinkan	Mengikuti peningkatan kompetensi yang diadakan oleh BPOM RI baik secara daring maupun luring jika anggaran memungkinkan	Hingga akhir Tahun 2025	-
32	IKU 17. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan	Peningkatan kompetensi staff penindakan terkait Deteksi Kejahatan Di Bidang	Mengikuti peningkatan kompetensi yang diadakan	Hingga akhir	Mengikuti peningkatan kompetensi yang diadakan oleh BPOM RI baik secara	Mengikuti peningkatan kompetensi yang	Hingga akhir	Mengikuti peningkatan kompetensi yang

	Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Efektif di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo	oleh BPOM RI baik secara daring maupun luring	Tahun 2025	daring maupun luring jika anggaran memungkinkan	diadakan oleh BPOM RI baik secara daring maupun luring jika anggaran memungkinkan	Tahun 2025	diadakan oleh BPOM RI baik secara daring maupun luring
33	IKU 17. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Adanya penggalangan komitmen terkait Deteksi Kejahatan Di Bidang Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Efektif di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo	Mengadakan kegiatan penggalangan terkait Deteksi Kejahatan Di Bidang Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Efektif di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo	Triwulan II Tahun 2025	Menjalin Komunikasi dengan CJS terkait rencana pelaksanaan Penggalangan	Pelaksanaan kegiatan penggalangan Bungo	Triwulan II Tahun 2025	Mengadakan kegiatan penggalangan terkait Deteksi Kejahatan Di Bidang Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Efektif di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo
34	IKU 18. Indeks Pelayanan Publik Loka POM di Kabupaten Bungo Tahun	Belum dilaksanakan penilaian IPP sesuai dengan arahan pusat	Pemenuhan bertahap data dukung IPP berdasarkan penilaian tahun sebelumnya	Triwulan III	-Membentuk TIM Penilaian IPP periode tahun 2025	-Membentuk Target Rencana Kegiatan dan pemenuhan penilaian IPP Periode Tahun 2025	Triwulan III	Belum terdapat penilaian dan evaluasi IPP
35	IKU 19. Nilai AKIP UPT BPOM	Renstra tahun 2020-2024 belum menjelaskan bahwa keberhasilan pencapaian tujuan diukur dengan	Memastikan Renstra telah menyajikan penjelasan bahwa keberhasilan pencapaian tujuan diukur	April 2025	Sudah mencantumkan matriks pemetaan misi, tujuan, sasaran strategis, indikator, kebijakan dan startegi pada	-	-	Penyajian sudah terdapat Matriks pemetaan misi, tujuan, sasaran

		pencapaian indikator sasaran (belum didukung Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan dan Strategi);	dengan pencapaian indikator sasaran dan didukung dengan Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan dan Strategi;		renstra Loka POM Kabupaten Bungo 2025-2029			strategis, indikator, kebijakan dan startegi pada renstra Loka POM Kabupaten Bungo 2025-2029
36	IKU 19. Nilai AKIP UPT BPOM	Matriks reviu target tahun 2024 belum diformalkan dan belum mencantumkan justifikasi yang memadai untuk target yang lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya	Melakukan penyusunan review target indikator dilengkapi dengan jsutifikasi yang memadai terkait target lebih rendah dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya dan diformalkan oleh Kepala Loka	April 2025	Sudah disusunnya review target indikator dilengkapi dengan jsutifikasi yang memadai terkait target lebih rendah dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya dan diformalkan oleh Kepala Loka	-	-	Matriks Review target tahun 2024 sudah diformalkan dan telah mencantumkan justifikasi yang memadai untuk target yang lebih rebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya
37	IKU 19. Nilai AKIP UPT BPOM	Perbedaan penyajian target triwulan II tahun 2024 pada SIMETRIS, SKP Pimpinan, RAPK, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja Interim	Memastikan keselarasan penyajian target indikator kinerja pada dokumen SAKIP	April 2025	Memastikan keselarasan penyajian target indikator kinerja pada dokumen SAKIP	-	-	Telah selarasnya penyajian target indikator kinerja pada dokumen SAKIP
38	IKU 19. Nilai AKIP UPT BPOM	RKT Tahun 2024 belum dipublikasikan pada subsite Satuan Kerja	Mempublikasikan seluruh dokumen perencanaan SAKIP pada subsite Satuan Kerja	April 2025	Melakukan publikasi seluruh dokumen perencanaan SAKIP pada subsite bungo.pom.go.id	-	-	Dokuemen perencanaan SAKIP sudah dipublikasi

								pada subsite.pom.go.id
39	IKU 19. Nilai AKIP UPT BPOM	Penyusunan SOP Mikro Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran	Menyempurnakan SOP Mikro Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran	April 2025	Melakukan revisi untuk menyempurnakan SOP Mikro Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran terkait data kinerja	-	-	SOP Mikro Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran telah direvisi
40	IKU 19. Nilai AKIP UPT BPOM	Notulen rapat evaluasi internal pada Laporan Evaluasi Internal Triwulan I s.d III Tahun 2024 belum menyajikan arahan pimpinan terkait pengukuran dan/atau pencapaian kinerja	Menyusun notulen rapat evaluasi internal dengan menyajikan arahan pimpinan terkait pengukuran dan/atau pencapaian kinerja;	Hingga akhir 2025	Memperbaiki notulensi rapat evaluasi internal dengan menyajikan arahan pimpinan terkait pengukuran dan/atau pencapaian kinerja	Memperbaiki notulensi rapat evaluasi internal dengan menyajikan arahan pimpinan terkait pengukuran dan/atau pencapaian kinerja	Triwulan II	-
41	IKU 19. Nilai AKIP UPT BPOM	Perbedaan penyajian realisasi pada aplikasi SIMETRIS, SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja	Memastikan keselarasan penyajian rencana tindak lanjut/rencana aksi pada aplikasi SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal (LEI), dan Laporan Kinerja Interim;	April 2025	Membuat satu data internal pelaporan sebagai sumber data dalam pelaporan simetris, SKP, laporan evaluasi internal dan laporan interim yang dibuat oleh masing-masing PIC terkait	-	-	Telah dibuat data internal sebagai sumber data dalam pelaporan Simetris

42	IKU 19. Nilai AKIP UPT BPOM	SK Program Peningkatan Kinerja, Penerapan Budaya Pelayanan Prima dan Perilaku Hidup Sehat di Lingkungan Loka POM sebagai dasar pemberian reward belum memuat kriteria/parameter penilaian dan pembobotan	Menyempurnakan SK Program Peningkatan Kinerja, Penerapan Budaya Pelayanan Prima dan Perilaku Hidup Sehat di Lingkungan Loka POM dengan memuat kriteria/parameter penilaian dan pembobotan pemberian penghargaan/reward	April 2025	Membuat pembaruan SK dengan melengkapi kriteria dan parameter penilaian pembobotan pemberian penghargaan/reward			Telah terdapat SK dengan melengkapi kriteria dan parameter penilaian pembobotan pemberian penghargaan/reward
43	IKU 19. Nilai AKIP UPT BPOM	Kendala dan Rencana Tindak Lanjut pada aplikasi SIMETRIS tidak diisi secara tertib	Melakukan pengisian Kendala dan Rencana Tindak Lanjut pada aplikasi SIMETRIS secara tertib	Januari 2025	Telah melakukan pengisian Kendala dan Rencana Tindak Lanjut pada aplikasi SIMETRIS secara tertib	-	-	Telah dilakukan pengisian Kendala dan Rencana Tindak Lanjut pada aplikasi SIMETRIS secara tertib
44	IKU 19. Nilai AKIP UPT BPOM	Laporan Kinerja Interim triwulan I s.d III tahun 2024 (Bab II Perencanaan Kinerja) belum menyajikan informasi terkait adanya penambahan indikator kinerja pada tahun 2024	Menyusun Laporan Kinerja Interim dengan terkait dengan penambahan indikator	Januari 2025	telah menyusun laporan kinerja tahun 2024 dengan menyajikan penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja selama tahun 2024	-	-	Laporan kinerja tahun 2024 sudah menyajikan penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja
45	IKU 19. Nilai AKIP UPT BPOM	Beberapa personil Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan	Merencanakan pengembangan kompetensi personil Tim	April 2025	Membuat perencanaan dan melakukan monitoring pengembangan kompetensi	Masih terdapat sebagian besar Tim Monev yang	Akhir tahun 2025	-

		Kegiatan belum mengikuti pelatihan terkait implementasi SAKIP	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan terkait implementasi SAKIP		personil Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan terkait implementasi SAKIP	belum update mengikuti pelatihan terkait SAKIP di tahun 2025
46	IKU 19. Nilai AKIP UPT BPOM	Laporan Evaluasi Internal sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP BPOM belum menyajikan: - Evaluasi atas Pelaksanaan Program/Kegiatan terkait analisis capaian target output beserta identifikasi kendala/hambatan, rencana tindak lanjutnya; - Rencana aksi dengan timeline yang memadai/memudahkan proses pemantauan/monitoring sehingga evaluasi internal optimal; - Identifikasi kendala/penyebab atas kegagalan pencapaian target secara memadai	Menyusun Laporan Evaluasi Internal sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP BPOM	Januari 2025	Melakukan penyusunan Laporan Evaluasi Internal sesuai pedoman	Laporan Evaluasi Internal telah sesuai pedoman

47	IKU 20. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Adanya blokir anggaran dalam rangka efisiensi	Melakukan revisi terhadap anggaran yang diblokir	Triwulan I	Melakukan efisiensi pemanfaatan anggaran efektif, menyusun perubahan strategi pelaksanaan kegiatan	-	-	pemanfaatan anggaran secara efektif, sudah dilakukan perubahan strategi pelaksanaan kegiatan
48	IKU 21. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Nilai Indeks Manajemen Risiko Tahun 2024 adalah 2,5	Melakukan identifikasi risiko secara komprehensif dengan mempertimbangkan capaian target kinerja tahun sebelumnya serta mempertimbangkan seluruh isu internal dan eksternal dan Mengidentifikasi risiko atas seluruh program/inovasi baru yang dilaksanakan Unit Kerja dan melaporkan Manajemen Risiko tepat waktu	Januari Tahun 2025	Pelaporan manajemen risiko tepat waktu di aplikasi SAPA APIP	-	-	Sudah melaporkan manajemen risiko secara tepat waktu
49	IKU 21. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Nilai Indeks Manajemen Risiko Tahun 2024 adalah 2,5	Menyusun uraian tugas pada SKP dan MPH untuk seluruh pegawai yang menangani manajemen risiko	Triwulan I Tahun 2025	Penetapan SKP masing-masing pegawai yang terlibat dengan menambahkan RHK Manajemen Risiko	-	-	Penetapan SKP masing-masing pegawai terkait RHK Manajemen Risiko

50	IKU 22. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	Telah dilaksanakan Pembuatan Rencana Aksi RB, tetapi karena penetapan awal tahun terdapat pembulatan angka sehingga hasil target capaian cukup besar	Akan dilaksanakannya program target RB sesuai timeline	Triwulan III - IV	Program berupa penegakkan disiplin, kode etik dan kode perilaku yang menjadi tanggungjawabnya disusun secara lengkap dan tepat waktu (Dokumen yg dimaksud adalah Dokumen Monev pelaporan disiplin, pelaporan apel dan upacara, monev cuti, penyusunan berkas disiplin. Pengembangan karir yang menjadi tanggungjawabnya telah terlaksana serta disusun secara lengkap dan tepat waktu (Dokumen yang dimaksud adalah dokumen pengangkatan atau pemberhentian dalam jabatan, dokumen peningkatan status CPNS ke PNS, dokumen usulan kenaikan pangkat atau jabatan, dokumen usulan promosi jabatan, dokumen usulan redistribusi pegawai, dokumen usulan mutasi eksternal, dokumen persiapan pelantikan JF & Pelantikan	1. Rapat Rutin POKJA Reformasi dan Birokrasi 2. Monitoring dan Evaluasi pencapaian program setiap masing-masing POKJA dengan Pimpinan Unit Kerja 3. Membuat link untuk pengumpulan data setiap POKJA 4. Melaksanakan kegiatan peningkatan pengetahuan reformasi birokrasi	2025 TW I, II, III dan IV Februari 2025 2025	1. Membentuk SK Tim RB 2. Menetapkan Target Rencana Aksi Pada Tahun 2025 3. Membagi Target dalam SKP masing-masing pegawai
----	---	--	--	-------------------	---	--	---	--

PNS, Dokumen pencatuman gelar, Dokumen pengelolaan JF). Pengelolaan kesejahteraan yang menjadi tanggungjawabnya disusun secara lengkap dan tepat waktu telah terlaksana (dokumen yang dimaksud adalah dokumen pembayaran tukin, dokumen pembayaran gaji, usul karpeg, karis, karsu, taspen, bpjs, KP4, KGB, dokumen monev tindakan lanjut survey engagement, dokumen monev kesehatan mental pegawai, dokumen usulan surat penugasan). Data pegawai (Riwayat Penghargaan, Hukuman Disiplin, Riwayat Pangkat, Jabatan, Riwayat Gaji, Riwayat Sumpah, Updating Jatah Cuti, Pendidikan, Riwayat Keluarga, Mutasi Internal antar Fungsi) yang menjadi tanggungjawabnya telah terlaksana serta

dimutakhirkan secara akurat dan berkala melalui Aplikasi SIASN. Tersedianya dokumen perencanaan kinerja (Renstra / revisi rentra, perjanjian kinerja, rencana kerja tahunan) yang berorientasi hasil.

Terselesaikannya dokumen laporan kinerja yang menjadi tanggungjawabnya (bulanan, triwulan dan tahunan). Telah terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pengelola akuntabilitas kinerja.

3.3 REALISASI ANGGARAN

A. Realisasi Anggaran

Anggaran Loka POM di Kabupaten Bungo bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2025 No. 063.01.2.690923/2025 tanggal 02 Desember 2024 dengan Pagu Awal sebesar Rp. 3.572.436.000 (Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).

Pada triwulan I dilaksanakan revisi DIPA sebanyak 3 (tiga) kali dengan dilakukan revisi DJA yang pertama pada tanggal 14 Februari 2025 melakukan pemblokiran secara mandiri dengan mencantumkan kode blokir “A” (Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya) pada Aplikasi SAKTI sebesar Rp. 1.644.940.000,-, selanjutnya revisi DJA yang kedua Realokasi Penambahan Anggaran dari satker lain untuk PPNPN pada tanggal 12 Maret 2025 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta rupiah) sehingga pagu Loka POM Bungo menjadi Rp. 3.602.436.000 (Tiga Miliar Enam Ratus Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dan pada tanggal 26 Maret 2025 melakukan revisi DIPA DJA Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025 dapat Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025 sebesar Rp. 425.038.000,- (Empat ratus dua puluh lima juta tiga puluh delapan ribu rupiah) dan pada tanggal 30 juni 2025 pengajuan Revisi DIPA DJA perihal Usulan Revisi Anggaran Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Belanja Pegawai Existing dan Anggaran CASN TA 2025 sebesar 137.277.000,- (Seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah)

Realisasi anggaran Loka POM di Kabupaten Bungo sampai dengan triwulan II tahun 2025 mencapai Rp1.466.231.197 (satu milyar empat ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) atau mencapai **51.64 %** dari total pagu **anggaran tidak termasuk** anggran blokir Rp.2,839,571,000 (dua milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan mencapai **39.21%** dari total pagu **anggaran termasuk anggran blokir** Rp. 3,739,713,000 (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).

Pengelolaan anggaran Loka POM di Bungo senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Bungo dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi anggaran secara berkala

- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan
- Percepatan pengadaan barang dan jasa
- Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD.

Selama periode berjalan, Loka POM di Kabupaten Bungo telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program *Automatic Adjustment* dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Revisi tersebut sebagai berikut:

1. Revisi Dipa DJA pada tanggal 14 Februari 2025
Perihal : Penyampaian Revisi Efisiensi Belanja BPOM Tahun Anggaran 2025
Jenis Revisi
306 Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV .A (Blokir)
2. Revisi Dipa DJA pada tanggal 18 Maret 2025
Perihal : Usulan Revisi DIPA Satuan Kerja Badan POM ke-2 Kewenangan Direktorat Jenderal anggaran TA 2025
Jenis Revisi
211 Pemenuhan Belanja Operasional
221 Pergeseran Anggaran Antarjenis Belanja
239 Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya
306 Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV .A (Blokir)
315 Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
3. Revisi Dipa DJA pada tanggal 26 Maret 2025
Perihal : Usulan Revisi DIPA Satuan Kerja Badan POM ke-3 Kewenangan Direktorat Jenderal anggaran TA 2025
Jenis Revisi
306 Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV .A (Blokir)
4. Revisi Dipa Kanwil pada tanggal 22 April 2025
Perihal : Usulan Revisi Anggaran
Jenis Revisi
315 Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
325 Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK
5. Revisi Dipa KPA pada tanggal 2 Mei 2025

Perihal : Usulan Revisi Anggaran

Jenis Revisi

Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK

6. Revisi DIPA KPA pada tanggal 6 Mei 2025

Perihal : Usulan Revisi Anggaran

Jenis Revisi

Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK

7. Revisi DIPA KPA pada tanggal 12 Juni 2025

Perihal : Usulan Revisi Anggaran

Jenis Revisi

Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK

8. Revisi DIPA KPA pada tanggal 20 Juni 2025

Perihal : Usulan Revisi Anggaran

Jenis Revisi

Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK

B. Realisasi Anggaran per Sasaran

Berikut ini tabel rincian realisasi anggaran tiap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja :

Tabel 20. Rincian realisasi anggaran tiap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Output (Kinerja)			Input (Anggaran)		
				Target	Realisasi TW II	Capaian (%)	Target	Realisasi TW II	Capaian (%)
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT					111,87			26,59
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78,5	99,90	127,25	81.008.500	13.219.666	16,32
2		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	86,36	115,15	81.008.500	13.219.666	16,32	
3		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji ssesuai standar oleh UPT	100	0	0	28.259.250	4.322.860	15,30	

4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	92,5	123,33	56.518.500	8.645.720	15,30
5	Persentase keputusan/rekomen dari hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72	26,14	36,31	35.295.600	11.638.600	32,97
6	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	70	96,7	138,10	35.295.600	11.638.600	32,97
7	Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75	100	115,27	35.295.600	11.638.600	32,97
8	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	97,5	121,88	35.295.600	11.638.600	32,97
9	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83,19	97,91	117,70	35.295.600	11.638.600	32,97
Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT				98,87			15,30
10	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,5	11,37	98,87	28.259.250	4.322.860	15,30
Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT				101,02			8,19
11	Tingkat Efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	86,83	87,72	101,02	92.941.000	6.022.850	6,48

12	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	75	0,00	8.875.000	777.850	8,76
13	Jumlah desa pangan aman	1	50	0,00	8.875.000	777.850	8,76
14	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	50	0,00	7.100.000	622.280	8,76

4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT				64,33		1,07
----------	--	--	--	--	--------------	--	-------------

4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	15	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	85,5	55	64,33	372.105.000	3.970.000	1,07
---	--	----	---	------	----	-------	-------------	-----------	------

5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT				107,53		33,51
----------	---	--	--	--	---------------	--	--------------

5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	16	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	93	100	107,53	80.651.500	27.027.500	33,51
---	--	----	---	----	-----	--------	------------	------------	-------

6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT				50,92		33,51
----------	--	--	--	--	--------------	--	--------------

6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	17	Persentase Laporan Analisis Kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	45,83	50,92	80.651.500	27.027.500	33,51
---	---	----	--	----	-------	-------	------------	------------	-------

7	Layanan Publik UPT yang prima				0		56,63
----------	--------------------------------------	--	--	--	----------	--	--------------

7	Layanan Publik UPT yang prima	18	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,4	0	0,00	306.000.000	173.291.898	56,63
---	-------------------------------	----	-----------------------------	-----	---	------	-------------	-------------	-------

8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal					40			8,76
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	19	Nilai AKIP UPT BPOM	78,39	0	0,00	876.772.000	330.106.310	37,65
20		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	0	0,00	657.579.000	247.579.733	37,65	
21		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,55	0	0,00	657.579.000	247.579.733	37,65	
22		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	40	40,00	1.775.000	155.570	8,76	

Realisasi anggaran berdasarkan Sasaran Strategis tersaji pada tabel di atas. Dapat terlihat bahwa pada masing-masing sasaran strategis persentase realisasi anggaran paling tinggi pada 56,63% terkait Layanan Publik UPT yang prima. Sasaran Strategis lainnya penggunaan anggaran dibawah 40%, hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran pada triwulan I 2025, yang kemudian dibuka blokir anggaran pada beberapa di triwulan II 2025. Hal ini masih terus berprogress dalam penggunaan sumber daya. Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Bungo senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut adalah tabel realisasi anggaran terhadap kegiatan

No	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Kinerja/Fisik			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Target
a	b	c	d	e	f (e/d*100)	g	h	i (h/g*100)
1	3165.AEA - Koordinasi	001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	1	8%	58.000.000	4.728.000	8,15
2	3165.BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	4	3	75%	17.862.000	5.245.000	29,36
3	3165.BDC - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	95	55	58%	66.204.000	4.240.000	6,40
4	3165.BKB - Pemantauan produk	001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	0	50%	141.000.000	18.744.898	13,29

5	3165.BMB - Komunikasi Publik	001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	24	13	56%	35.500.000	3.111.400	8,76
6	3165.CAB - Sarana Bidang Kesehatan	001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1	100%	100.000.000	91.897.000	91,90
7	3165.CAN - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	4	4	100%	65.000.000	64.550.000	99,31
8	3165.PDD - Standarisasi Lembaga	001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	0	17%	113.037.000	32.689.440	28,92
9	3165.QCD - Perkara Hukum Badan Usaha	U25 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN BUNGO	1	1	100%	103.303.000	65.951.000	63,84
10	3165.QDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2	0	75%	90.970.000	10.550.000	11,60
11	3165.QDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	002 - Desa Pangan Aman	1	0	25%	146.795.000	6.970.000	4,75
12	3165.QDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	0	25%	94.865.000	11.009.000	11,60
13	3165.QDG - Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	5	1	55%	39.475.000	4.650.000	11,78
14	3165.QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	54	18	46%	47.517.000	21.884.761	46,06
15	3165.QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	250	70	28%	114.500.000	23.238.945	20,30

16	3165.QIC - Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	17	12	71%	10.534.000	6.070.000	57,62
17	3165.QIC - Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	230	131	53%	165.944.000	88.086.000	53,08
18	6384.EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN	1	0	2%	8.000.000	-	0,00
19	6384.EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran	1	0	50%	2.183.930.000	1.002.615.753	45,91

C. Efisiensi dan Efektivitas atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja per Sasaran

Berikut tabel Analisis Efisiensi Kegiatan pada tiap Sasaran Strategis dan Indikator Utama Kinerja:

Tabel 21. Nilai Indeks Efisiensi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Output (Kinerja)			Input (Anggaran)			Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori Capaian		
		Target	Realisasi TW I	Capaian (%)	Target	Realisasi TW I	Capaian (%)					
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT				111,87		26,59	4,2	3,2	>1,81 75% Tidak Efisien		
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78,5	99,90	127,25	81.008.500	13.219.666	16,32	7,79	6,79	>1,81 75% Tidak Efisien
		2	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	86,36	115,15	81.008.500	13.219.666	16,32	7,05	6,05	>1,81 75% Tidak Efisien
		3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji ssesuai standar oleh UPT	100	0	0	28.259.250	4.322.860	15,30	0	-1	<0 Tidak Efisien (Tidak masuk perhitungan NKO)

	4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	92,5	123,33	56.518.500	8.645.720	15,30	8,06	7,06	>1,81 75% Tidak Efisien	
	5	Persentase keputusan/reko mendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72	26,14	36,31	35.295.600	11.638.600	32,97	1,10	0,1	0-0,2 100% Efisien	
	6	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	70	96,7	138,10	35.295.600	11.638.600	32,97	4,18	3,18	>1,81 75% Tidak Efisien	
	7	Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75	100	115,27	35.295.600	11.638.600	32,97	3,49	2,49	>1,81 75% Tidak Efisien	
	8	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	97,5	121,88	35.295.600	11.638.600	32,97	3,69	2,69	>1,81 75% Tidak Efisien	
	9	Peresentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83,19	97,91	117,70	35.295.600	11.638.600	32,97	3,56	2,56	>1,81 75% Tidak Efisien	
2	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT					98,87		15,30	6,46	5,46	>1,81 75% Tidak Efisien	
2	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	10	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,5	11,37	98,87	28.259.250	4.322.860	15,30	6,46	5,46	>1,81 75% Tidak Efisien
3	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT					101,02		8,19	12,33	11,33	>1,81 75% Tidak Efisien	
3	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	11	Tingkat Efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan diwilayah kerja UPT	86,83	87,72	101,02	92.941.000	6.022.850	6,48	15,58	14,58	>1,81 75% Tidak Efisien

	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	12	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	75	0,00	8.875.000	777.850	8,76	0	-1	<0 Tidak Efisien
	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	13	Jumlah desa pangan aman	1	50	0,00	8.875.000	777.850	8,76	0	-1	<0 Tidak Efisien
	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	50	0,00	7.100.000	622.280	8,76	0	-1	<0 Tidak Efisien
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT					64,33			1,07	60,12	59,12	>1,81 75% Tidak Efisien
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	15	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	85,5	55	64,33	372.105.000	3.970.000	1,07	60,12	59,12	>1,81 75% Tidak Efisien
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT					107,53			33,51	3,2	2,2	>1,81 75% Tidak Efisien
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	16	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	93	100	107,53	80.651.500	27.027.500	33,51	3,2	2,2	>1,81 75% Tidak Efisien
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT					50,92			33,51	1,51	0,51	0,41-0,6 92% Efisien
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	17	Persentase Laporan Analisis Kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	45,83	50,92	80.651.500	27.027.500	33,51	1,51	0,51	0,41-0,6 92% Efisien
7	Layanan Publik UPT yang prima					0			56,63	0	-1	<0 Tidak Efisien
7	Layanan Publik UPT yang prima	18	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,4	0	0,00	306.000.000	173.291.898	56,63	0	-1	<0 Tidak Efisien
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal					40			8,76	4,56	3,56	>1,81 75% Tidak Efisien

8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	19	Nilai AKIP UPT BPOM	78,39	0	0,00	876.772.000	330.106.310	37,65	0	-1	<0 Tidak Efisien
		20	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	0	0,00	657.579.000	247.579.733	37,65	0	-1	<0 Tidak Efisien
		21	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,55	0	0,00	657.579.000	247.579.733	37,65	0	-1	<0 Tidak Efisien
		22	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	40	40,00	1.775.000	155.570	8,76	4,56	3,56	>1,81 75% Tidak Efisien

Pada triwulan II Tahun 2025 di antara 8 Sasaran Strategis, terdapat 6 Sasaran Strategis kategori 75% Tidak Efisien, 1 Sasaran Strategis Tidak Efisien, dan 1 Sasaran Strategis 92% Efisien.

Analisa untuk tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian Sasaran Strategis adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis “Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo” dengan capaian anggaran sebesar 26,59% sedangkan capaian kinerja sebesar 111,87% dengan hasil TE 3,2 dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran strategis ini >75 Tidak Efisien, hal ini dikarenakan adanya blokir anggaran sehingga penggunaan anggaran tidak maksimal.
 - IKU 1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa %capaian output 127,25% dan %capaian anggaran yaitu 1,81 % dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya pada IKU ini >75 Tidak Efisien dengan hasil indeks efisiensi (IE) sebesar 7,79 dengan tingkat efisiensi (TE) 6,79. Hal ini disebabkan karena adanya relaksasi anggaran pada triwulan II dan sampling dengan target awal baru dimulai pada bulan Mei 2025.
 - IKU 2. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa %capaian output 115,15% dan %capaian anggaran yaitu 16,32 % dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya pada IKU ini >75 Tidak Efisien dengan hasil indeks efisiensi (IE) sebesar 7,05 dengan tingkat efisiensi (TE) 6,05. Hal ini disebabkan karena adanya blokir anggaran dalam rangka efisiensi,

sehingga kegiatan yang bisa dilaksanakan di triwulan II yaitu pada bulan Mei-juni 2025 sesuai renlak relaksasi, namun tidak dilakukan sampling pada bulan april dikarenakan adanya efisiensi. Total target pangan seluruhnya dikembalikan seperti target awal yaitu 54 sampel (50 Sampel Pangan Olahan dan 4 Sampel PIRT), sehingga total target pangan olahan di triwulan II disesuaikan dengan rencana pelaksanaan yang sebelumnya tidak dilaksanakan pada bulan februari-April 2025.

- IKU 3. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa %capaian output 0% dan %capaian anggaran yaitu 15,3 % dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya pada IKU ini <0 Tidak Efisien dengan hasil indeks efisiensi (IE) sebesar 0 dengan tingkat efisiensi (TE) -1. Hal ini disebabkan karena penempatan anggaran pada IKU ini, sedangkan kegiatan kinerja hingga triwulan II tidak ada kasus KLB Keracunan Pangan.
- IKU 4. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa %capaian output 123,33% dan %capaian anggaran yaitu 15,3 % dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya pada IKU ini >75 Tidak Efisien dengan hasil indeks efisiensi (IE) sebesar 8,06 dengan tingkat efisiensi (TE) 7,06. Hal ini disebabkan karena adanya blokir anggaran dalam rangka efisiensi, sehingga kegiatan yang bisa dilaksanakan di triwulan II yaitu pada bulan Mei-juni 2025 sesuai renlak relaksasi, namun tidak dilakukan sampling pada bulan april dikarenakan adanya efisiensi. Total target pangan seluruhnya dikembalikan seperti target awal yaitu 54 sampel (50 Sampel Pangan Olahan dan 4 Sampel PIRT), sehingga total target PIRT di triwulan II disesuaikan dengan rencana pelaksanaan yang sebelumnya tidak dilaksanakan pada bulan februari-April 2025.
- IKU 5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa %capaian output 36,31% dan %capaian anggaran yaitu 32,97% dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya pada IKU Persentase keputusan/rekomendasi hasil

pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder yang dilaksanakan >100% Efisien dengan hasil indeks efisiensi (IE) sebesar 1,10 dengan tingkat efisiensi (TE) 0,1. Hal ini dikarenakan telah dibukanya blokir anggaran sehingga sejalanannya penggunaan anggaran dengan kegiatan output kinerja hingga triwulan ini.

- IKU 6. Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa %capaian output 138,10% dan %capaian anggaran yaitu 32,97 % dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya pada IKU ini <75% Tidak Efisien dengan hasil indeks efisiensi (IE) sebesar 4,18 dengan tingkat efisiensi (TE) 3,18. Hal ini disebabkan karena adanya blokir anggaran sebanyak 70%, sehingga kegiatan yang bisa dilaksanakan yaitu 36,31% dari total target tahun 2025.
- IKU 7. Persentase sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa %capaian output 115,27% dan %capaian anggaran yaitu 32,97% dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya pada Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang dilaksanakan >75 Tidak Efisien dengan hasil indeks efisiensi (IE) sebesar 3,49 dengan tingkat efisiensi (TE) 2,49. Hal ini disebabkan karena adanya blokir anggaran sebanyak 70%, kemudian adanya pembukaan blokir anggaran. Kegiatan pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan pengawasan lainnya sehingga belum maksimalnya penggunaan sumber daya.
- IKU 8. Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa %capaian output 121,88% dan %capaian anggaran yaitu 32,97% dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya pada Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang dilaksanakan >75 Tidak Efisien dengan hasil indeks efisiensi (IE) sebesar 13,69 dengan tingkat efisiensi (TE) 2,69. Hal ini

disebabkan karena adanya blokir anggaran sebanyak 70% kemudian dilakukan pembukaan blokir anggaran, sehingga belum maksimalnya penggunaan sumber daya. Pada TW II kegiatan pengawasan sarana distribusi pangan olahan dilaksanakan berbarengan dengan kegiatan pengawasan lainnya seperti sampling.

- IKU 9. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa %capaian output 117,7% dan %capaian anggaran yaitu 1,81% dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya pada IKU ini >75 Tidak Efisien dengan hasil indeks efisiensi (IE) sebesar 3,56 dengan tingkat efisiensi (TE) 2,56. Hal ini disebabkan karena pengawasan iklan dilaksanakan terhadap media online dan elektronik. Untuk iklan media cetak dan media luar ruang dilaksanakan bersamaan dengan petugas melaksanakan pengawasan sarana distribusi ataupun pelaksanaan sampling sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. Sasaran Strategis “Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo” dengan capaian anggaran sebesar 15,30% sedangkan capaian kinerja sebesar 98,97 dengan hasil TE 5,46 dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran strategis ini >75 Tidak Efisien. Hal ini dikarenakan adanya blokir anggaran, namun pada triwulan II ini telah dibuka, sehingga penggunaan anggaran tidak maksimal. Namun, nilai dapat diperoleh dari baseline dan upaya yang dilakukan dengan cara melakukan verifikasi metode acuan sesuai perencanaan.
 3. Sasaran Strategis “Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo” dengan capaian anggaran sebesar 8,9% sedangkan capaian kinerja sebesar 101,02 dengan hasil TE 11,33 dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran strategis ini >75 Tidak Efisien,
 - IKU 11. Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo >75 Tidak Efisien. Capaian kinerja sebanyak 101,02 pada TW II dengan capaian anggaran sebesar 6,48. Hal ini dikarenakan

banyaknya anggaran yang masih diblokir dan akan tetapi realisasi anggaran sudah mencapai 33,76% dari anggaran yang tidak diblokir. Pada Triwulan II telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan tanggal 27 Mei 2025 dengan capaian 30 peserta dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi terkait “Pentingnya Gizi Seimbang dan Keamanan Pangan untuk Pencegahan Stunting” tanggal 19 Juni 2025 dengan capaian target 20 peserta.

- IKU 12. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan. Sampai dengan triwulan II tahun 2025 diperoleh Capaian Tingkat Efisiensi (TE) untuk indikator Jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) dengan kriteria Tidak Efisien. Pada TW II dilaksanakannya kegiatan Advokasi Sekolah Pangan Aman, Sosialisasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dan Bimbingan Teknis Kader Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.
 - IKU 13 Jumlah Desa Pangan Aman. Sampai dengan triwulan II tahun 2025 diperoleh Capaian Tingkat Efisiensi (TE) untuk indikator Jumlah Desa Pangan Aman dengan kriteria Tidak Efisien. Pada TW II dilaksanakannya kegiatan Advokasi Desa Pangan Aman, dan Bimbingan Teknis Kader Desa Pangan Aman
 - IKU 14 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas. Sampai dengan triwulan II tahun 2025 diperoleh Capaian Tingkat Efisiensi (TE) untuk indikator Jumlah Pasar Pangan Aman dengan kriteria Tidak Efisien. Pada TW II dilaksanakannya kegiatan Advokasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Bimbingan Teknis Kader Pangan Aman Berbasis Komunitas
4. Sasaran Strategis “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu”, terdapat 1 IKU yaitu, Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan. Berdasarkan data yang telah tersaji diatas capaian kinerja sebesar 64,33% sedangkan capaian anggaran sebesar 1,07 % dengan kategori capaian “Tidak Efisien”, sehingga dapat dikatakan bahwa capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan serapan anggaran yang digunakan. Hal ini diakibatkan karena adanya pemblokiran anggaran, sehingga sebanyak 87,94% anggaran untuk indikator ini tidak dapat digunakan.

Pada TW II sudah dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) pada tanggal 15-16 Mei 2025 dan Sudah dilakukan pendampingan UMKM serta keluarnya 2 sertifikat CPPOB atas nama Kopi New Nur dan AMDK Oegar.

5. Sasaran Strategis Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT yang terdiri dari 1 Indikator yaitu Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT memiliki total anggaran sebesar Rp 103.303.000 yang sudah terealisasi sebesar Rp 65,951,000 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025. efisien karena realisasi sebesar 100 karena pada Triwulan II sudah terdapat 1 kasus yang sudah pada tahap Penyerahan tersangka dan Barang Bukti (P21) pada bulan April tahun 2025, sedangkan pada perencanaan target Triwulan II Tahun 2025 adalah 93, sedangkan capaian perentase di triwulan II sebesar 107,53 %. Dan dikategorikan sangat baik.
6. Sasaran Strategis Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT yang terdiri dari 1 Indikator yaitu Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan ssediaan farmasi dan pangan olahan di UPT memiliki total anggaran termasuk yang di blokir sebesar Rp 58.000.000 sedangkan anggaran tidak termasuk blokir sebesar Rp.11.100.000 yang sudah terealisasi sebesar Rp 4.728.000 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dari anggran tidak termasuk pemblokiran sehingga mencapai 42,59 % (dari Pagu tidak termasuk blokir). Tidak efisien karena sampai dengan Triwulan II anggaran masih dilakukan pemblokiran sebesar 80,86% dengan penyesuaian target output dari Deputi IV BPOM RI dari yang semula 14 menjadi 4. Efektif dan efisien akan terlihat pada akhir tahun karena penilai direktorat cegah tangkal akan dilakukan di akhir tahun.
7. Sasaran Strategis Layanan Publik UPT yang prima yang terdiri dari 1 Indikator yaitu Indeks Pelayanan Publik UPT Pada Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik belum dilaksanakan kegiatan penilaian sehingga realisasi kegiatan 0 sementara untuk realisasi anggaran sebesar 56,63 %. Kategori capaian tersebut berada pada kategori <0 Tidak efisien. Hal ini dikarenakan pada anggaran ini dimasukan anggaran pengadaan barang dan jasa untuk perkantoran yang

disiapkan guna pelayanan publik yang prima sebelum dilakukan penilaian oleh pihak pusat.

8. Sasaran Strategis 8 Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal, terdiri dari 4 indikator kinerja, secara keseluruhan pada sasaran strategis ini 3 IKU perhitungan dilakukan di akhir tahun. Disimpulkan >75 Tidak Efisien perlu upaya peningkatan kinerja.

- IKU 19. Nilai AKIP UPT BPOM Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa pada Triwulan II belum terdapat capaian kinerja dikarenakan Capaian Indikator tersebut baru ada ketika telah dilakukan evaluasi SAKIP oleh Inspektorat BPOM. Capaian Anggaran pada Triwulan II mencapai Rp.330.106.310,00 atau sebesar 37,65% sehingga dapat disimpulkan penggunaan sumber daya pada IKU Nilai AKIP UPT BPOM tidak efisien dengan indeks efisiensi (IE) sebesar 0 dan Tingkat efisiensi (TE) sebesar -1. Anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan secara optimal. Adanya efisiensi dan blokir anggaran menyebabkan adanya penyesuaian terhadap optimalisasi kegiatan operasional yang kurang memberikan dampak secara signifikan pada peningkatan kualitas hasil evaluasi Nilai Kinerja Anggaran Lingkungan Loka POM di Kabupaten Bungo. Anggaran difokuskan pada pemenuhan kegiatan koordinasi, fasilitas sarana dan prasarana dan sebagainya untuk operasional kantor.
- IKU 20. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Triwulan II belum terdapat capaian kinerja dikarenakan Capaian Indikator tersebut baru dinilai saat Akhir Tahun berjalan. Capaian Anggaran pada Triwulan II mencapai Rp.247.579.733,00 atau sebesar 37,65% sehingga dapat disimpulkan penggunaan sumber daya pada IKU Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM tidak efisien dengan indeks efisiensi (IE) sebesar 0 dan Tingkat efisiensi (TE) sebesar -1. Hal ini disebabkan karena berdasarkan tagging anggaran pada IKU Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM, sudah terdapat realisasi anggaran berdasarkan komponen Gaji dan

Tunjangan, serta Operasional dan Pemeliharaan Kantor dari bulan Januari s.d. Juni 2025

- IKU 21. Indikator Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM penilaian dilakukan di akhir tahun sehingga sampai triwulan II tahun 2025 belum ada realisasi output. Namun, terdapat realisasi anggaran berdasarkan komponen Gaji dan Tunjangan, serta Operasional dan Pemeliharaan Kantor dari bulan Januari s.d. Juni 2025
- IKU 22. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran tidak efektif karena belum dilaksanakan kegiatan RB secara keseluruhan sesuai dengan target tahun 2025 dan di TW II ini sudah dilaksanakan program berupa penegakkan disiplin, kode etik dan kode perilaku yang menjadi tanggungjawabnya disusun secara lengkap dan tepat waktu (Dokumen yg dimaksud adalah Dokumen Monev pelaporan disiplin, pelaporan apel dan upacara, monev cuti, penyusunan berkas disiplin. Pengembangan karir yang menjadi tanggungjawabnya telah terlaksana serta disusun secara lengkap dan tepat waktu (Dokumen yang dimaksud adalah dokumen pengangkatan atau pemberhentian dalam jabatan, dokumen peningkatan status CPNS ke PNS, dokumen usulan kenaikan pangkat atau jabatan, dokumen usulan promosi jabatan, dokumen usulan redistribusi pegawai, dokumen usulan mutasi eksternal, dokumen persiapan pelantikan JF & Pelantikan PNS, Dokumen pencatuman gelar, Dokumen pengelolaan JF). Pengelolaan kesejahteraan yang menjadi tanggungjawabnya disusun secara lengkap dan tepat waktu telah terlaksana (dokumen yang dimaksud adalah dokumen pembayaran tunj, dokumen pembayaran gaji, usul karpeg, karis, karsu, taspen, bpjs, KP4, KGB, dokumen monev tindaklanjut survey engagement, dokumen monev kesehatan mental pegawai, dokumen usulan surat penugasan). Data pegawai (Riwayat Penghargaan, Hukuman Disiplin, Riwayat Pangkat, Jabatan, Riwayat Gaji, Riwayat Sumpah, Updating Jatah Cuti, Pendidikan, Riwayat Keluarga, Mutasi Internal antar Fungsi) yang menjadi tanggungjawabnya telah terlaksana serta dimutakhirkan secara akurat dan

berkala melalui Aplikasi SIASN. Tersedianya dokumen perencanaan kinerja (Renstra / revisi renstra, perjanjian kinerja, rencana kerja tahunan) yang berorientasi hasil. terselesaikannya dokumen laporan kinerja yang menjadi tanggungjawabnya (bulanan, triwulan dan tahunan). Telah terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pengelola akuntabilitas kinerja.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Kendala

4.3 Rekomendasi



BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo menyajikan hasil pengukuran terhadap 8 (delapan) Sasaran Strategis dengan 22 (Dua Puluh Dua) Indikator Kinerja Utama. Berikut rincian nilai pencapaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Capaian Indikator pada sasaran strategis Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo dengan capaian sebesar 109,33 dengan kategori Sangat Baik.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target pada sasaran strategis ini dengan berkelanjutan melakukan koordinasi secara rutin kepada Balai Penguji Regional serta melakukan penyusunan target sampling dan pengujian berdasarkan pedoman sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, Meningkatkan monitoring pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA).

2. Capaian Indikator pada sasaran strategis Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo dengan capaian sebesar 108,29 dengan kategori Sangat Baik.

Upaya yang dilakukan dengan monitoring dan evaluasi berkelanjutan dari perencanaan yang telah dibuat terkait capaian Standar Ruang Lingkup (SRL), pemenuhan Standar Peralatan dan Standar Kompetensi Laboratorium (SKL)

3. Capaian Indikator pada sasaran strategis Meningkatnya efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo dengan capaian sebesar 91,92% dengan kategori Cukup.

Upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan beberapa kegiatan diadakan melalui daring seperti sosialisasi terkait Sosialisasi Keamanan

Pangan Produk Pangan Olahan Terkemas untuk UMK secara Zoom Meeting, namun terdapat beberapa IKU yang tidak tercapai pada sasaran strategis ini sehingga mengakibatkan rendahnya capaian pada sasaran strategis ini.

4. Capaian Indikator pada sasaran strategis Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu dengan capaian sebesar 110 dengan kategori Sangat Baik.

Upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan memaksimalkan kegiatan secara daring seperti, Sosialisasi Keamanan Pangan dan Pendampingan UMKM secara daring serta memaksimalkan layanan pada Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Bungo.

5. Capaian Indikator pada sasaran strategis Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo dengan capaian 107,53 diperoleh kriteria Sangat Baik.

Upaya yang dilakukan yaitu menyelesaikan perkara sesuai dengan tahapan yang ada hingga selesai Tahap II.

6. Capaian Indikator pada sasaran strategis Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo dengan capaian 101,84 kategori Sangat Baik.

Upaya yang dilakukan yaitu adaptif terhadap sistem pelaporan baru laporan siber dan laporan profiling kejahatan

7. Indikator pada sasaran strategis Layanan Publik UPT yang prima dilakukan pengukuran pada akhir tahun 2025.

8. Capaian Indikator pada sasaran strategis Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal di Kabupaten Bungo dengan capaian 100 kriteria Baik

Upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan monitoring terhadap implementasi dan tercapainya terkait reformasi birokrasi.

4.2 KENDALA

Kendala yang dihadapi oleh Loka POM di Kabupaten Bungo antara lain :

1. Kurangnya jumlah tenaga pengawas inspeksi dan sertifikasi dibandingkan dengan jumlah sarana yang menjadi target Loka POM di Kabupaten Bungo
2. Adanya kebocoran informasi dalam kegiatan penindakan tindak pidana Obat ilegal oleh oknum ekspedisi.
3. Penguasaan teknologi informasi pelaku usaha masih terbatas
4. Adanya efisiensi anggaran yang berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan tupoksi.
5. Pengelolaan kinerja anggaran yang belum optimal. Halaman III DIPA belum dilakukan perencanaan secara maksimal.
6. Pengambilan sampel yang belum sesuai dengan pedoman sampling dan terjadi beberapa kali kesalahan pengiriman sampel yang tidak sesuai dengan balai tujuan.

4.3 REKOMENDASI

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk berkomitmen dalam menindaklanjuti hasil pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu program atau kegiatan yang merupakan tanggungjawab dari pemangku kepentingan didorong agar dilaksanakan secara mandiri sehingga kerjasama/ kemitraan berjalan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
2. Peningkatan kompetensi dan jumlah SDM untuk pengawasan Obat dan Makanan
3. Agar mendapatkan halaman III DIPA yang baik, diharapkan melakukan monitoring Rutin Halaman III DIPA setiap bulannya dengan rapat evaluasi rutin dan melakukan revisi secara cermat dan tepat.
4. Pengelolaan kinerja anggaran yang optimal dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk mencapai kinerja yang maksimal

5. Sampel disampling sesuai dengan perencanaan sampling yang sudah sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian tahun berjalan, serta menyesuaikan jadwal pengujian untuk sampel regional.
6. Aktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Balai penguji sampel mengenai kemampuan uji serta ketersediaan reagen untuk pengujian jika terjadi perubahan terhadap perencanaan sampling

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN BUNGO
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PERNANDA SAPRYANOKI

Jabatan : Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kabupaten Bungo, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten
Bungo


PERNANDA SAPRYANOKI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI


TARUNA IKRAR

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN BUNGO**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78.5 Persen
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persen
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persen
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persen
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72 Persen
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	70 Persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.75 Persen
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persen
2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.19 Persen
		01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11.5 Persen
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.83 Persen
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1 Sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	1 Desa
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
		01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	85.5 Persen
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	93 Persen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persen
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.4 Indeks
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	78.39 Persen
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 predikat
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.55 Persen
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100 persen

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 3.572.436.000 (Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1.410.506.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2.161.930.000

Kabupaten Bungo, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten
Bungo


PERNANDA SAPRYANOKI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI


TARUNA IKRAR



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN BUNGO
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	81,008,500
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	81,008,500
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	28,259,250
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	56,518,500
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		5	10	152	20	25	30	35	40	50	60	72	35,295,600
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	35,295,600
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	35,295,600
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	35,295,600
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.19	83.19	83.19	83.19	83.19	83.19	83.19	83.19	83.19	83.19	83.19	83.19	35,295,600
2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			10	10.5	10.5	10.5	11	11	11	11.5	11.5	11.5	28,259,250
3.	04 - Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86.83	86.83	86.83	86.83	86.83	86.83	86.83	86.83	86.83	86.83	92,941,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	wilayah kerja UPT	02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan			25	25	50	75	80	80	80	80	80	2	8,875,000
		03 - Jumlah desa pangan aman			25	25	25	25	50	50	75	75	80	1	8,875,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		25	25	25	25	25	50	50	75	75	80	1	7,100,000
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	10	10	20	40	40	40	40	40	80	80	80	85.5	372,105,000
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT												93	80,651,500
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	80,651,500
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.4	306,000,000
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM												78.39	864,772,000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	648,579,000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.55	648,579,000
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	0	5	10	20	30	40	50	60	65	70	75	100	1,775,000
Total															3,572,436,000

Kabupaten Bungo, 12 February 2025

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo

PERNANDA SAPRYANOKI

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN BUNGO
NOMOR PR.02.03.8C.09.24.35 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN BUNGO,

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di KABUPATEN BUNGO pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di KABUPATEN BUNGO Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di KABUPATEN BUNGO tentang Rencana Kinerja Loka) Pengawas Obat dan Makanan di KABUPATEN BUNGO Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2025-2029;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BUNGO TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja (Balai Besar/Balai/ Loka) Pengawas Obat dan Makanan di KABUPATEN BUNGO Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Loka Pengawas Obat dan Makanan di KABUPATEN BUNGO dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Bungo
pada tanggal September 2024

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN BUNGO,



PERNANDA SAPRYANOKI, S.FARM, APT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI KABUPATEN BUNGO
NOMOR PR.02.03.8C.09.24.35 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KINERJA LOKA
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78,5
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	70
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83,19
4	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,5
5	Meningkatnya efektivitas KIE di masing- masing Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,83
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
6	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91
7	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100
8	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
9	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,4
10	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100
		Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	78,39
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM (Satker)	90,92
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,55

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN BUNGO,



PERNANDA SAPRYANOKI, S.FARM, APT